

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



2  
0  
2  
2



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat, karunia dan ridho Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Aturan di atas diperbaharui berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk pedoman evaluasi telah diperbaharui pula berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah.

LKjIP juga merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dan sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun berikutnya.

Samarinda, Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Dra. SRI WAHYUNI, M.P.P.**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19701229 199003 2 003**

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun dengan tujuan memberikan gambaran capaian kinerja dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahunan.

LKjIP Tahun 2022 ini merupakan laporan kinerja tahun keempat atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang kemudian direviu dalam Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Data dalam dokumen LKjIP ini merupakan kompilasi laporan kinerja Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupa informasi kinerja yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yang kemudian diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan.

Pada Tahun Anggaran 2022, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 8 (delapan) program, 30 (tiga puluh) kegiatan dan 98 (sembilan puluh delapan) sub kegiatan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.337.116.293.240,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.318.820.308.580,- dan Belanja Modal Rp.18.295.984.660,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp.294.339.945.918,- (87,31%) dengan rincian untuk Belanja Operasi Rp.282.847.983.742,- (88,72%) dan Belanja Modal Rp.11.491.962.176,- (62,81%).

Hasil capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dapat dilihat pada rangkuman pencapaian sebagai berikut:

## Pengukuran Kinerja Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis                                            | Indikator Kinerja                                                                    | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| (1) | (2)                                                          | (3)                                                                                  | (4)    | (5)       | (6)         |
| 1.  | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah       | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)*                   | 3,10   | 3,0885*   | 99,62       |
|     |                                                              | Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti                                            | 92,50  | 90,00     | 97,30       |
|     |                                                              | Persentase Kebijakan Bidang Kesra yang ditindaklanjuti                               | 87,00  | 100,00    | 114,94      |
|     |                                                              | Persentase Rancangan Produk Hukum yang diharmonisasi                                 | 100,00 | 102,00    | 102,00      |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti              | 95,00  | 96,77     | 101,86      |
|     |                                                              | Persentase Capaian Pelaksanaan Pembangunan yang tepat waktu Lingkup Pekerjaan Utama  | 75,00  | 97,24     | 129,65      |
|     |                                                              | Indeks Tata Kelola Pengadaan                                                         | 75,00  | 64,30     | 85,73       |
| 3.  | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik             | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B)                  | 79,00  | 89,19     | 112,90      |
|     |                                                              | Indeks Kelembagaan                                                                   | 67,00  | 71,53     | 106,76      |
| 4.  | Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintah                     | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)         | 70,00  | 85,11     | 121,59      |
|     |                                                              | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 77,50  | 83,38     | 107,59      |
|     |                                                              | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan         | 77,35  | 85,78     | 110,90      |

Sumber: data Biro-biro tahun 2022 diolah

\*) Skor EKPPD angka sangat sementara

Hasil capaian kinerja pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah bekerja dengan baik dan dapat melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Namun demikian, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang masih perlu perbaikan dalam pencapaian kinerjanya guna penguatan peran Sekretariat Daerah dalam pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah.

Indikator kinerja yang perlu dilakukan upaya perbaikan, sebagai berikut:

1. Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dengan persentase capaian kinerja 99,62%;
2. Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan persentase 97,30%;
3. Indeks Tata Kelola Pengadaan dengan persentase 85,73%.

## DAFTAR ISI

|                                                                                               | <b>Halaman</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Kata Pengantar                                                                                | i              |
| Ikhtisar Eksekutif                                                                            | iii            |
| Daftar Isi                                                                                    | vi             |
| Daftar Tabel                                                                                  | vii            |
| Daftar Lampiran                                                                               | ix             |
| <b>BAB I    Pendahuluan</b>                                                                   | <b>1</b>       |
| 1.1   Dasar Pembentukan Organisasi                                                            | 1              |
| 1.2   Landasan Hukum                                                                          | 2              |
| 1.3   Tugas dan Fungsi                                                                        | 3              |
| 1.4   Struktur Organisasi                                                                     | 3              |
| 1.5   Sumber Daya Manusia                                                                     | 6              |
| 1.6   Aspek Strategis Organisasi                                                              | 8              |
| 1.7   Permasalahan Utama                                                                      | 9              |
| 1.8   Sarana dan Prasarana Kerja Setda Prov. Kaltim                                           | 11             |
| <b>BAB II   Perencanaan Strategis</b>                                                         | <b>12</b>      |
| 2.1   Perencanaan Strategis                                                                   | 12             |
| 2.2   Reviu Indikator Kinerja Utama                                                           | 18             |
| 2.3   Perjanjian Kinerja                                                                      | 19             |
| <b>BAB III   Akuntabilitas Kinerja</b>                                                        | <b>22</b>      |
| 3.1   Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP<br>Sebelumnya                      | 22             |
| 3.2   Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi                                                   | 26             |
| 3.3   Analisis Capaian Kinerja                                                                | 29             |
| 3.3.1 Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja<br>Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                  | 29             |
| 3.3.2 Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Kebijakan<br>Perekonomian dan Pembangunan              | 35             |
| 3.3.3 Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Kebijakan<br>Pelayanan Publik                          | 46             |
| 3.3.4 Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Layanan<br>Pemerintah                                  | 52             |
| 3.3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya                                          | 69             |
| 3.3.6 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan<br>/Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja | 69             |
| 3.4   Realisasi Anggaran                                                                      | 70             |
| <b>BAB IV   Penutup</b>                                                                       | <b>85</b>      |
| <b>Lampiran</b>                                                                               |                |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                              | <b>Halaman</b> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tabel 1.1 | Jumlah Sumber Daya Manusia (PNS & Non-PNS) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2022 | 7              |
| Tabel 1.2 | Sarana dan Prasarana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022                 | 11             |
| Tabel 2.1 | Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target                                    | 14             |
| Tabel 2.2 | Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran                                                               | 16             |
| Tabel 2.3 | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                                                                | 18             |
| Tabel 2.4 | Perjanjian Kinerja Tahun 2022                                                                                | 19             |
| Tabel 2.5 | Target Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022                                       | 20             |
| Tabel 2.6 | Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2022                                                                    | 21             |
| Tabel 3.1 | Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2021                                                   | 22             |
| Tabel 3.2 | Rekomendasi, Tindak Lanjut, dan Rencana Aksi                                                                 | 23             |
| Tabel 3.3 | Pengukuran Kinerja Tahun 2022                                                                                | 27             |
| Tabel 3.4 | Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022                                                  | 29             |
| Tabel 3.5 | Perbandingan antara Realisasi Tahun 2021 dengan Tahun 2022                                                   | 29             |
| Tabel 3.6 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RENSTRA                                              | 30             |
| Tabel 3.7 | Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022                                                  | 35             |
| Tabel 3.8 | Perbandingan antara Realisasi Tahun 2021 dengan Tahun 2022                                                   | 36             |
| Tabel 3.9 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RENSTRA                                              | 36             |

|            |                                                                                 |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.10 | Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022                     | 47 |
| Tabel 3.11 | Perbandingan antara Realisasi Tahun 2021 dengan Tahun 2022                      | 47 |
| Tabel 3.12 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RENSTRA                 | 47 |
| Tabel 3.13 | Daftar Nilai SAKIP Perangkat Daerah Pemprov. Kaltim Tahun 2022                  | 48 |
| Tabel 3.14 | Pemetaan Jumlah Perangkat Daerah per Predikat Kinerja Hasil Evaluasi Tahun 2022 | 49 |
| Tabel 3.15 | Hasil Penilaian Indeks Kelembagaan Pemprov. Kaltim Tahun 2022                   | 50 |
| Tabel 3.16 | Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022                     | 53 |
| Tabel 3.17 | Perbandingan antara Realisasi Tahun 2021 dengan Tahun 2022                      | 53 |
| Tabel 3.18 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RENSTRA                 | 54 |
| Tabel 3.19 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022                             | 69 |
| Tabel 3.20 | Program Prioritas dalam Pelaksanaan Sasaran Strategis Tahun 2022                | 69 |
| Tabel 3.21 | Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022                  | 71 |
| Tabel 3.22 | Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022                 | 73 |

## DAFTAR LAMPIRAN

- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100/K.122/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 050/0692/B.Adpim-I tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 050/0971/B.Adpim-I tentang Tim Asistensi/*Coaching Clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 066/0040/B.Org-RB tanggal 3 Januari 2023 Perihal: Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2023;
- Outline Penyusunan Laporan Kinerja
- Nota Dinas Asisten Administrasi Umum Nomor: 000.1.5/0729/B.Adpim-I tanggal 3 April 2023 Perihal: Undangan;
- Notulen Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- Daftar Hadir Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Asisten Administrasi Umum;
- *Employee of the Month* Ekosistem Agen Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

## BAB I PENDAHULUAN

---

Akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggambarkan arah gerak operasional pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang diimplementasikan dalam mewujudkan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024, yaitu “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”. Dari 5 (lima) Misi Provinsi Kalimantan Timur, Setda Prov. Kaltim mengampu misi ke-5, yakni “Berdaulat dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik”. Misi ini diuraikan lagi menjadi tujuan dan sasaran, sebagaimana terdapat pada P-Renstra Setda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023, yaitu (1) Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien, serta (2) Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas yang selanjutnya dirumuskan menjadi sasaran yang akan dicapai:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan;
3. Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik;
4. Meningkatnya kualitas layanan pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kinerjanya.

### 1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

Dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, Sekretariat Daerah sebagai unsur Staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis.

Kemudian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah.

### **1.3 Tugas dan Fungsi**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

### **1.4 Struktur Organisasi**

Menyesuaikan Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi yang termasuk dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, terbitlah Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang

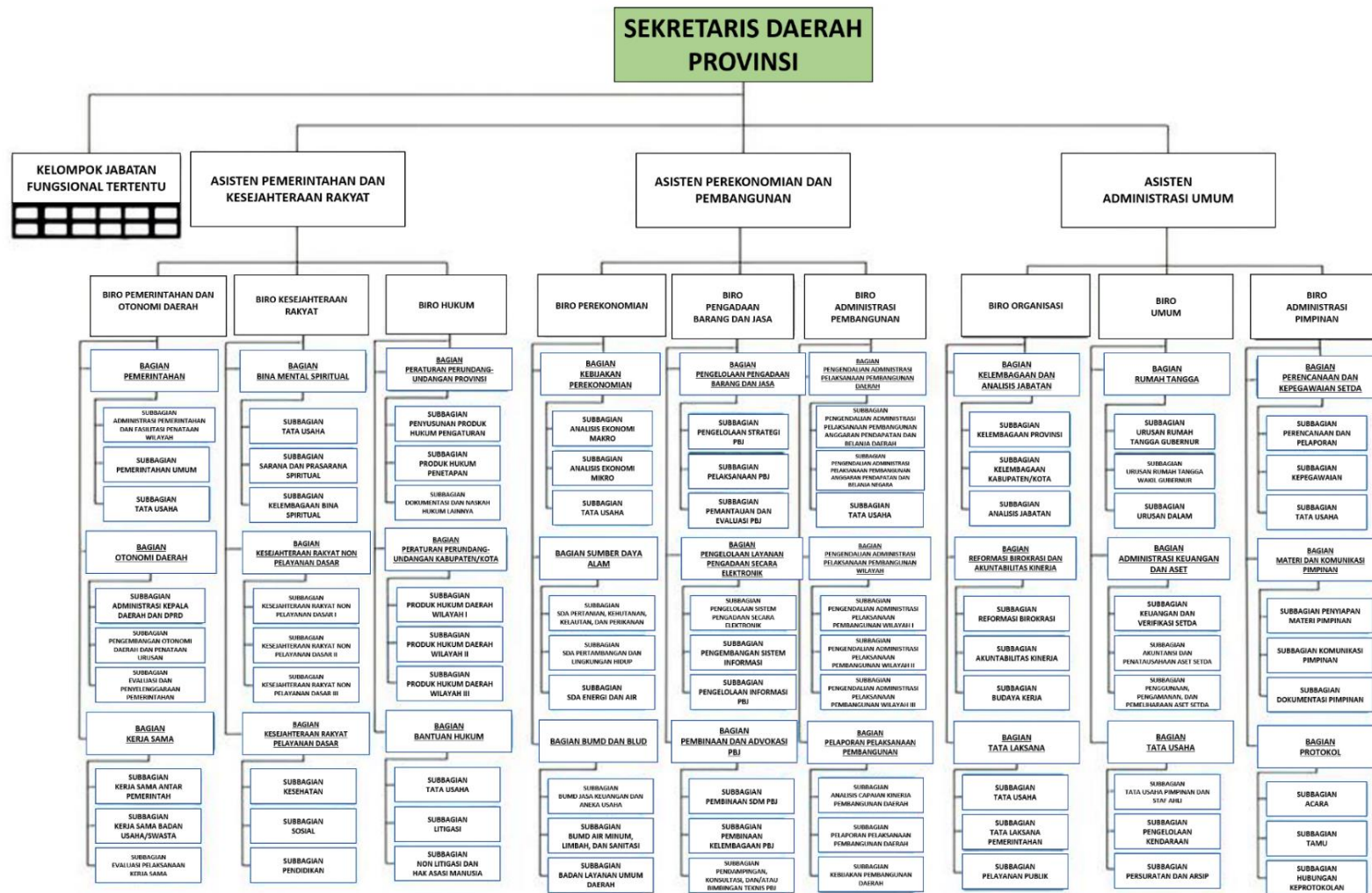
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 yang tertuang pada Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021.

Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**



## **1.5 Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, di antaranya keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan SDM yang kompeten dan professional, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini harus diimbangi dengan peningkatan SDM yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini data mengenai ASN dan Non ASN yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pendidikan, golongan, eselon dan jenis kelamin:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Sumber Daya Manusia (PNS dan Non-PNS)**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Per 31 Desember 2022**

| JABATAN                     | JENIS KELAMIN |           | GOLONGAN |     |    |   | PENDIDIKAN    |         |         |      |      |    |
|-----------------------------|---------------|-----------|----------|-----|----|---|---------------|---------|---------|------|------|----|
|                             | Laki-laki     | Perempuan | IV       | III | II | I | Pasca Sarjana | Sarjana | Diploma | SLTA | SLTP | SD |
| Sekretaris Daerah           | -             | 1         | 1        | -   | -  | - | 1             | -       | -       | -    | -    | -  |
| Asisten                     | 3             | -         | 3        | -   | -  | - | 3             | -       | -       | -    | -    | -  |
| Staf Ahli                   | 2             | -         | 2        | -   | -  | - | 2             | -       | -       | -    | -    | -  |
| Tenaga Fungsional Utama     | -             | 1         | 1        | -   | -  | - | 1             | -       | -       | -    | -    | -  |
| Kepala Biro                 | 5             | 4         | 9        | -   | -  | - | 9             | -       | -       | -    | -    | -  |
| Kepala Bagian               | 17            | 10        | 23       | 4   | -  | - | 25            | 2       | -       | -    | -    | -  |
| Kepala Sub Bagian           | 3             | 6         | 2        | 7   | -  | - | 2             | 7       | -       | -    | -    | -  |
| Fungsional Tertentu         | 53            | 33        | 17       | 68  | 1  | - | 19            | 63      | 4       | -    | -    | -  |
| Fungsional Umum (Pelaksana) | 148           | 47        | 2        | 103 | 81 | 9 | 10            | 65      | 8       | 103  | 9    | -  |
| Tenaga Honor/PTT            | 191           | 107       | -        | -   | -  | - | 3             | 102     | 8       | 185  | -    | -  |
| Jumlah PNS                  | 231           | 102       | 60       | 182 | 82 | 9 | 72            | 137     | 12      | 103  | 9    | -  |
| Jumlah Honor/PTT            | 191           | 107       | -        | -   | -  | - | 3             | 102     | 8       | 185  | -    | -  |
| Jumlah PNS + Honor/PTT      | 422           | 209       | 60       | 182 | 82 | 9 | 75            | 239     | 20      | 288  | 9    | -  |
| Jumlah                      | 631           |           | 333      |     |    |   | 631           |         |         |      |      |    |

Sumber: data Biro-biro di lingkungan Setda Prov. Kaltim

### **1.5.1 Pendidikan**

Per 31 Desember 2022, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 631 orang dengan berbagai tingkat Pendidikan mulai dari SD sampai dengan S2/S3. Berdasarkan rekapitulasi dari 631 orang PNS dan non-PNS jika diranking menurut tingkat Pendidikan, maka Pendidikan SLTA menduduki urutan pertama dengan jumlah 288 orang, urutan kedua adalah Pendidikan Sarjana yaitu sebanyak 239 orang, urutan ketiga adalah Pendidikan Pasca Sarjana yaitu sebanyak 75 orang, urutan keempat adalah Pendidikan Diploma sebanyak 20 orang, urutan terakhir adalah Pendidikan SLTP sebanyak 9 orang.

### **1.5.2 Golongan dan Jenis Kelamin**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan professional di bidangnya, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara terus-menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparturnya, baik dari pendidikan maupun kepangkatan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi pemerintahan.

Per 31 Desember 2022, Sumber Daya Aparatur dari sejumlah 333 ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur jika diranking berdasarkan jumlah golongan yang terbanyak dimiliki oleh golongan III sebanyak 182 orang diikuti oleh golongan II sebanyak 82 orang, golongan IV sebanyak 60 orang dan golongan I sebanyak 9 orang.

Dari rekapitulasi data Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2022, dapat disimpulkan bahwa SDM berjenis kelamin laki-laki sebanyak 422 orang dan perempuan sebanyak 209 orang.

## **1.6 Aspek Strategis Organisasi**

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif.

Selain itu Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, penetapan lokasi (penlok) penegasan batasan wilayah dan pertanahan, pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, pemilihan pengadaan barang dan jasa, pembinaan pelaku barang dan jasa, LPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, fungsi pengelolaan pemberian dana hibah terkait sarana prasarana keagamaan, dan hibah pendidikan khusus berbasis keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat.

Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut adalah sebagai pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur Daerah dan Sekretaris DPRD kepada Kepala Daerah.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mendukung pencapaian visi dan mampu misi ke-5, yakni “Berdaulat dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik”. Misi ini diuraikan lagi menjadi tujuan dan sasaran, sebagaimana yang terdapat dalam P-Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yakni (1) Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien serta (2) Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.

## **1.7 Permasalahan Utama**

Beberapa permasalahan utama yang terdapat di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Skor EKPPD tahun 2019-2020 belum ditetapkan dan diumumkan oleh Kemendagri berdasarkan Permendagri Nomor 18 tahun 2020, sehingga masih dalam tahap transisi/perubahan.
- b) Beberapa usulan kerjasama tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya objek kerjasama.
- c) Belum optimalnya penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat serta terdapat kegiatan yang memiliki *output* belum optimal dalam membantu pencapaian target kinerja pemerintah daerah dalam RPJMD.
- d) Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyelesaian bantuan hukum yang memerlukan waktu dan proses cukup panjang sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja.
- e) Upaya pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan bidang perekonomian yang belum optimal serta belum tersusunnya data yang terintegrasi terkait dengan sektor-sektor di bidang perekonomian.
- f) Kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa.
- g) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah belum semuanya dilakukan secara elektronik sehingga kesulitan dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
- h) Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelaporan.
- i) Akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah masih belum dijadikan budaya/dasar budaya kinerja.
- j) Belum optimalnya perencanaan terhadap kebutuhan pimpinan dan kebutuhan pelayanan Biro Umum.
- k) Kualitas pelayanan Administrasi Pimpinan yang perlu ditingkatkan.

### 1.8 Sarana dan Prasarana Kerja Setda Prov. Kaltim

Sarana dan Prasarana Kerja yang menunjang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Sarana dan Prasarana Kerja Setda Prov. Kaltim**  
**Per 31 Desember 2022**

| No  | Uraian      | Banyaknya | Satuan          | Keterangan                  |
|-----|-------------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| (1) | (2)         | (3)       | (4)             | (5)                         |
| 1   | Tanah       | 3.370     | m <sup>2</sup>  |                             |
| 2   | Gedung      | 2         | Unit (2 lantai) |                             |
|     |             | 2.048     | m <sup>2</sup>  |                             |
| 3   | Listrik     | 3         | Jaringan        |                             |
| 4   | Air         | 2         | Jaringan        |                             |
| 5   | Telepon     | 4         | Line            | 1 internet, telepon dan fax |
| 6   | Area Parkir | 3         | Area            |                             |
| 7   | Ruang Rapat | 14        | Ruang           |                             |
| 8   | Ruang Arsip | 1         | Ruang           |                             |
| 9   | Koperasi    | 1         | Unit            |                             |
| 10  | Taman Dalam | 2         | Area            |                             |
| 11  | Komputer    | 464       | Unit            |                             |
| 12  | Printer     | 460       | Unit            |                             |
| 13  | Meja        | 876       | Unit            |                             |

Sumber: Biro Umum Setda Prov. Kaltim

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

---

### 2.1 Perencanaan Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategik Instansi Pemerintah, yang di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaannya.

Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah **“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**. Visi tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Misi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Guna mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, misi pembangunan dalam 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;

3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional, dan berorientasi pelayanan publik.

Adapun tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target**

| NO. | TUJUAN                                         | SASARAN                                                      | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                            | SATUAN     | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- |                     |                  |                  |                  | PENANGGUNG JAWAB  |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|     |                                                |                                                              |                                                                                     |            | 2019                                         | 2020                | 2021             | 2022             | 2023             |                   |
| (1) | (2)                                            | (3)                                                          | (4)                                                                                 | (5)        | (6)                                          | (7)                 | (8)              | (9)              | (10)             | (11)              |
| 1.  | Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien |                                                              | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                         |            | 76.55                                        | 76.60               | 76.65            | 77.00            | 78.00            |                   |
|     |                                                | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah     | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)                   | Skor       | 3.07                                         | 3.08                | 3.095            | 3.10             | 3.15             | Biro POD          |
|     |                                                |                                                              | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti                                           | Persentase | 85.00                                        | 90.00               | 90.00            | 92.50            | 95.00            | Biro POD          |
|     |                                                |                                                              | Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti                              | Persentase | 80.00                                        | 85.00               | 85.00            | 87.00            | 90.00            | Biro Kesra        |
|     |                                                |                                                              | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi                                | Persentase |                                              |                     | 100.00           | 100.00           | 100.00           | Biro Hukum        |
|     |                                                | Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan | Persentase kebijakan daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti             | Persentase |                                              |                     | 90               | 95               | 100              | Biro Perekonomian |
|     |                                                |                                                              | Indeks tata kelola pengadaan                                                        | Indeks     |                                              |                     | 70 (cukup)       | 75 (baik)        | 80 (baik)        | Biro PBJ          |
|     |                                                |                                                              | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | Persentase | 0                                            | 0                   | 70               | 75               | 80               | Biro Adbang       |
|     |                                                | Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik             | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B)                 | Persentase | 70                                           | 75                  | 77               | 79               | 81               | Biro Organisasi   |
|     |                                                |                                                              | Indeks Kelembagaan                                                                  | Indeks     |                                              | 65.64 (peringkat 4) | 66 (peringkat 4) | 67 (peringkat 4) | 69 (peringkat 4) |                   |

| NO. | TUJUAN                                                           | SASARAN                                  | INDIKATOR<br>TUJUAN/SASARAN                                                      | SATUAN     | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN<br>PADA TAHUN KE- |                |                |                |                | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|     |                                                                  |                                          |                                                                                  |            | 2019                                            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |                     |
| (1) | (2)                                                              | (3)                                      | (4)                                                                              | (5)        | (6)                                             | (7)            | (8)            | (9)            | (10)           | (11)                |
| 2.  | Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas |                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                       |            | 81.50                                           | 82.00          | 82.30          | 82.50          | 83.00          |                     |
|     |                                                                  | Meningkatnya kualitas layanan pemerintah | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)     | Persentase | 67                                              | 68             | 69             | 70             | 71             | Biro Organisasi     |
|     |                                                                  |                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Indeks     | 76.61 (B/Baik)                                  | 77.00 (B/Baik) | 77.10 (B/Baik) | 77.50 (B/Baik) | 77.80 (B/Baik) | Biro Umum           |
|     |                                                                  |                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan              | Indeks     | 76.90                                           | 77.05          | 77.20          | 77.35          | 77.50          | Biro Adpim          |

Sumber: P-Renstra Setda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023

**Tabel 2.2**  
**Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran**

| Tujuan                                                | Sasaran Strategis                                            | Indikator Sasaran                                                                   | Satuan     | Program                                                   | Kegiatan                                                         | Penanggung Jawab                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien</b> | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah       | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)                   | Skor       | Pemerintahan dan Otonomi Daerah                           | Pelaksanaan Otonomi Daerah                                       | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
|                                                       |                                                              | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti                                           | Persentase |                                                           | Fasilitasi Kerjasama Daerah                                      |                                      |
|                                                       |                                                              | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi                                | Persentase | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                   | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                         | Biro Hukum                           |
|                                                       |                                                              |                                                                                     |            |                                                           | Fasilitasi Bantuan Hukum                                         |                                      |
|                                                       |                                                              | Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti                              | Persentase | Program Kesejahteraan Rakyat                              | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                            | Biro Kesejahteraan Rakyat            |
|                                                       |                                                              |                                                                                     |            |                                                           | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar     |                                      |
|                                                       |                                                              |                                                                                     |            |                                                           | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non-Pelayanan Dasar |                                      |
|                                                       | Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan | Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti             | Persentase | Program Perekonomian dan Pembangunan                      | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                | Biro Perekonomian                    |
|                                                       |                                                              |                                                                                     |            |                                                           | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam            |                                      |
|                                                       |                                                              |                                                                                     |            |                                                           | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD               |                                      |
|                                                       |                                                              | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | Persentase | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan                | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah         | Biro Administrasi Pembangunan        |
|                                                       |                                                              |                                                                                     |            |                                                           | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                         |                                      |
|                                                       |                                                              | Indeks tata kelola pengadaan                                                        | Indeks     | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                            | Biro Pengadaan Barang dan Jasa       |
|                                                       |                                                              |                                                                                     |            |                                                           | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                  |                                      |
|                                                       |                                                              |                                                                                     |            |                                                           | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                 |                                      |

|                                                                         |                                                  |                                                                                  |            |                                                       |                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                         | Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik | Presentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B)              | Persentase | Program Penataan Organisasi                           | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja            | Biro Organisasi            |
|                                                                         |                                                  | Indeks Kelembagaan                                                               | Indeks     |                                                       | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan                         |                            |
| <b>Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas</b> | Meningkatnya kualitas layanan pemerintah         | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Indeks     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Biro Umum                  |
|                                                                         |                                                  |                                                                                  |            |                                                       | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah              |                            |
|                                                                         |                                                  |                                                                                  |            |                                                       | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           |                            |
|                                                                         |                                                  |                                                                                  |            |                                                       | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                            |
|                                                                         |                                                  |                                                                                  |            |                                                       | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                       |                            |
|                                                                         |                                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan              | Indeks     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | Biro Administrasi Pimpinan |
|                                                                         |                                                  |                                                                                  |            |                                                       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              |                            |
|                                                                         |                                                  |                                                                                  |            |                                                       | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           |                            |
|                                                                         |                                                  |                                                                                  |            |                                                       | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                            |
|                                                                         |                                                  |                                                                                  |            |                                                       | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    |                            |
|                                                                         |                                                  |                                                                                  |            |                                                       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                            |
|                                                                         |                                                  |                                                                                  |            |                                                       | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                           |                            |
|                                                                         |                                                  |                                                                                  |            |                                                       | Fasilitasi Keprotokolan                                             |                            |
|                                                                         |                                                  | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)     | Persentase | Program Penataan Organisasi                           | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan                         | Biro Organisasi            |

Sumber: data Biro-biro di lingkup Setda Prov. Kaltim

## 2.2 Reviu Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan, pembinaan dan mengkoordinasikan Dinas/Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah, tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dapat digambarkan dengan indikator-indikator sebagai ukuran.

Secara sederhana, untuk mengukur Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dapat diidentifikasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dapat dilihat penjelasannya pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

| SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                | SATUAN         | PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)                                                                                                               | SUMBER DATA                                          | PENANGGUNG JAWAB                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 1. Peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (EKPPD)                       | Peringkat      | Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri                                                                                                          | Laporan Hasil Evaluasi Dari Kementerian Dalam Negeri | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah  |
|                                                        | 2. Persentase Produk Hukum yang diharmonisasi                                          | Persentase     | $= \frac{\text{Jumlah Rancangan Produk Hukum yang diharmonisasi}}{\text{Total Produk Hukum Yang Akan Dibuat}} \times 100\%$                      | Produk Hukum                                         | Biro Hukum                            |
|                                                        | 3. Indeks Kelembagaan                                                                  | Indeks (rumus) | Perhitungan sesuai dengan Permen PANRB No.20 Tahun 2018                                                                                          | Data Kelembagaan                                     | Biro Organisasi                       |
|                                                        | 4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                              | Indeks         | $= \frac{\text{Nilai Total Indeks Kepuasan Masyarakat}}{\text{Jumlah Unit Pelayanan Yang Melaksanakan IKM}} \times 100\%$                        | IKM                                                  | Biro Umum/ Biro Administrasi Pimpinan |
|                                                        | 5. Persentase Kebijakan Bidang Kesra yang ditindaklanjuti                              | Persentase     | $= \frac{\text{Jumlah rumusan kebijakan yang disiapkan}}{\text{Total kebijakan Kesra yang menjadi isu strategis dalam satu tahun}} \times 100\%$ | Dokumen Hasil Koordinasi dan Monev                   | Biro Kesejahteraan Rakyat             |
|                                                        | 6. Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti                       | Persentase     | $= \frac{\text{Jumlah rumusan kebijakan yang disiapkan}}{\text{Total kebijakan Perekonomian}} \times 100\%$                                      | Dokumen                                              | Biro Perekonomian                     |
|                                                        | 7. Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | Persentase     | $= \frac{\text{jumlah kegiatan pembangunan strategis selesai tepat waktu}}{\text{seluruh kegiatan pembangunan strategis}} \times 100\%$          | Dokumen RPJMD                                        | Biro Administrasi Pembangunan         |
|                                                        | 8. Maturitas UKPBJ                                                                     | Level          | Hasil Evaluasi LKPP                                                                                                                              | Sesuai Penilaian LKPP                                | Biro PBJ                              |
|                                                        | 9. Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti                                           | Persentase     | $= \frac{\text{Jumlah kerjasama yang tindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kerjasama yang diinisiasi}} \times 100\%$                                      |                                                      | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah  |

Sumber: IKU Setda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023

## 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

| Sasaran Strategis                                            | Indikator Kinerja                                                                   | Satuan     | Target |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah       | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)                   | Skor       | 3.10   |
|                                                              | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti                                           | Persentase | 92.50  |
|                                                              | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi                                | Persentase | 100    |
|                                                              | Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti                              | Persentase | 87     |
| Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan | Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti             | Persentase | 95     |
|                                                              | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | Persentase | 75     |
|                                                              | Indeks tata kelola pengadaan                                                        | Indeks     | 75     |
| Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik             | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B)                 | Persentase | 79     |
|                                                              | Indeks Kelembagaan                                                                  | Indeks     | 67     |
| Meningkatnya kualitas layanan pemerintah                     | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah    | Indeks     | 77.50  |
|                                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan                 | Indeks     | 77.35  |

|  |                                                                              |            |    |
|--|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|  | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B) | Persentase | 70 |
|--|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|

Sumber: Perjanjian Kinerja Setda Prov. Kaltim Tahun 2022

#### A. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.337.116.293.240,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.318.820.308.580,- dan Belanja Modal Rp.18.295.984.660,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp.294.339.945.918,- (87,31%) dengan rincian untuk Belanja Operasi Rp.282.847.983.742,- (88,72%) dan Belanja Modal sebesar Rp.11.491.962.176,- (62,81%).

#### B. Target Belanja Setda Prov. Kaltim Tahun 2022

Target Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.5**  
**Target Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

| No | Uraian          | Tahun Anggaran 2022    |                         |       |                     |
|----|-----------------|------------------------|-------------------------|-------|---------------------|
|    |                 | Anggaran Belanja (Rp.) | Realisasi Belanja (Rp.) | %     | Sisa Anggaran (Rp.) |
| 1  | Belanja Operasi | Rp. 318.820.308.580    | Rp. 282.847.983.742     | 88,72 | Rp. 35.972.324.838  |
| 2  | Belanja Modal   | Rp. 18.295.984.660     | Rp. 11.491.962.176      | 62,81 | Rp. 6.804.022.484   |

Sumber: Aplikasi FMIS

#### C. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mencapai Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2022**

| No                                                                              | Sasaran Strategis/Program                                 | Pagu Anggaran (Rp.)    | Realisasi (Rp.)        | Capaian %    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1                                                                               | 2                                                         | 3                      | 4                      | 5            |
| <b>Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah</b>       |                                                           | <b>80.424.016.875</b>  | <b>75.928.491.236</b>  | <b>94,41</b> |
| 1.1                                                                             | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah                   | 4.691.905.604          | 4.645.920.449          | <b>99,02</b> |
| 1.2                                                                             | Program Kesejahteraan Rakyat                              | 71.600.754.071         | 67.281.184.597         | <b>93,97</b> |
| 1.3                                                                             | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                   | 4.131.357.200          | 4.001.386.190          | <b>96,85</b> |
| <b>Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan</b> |                                                           | <b>18.308.622.780</b>  | <b>16.756.251.352</b>  | <b>91,52</b> |
| 2.1                                                                             | Program Program Perekonomian dan Pembangunan              | 4.331.310.000          | 3.529.726.613          | 81,49        |
| 2.2                                                                             | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | 7.989.355.457          | 7.570.217.623          | 94,75        |
| 2.3                                                                             | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan                | 5.987.957.323          | 5.656.307.116          | 94,46        |
| <b>Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik</b>             |                                                           | <b>1.356.320.000</b>   | <b>1.307.292.243</b>   | <b>96,39</b> |
| 3.1                                                                             | Program Penataan Organisasi                               | 1.356.320.000          | 1.307.292.243          | 96,39        |
| <b>Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas layanan pemerintah</b>                     |                                                           | <b>220.908.739.734</b> | <b>187.062.158.809</b> | <b>84,68</b> |
| 4.1                                                                             | Program Penataan Organisasi                               | 450.368.000            | 388.119.662            | 86,20        |
| 4.2                                                                             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi     | 207.846.129.681        | 174.371.413.579        | 83,90        |
| 4.3                                                                             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi     | 12.612.242.053         | 12.302.625.569         | 97,54        |

Sumber: data anggaran dari masing-masing Biro di lingkungan Setda Prov. Kaltim

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya

#### 3.1.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2021**

| No.                           | Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai 2020 | Nilai 2021 | +/-   |
|-------------------------------|-----------------------|-------|------------|------------|-------|
| 1.                            | Perencanaan Kinerja   | 30    | 20,39      | 23,75      | 3,36  |
| 2.                            | Pengukuran Kinerja    | 25    | 13,75      | 15,00      | 1,25  |
| 3.                            | Pelaporan Kinerja     | 15    | 9,88       | 11,22      | 1,34  |
| 4.                            | Evaluasi Kinerja      | 10    | 3,84       | 6,85       | 3,02  |
| 5.                            | Capaian Kinerja       | 20    | 11,28      | 11,12      | -0,17 |
| Nilai Hasil Evaluasi          |                       | 100   | 59,14      | 67,93      | 8,80  |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja |                       |       | CC         | B          |       |

Sumber: LHE atas Implementasi SAKIP Tahun 2021

#### 3.1.2 Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP

Tindak lanjut terhadap rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat penjelasannya pada Tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Rekomendasi, Tindak Lanjut dan Rencana Aksi**

| No. | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tindak Lanjut/<br>Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sudah/<br>Belum                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <p><b>Perencanaan Kinerja</b><br/>Dalam Perencanaan Kinerja untuk kualitas dan implementasi supaya:</p> <p>a. Target kinerja Renstra dan Perjanjian Kinerja dengan baik dengan dilengkapi perhitungan logis dan berdasarkan basis data yang memadai serta mudah ditelusuri;</p> <p>b. Menggunakan Renstra sebagai acuan penyusunan Dokumen Anggaran khususnya keselarasan ukuran kinerja pada Tolok Ukur pada RKA/DPA;</p> <p>c. Target jangka menengah dalam Renstra agar dimonitor pencapaiannya sampai tahun berjalan dan hasil monitoring target tersebut didokumentasikan dalam bentuk laporan monitoring;</p> <p>d. Renstra yang telah direviu agar didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil revidi;</p> <p>e. Rencana aksi atas kinerja supaya mencantumkan target kinerja secara periodik, sehingga target kinerja yang diperjanjikan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan, pengarah dan pengorganisasian kegiatan.</p> | <p>a. Target Kinerja Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) telah ditetapkan dengan baik, telah sesuai dan selaras sesuai Renstra Perubahan (P Renstra) 2021, sesuai formulasi yang telah ditetapkan, dan mudah ditelusuri karena telah di-<i>upload</i> pada Website Pemprov Kalimantan Timur;</p> <p>b. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 digunakan sebagai acuan Penyusunan Dokumen Anggaran, dikontrol dengan sistem Evdoren dan dijadikan Tolok Ukur pada RKA/DPA. Setiap Triwulan Tolok Ukur tersebut dilakukan Monev oleh Bappeda (konsinyering) dan dilingkup Setda secara rutin menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi. Hal ini juga tergambar pada Aplikasi eSAKIP yang juga melakukan monitoring setiap Triwulan;</p> <p>c. Target Jangka Menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya, dan didokumentasikan dalam Buku Laporan Monitoring Target Jangka Menengah Renstra 2019-2023 berupa Laporan Penyelenggaraan Monev Renaksi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>d. Renstra Setda Provinsi Kalimantan Timur telah direviu dan telah dibuatkan dokumentasi Laporan Hasil Revidi;</p> <p>e. Rencana Aksi (Renaksi) atas kinerja telah mencantumkan target kinerja secara periodik, sehingga target kinerja yang diperjanjikan baik dalam PK maupun setiap renaksinya dari level Sekda hingga pelaksana. Target tersebut digunakan sebagai pengukuran keberhasilan, pengarah dan pengorganisasian kegiatan. Hal ini juga memudahkan dalam pengisian e-Kinerja (SKP) individu sejak tahapan perencanaan.</p> | <p>a. Sudah</p> <p>b. Sudah</p> <p>c. Sudah</p> <p>d. Sudah</p> <p>e. Sudah</p> |
| 2.  | <p><b>Pengukuran Kinerja</b><br/>Dalam Pengukuran Kinerja untuk kualitas dan implementasi supaya:</p> <p>a. Menyusun IKI sampai tingkat pelaksana;</p> <p>b. Memanfaatkan dokumen IKU sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran;</p> <p>c. Memonitor pencapaian kinerja eselon III dan IV sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>a. IKI telah disusun sampai tingkat pelaksana. Agar pelaksana mengingat akan target pada IKI tersebut, disarankan IKI masing-masing di print, difigura dan ditaruh di atas meja masing-masing;</p> <p>b. Dokumen IKU dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran, dimana dari dokumen tersebut di-<i>breakdown</i> kedalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;</p> <p>c. Telah dilakukan monitoring pencapaian kerja Eselon III dan IV salah satunya melalui e-SAKIP yang dapat digunakan sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>. Aplikasi e-Kinerja juga dapat digunakan sebagai instrumen dalam penilaian ketercapaian kinerja Eselon III dan IV. Untuk menuju tahapan ini, <i>reward</i> telah diberikan kepada organisasi (Biro) yang berhasil dalam pencapaian target kinerja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>a. Sudah</p> <p>b. Sudah</p> <p>c. Sudah</p>                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | <p>d. IKU telah dilakukan revidu, agar dilengkapi dengan laporan hasil revidu IKU;</p> <p>e. Melakukan pengukuran kinerja atas rencana aksi sehingga dapat digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Mulai tahun 2022 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga melaksanakan <i>Employee of the Month</i> yakni pemilihan role model lingkup Setda Provinsi Kalimantan Timur, yang salah satu pertimbangannya adalah keberhasilan dalam pencapaian kinerja;</p> <p>d. Revidu atas IKU masing-masing Biro dilakukan bersamaan dengan Renaksi TW 1, 2, 3 dan 4, laporannya pun termuat dalam Renaksi tersebut;</p> <p>e. Rencana Aksi digunakan sebagai pengukuran atas kinerja yang dipergunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>d. Sudah</p> <p>e. Sudah</p> |
| 3. | <p><b>Pelaporan Kinerja</b><br/>Dalam Pelaporan Kinerja untuk kualitas dan implementasi supaya:</p> <p>a. Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP agar digunakan untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>a. Dokumen LKjIP merupakan hasil kompilasi dan analisis tercapainya atau belum tercapainya kinerja Biro-biro dengan mencantumkan kendala dan solusi untuk mengurai kendala dimaksud, senantiasa dipergunakan sebagai dokumen dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Organisasi serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>a. Sudah</p>                 |
| 4. | <p><b>Evaluasi Internal</b><br/>Dalam Evaluasi Internal untuk kualitas dan implementasi supaya:</p> <p>a. Melakukan pemantauan rencana aksi secara periodik dalam rangka pengendalian kinerja supaya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;</p> <p>b. Menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>a. Rencana Aksi telah dilakukan pemantauan secara internal, secara periodik (per Triwulan) dalam rangka pengendalian kinerja supaya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;</p> <p>b. Hasil evaluasi rencana aksi akan ditindaklanjuti dalam langkah-langkah nyata</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>a. Sudah</p> <p>b. Sudah</p> |
| 5. | <p><b>Pencapaian Kinerja</b><br/>Dalam Pencapaian Kinerja untuk kualitas dan implementasi supaya:</p> <p>a. Lebih meningkatkan perbaikan atas pencapaian sasaran/kinerja organisasi baik <i>output</i> maupun <i>outcome</i> sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan informasi kinerja yang dapat diandalkan, dengan target yang terukur serta informasi mengenai kinerja didukung dengan data yang andal yakni diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid, dihasilkan dari sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten), dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi serta <i>up to date</i>.</p> | <p>a. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa meningkatkan kualitas dan implementasi pencapaian kinerjanya, <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> sebagai target kinerja yang ditetapkan, kedepan akan menjadi informasi kinerja yang dapat diandalkan, dengan target yang terukur. Informasi kinerja mulai didukung dengan data yang andal yakni diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid, dihasilkan dari sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten), dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi serta <i>up to date</i>. Apalagi dalam RPD 2024-2026, Major Project yang menjadi tujuan pencapaian adalah pemberian tunjangan berbasis kinerja (tukin) hal ini memungkinkan target kinerja kian terukur dan dapat diandalkan.</p> | <p>a. Sudah</p>                 |

Sumber: LHE atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 diolah

Selain tindak lanjut dan rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai penguatan SAKIP pada lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Renja dimulai dari Ranwal hingga Ranhir Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, hal ini sesuai dengan tahapan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Dokumen Ranwal s/d Ranhir Renja terlampir)
2. Dengan adanya perubahan atau P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga menyelenggarakan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 yang berlangsung pada 2 Agustus 2022 bertempat di Hotel Harris Samarinda. Kegiatan ini sekaligus pengimputan T.C-29, T.C-31 dan T.C-33 oleh Biro-biro lingkup Setda Prov. Kaltim. (Laporan Kegiatan terlampir)
3. SAKIP Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan kompilasi dari 9 (sembilan) Biro di lingkup Sekretariat Daerah, memiliki kompleksitas yang lebih disbanding dengan Perangkat Daerah lainnya, apalagi setiap Biro memiliki *core business* yang berbeda. Diperlukan strategi dalam pengumpulan dokumen dan pengelolannya. Salah satu strateginya adalah dengan membentuk tim-tim kerja sesuai dengan Surat Keputusan sebagai berikut:
  - a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050.14/K.32/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
  - b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100/K.121/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

- c. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100/K.122/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  - d. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 045/K.202/2022 tentang Pembentukan Tim Asistensi/ *Coaching Clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
4. Guna menyikapi butir ke-3 di atas, Sekretariat Daerah telah pula melaksanakan Kegiatan Asistensi Penyusunan Peta Proses Bisnis agar dapat tersusun Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. (Laporan Kegiatan dan Peta Proses Bisnis Setda Prov. Kaltim terlampir)
5. Menyadari masih belum sempurnanya Dokumen Perencanaan Setda Prov. Kaltim, dan menyikapi masa akhir Renstra Setda Prov. Kaltim Tahun 2023 serta guna menyusun Renstra Setda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 agar lebih selaras dengan Dokumen RPJMD (RPD), Setda Prov. Kaltim menyelenggarakan Kegiatan Penguatan Perencanaan Setda Prov. Kaltim. Narasumber kegiatan ini adalah Sekretaris Daerah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim yang berlangsung di Hotel Gran Senyur Balikpapan pada Senin, 28 November 2022. (Laporan penyelenggaraan terlampir)

### **3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.3 berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Kinerja Tahun 2022**

| No. | Sasaran Strategis                                            | Indikator Kinerja                                                                   | Satuan     | Target Tahunan | Triwulan     | Target | Realisasi | %      |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|--------|-----------|--------|
| (1) | (2)                                                          | (3)                                                                                 | (4)        | (5)            | (6)          | (7)    | (8)       | (9)    |
| 1.  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah       | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)*                  | Skor       | 3,10           | Triwulan I   |        | -         | -      |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan II  | 3,095* | -         | -      |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan III |        | -         | -      |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan IV  |        | -         | -      |
|     |                                                              | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti                                           | Persentase | 92,50          | Triwulan I   | 60,00  | 60,00     | 100,00 |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan II  | 70,00  | 65,00     | 92,86  |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan III | 80,00  | 80,00     | 100,00 |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan IV  | 90,00  | 90,00     | 100,00 |
|     |                                                              | Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti                              | Persentase | 87,00          | Triwulan I   | 20,00  | 10,00     | 50,00  |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan II  | 40,00  | 30,00     | 75,00  |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan III | 60,00  | 50,00     | 83,33  |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan IV  | 87,00  | 100,00    | 114,94 |
|     |                                                              | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi                                | Persentase | 100,00         | Triwulan I   | 20,00  | 15,00     | 75,00  |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan II  | 40,00  | 35,00     | 87,50  |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan III | 50,00  | 46,00     | 92,00  |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan IV  | 100,00 | 102,00    | 102,00 |
| 2.  | Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan | Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti             | Persentase | 95,00          | Triwulan I   | 23,00  | 21,00     | 91,30  |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan II  | 48,00  | 50,00     | 104,17 |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan III | 71,00  | 70,00     | 98,60  |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan IV  | 95,00  | 96,77     | 101,86 |
|     |                                                              | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | Persentase | 75,00          | Triwulan I   |        | -         | -      |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan II  |        | -         | -      |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan III |        | -         | -      |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan IV  | 75,00  | 97,24     | 129,65 |
|     |                                                              | Indeks tata kelola pengadaan                                                        | Indeks     | 75,00 (baik)   | Triwulan I   |        | -         | -      |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan II  |        | -         | -      |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan III |        | -         | -      |
|     |                                                              |                                                                                     |            |                | Triwulan IV  | 75,00  | 64,30     | 85,73  |

| No. | Sasaran Strategis                                | Indikator Kinerja                                                                | Satuan     | Target Tahunan         | Triwulan     | Target | Realisasi | %      |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|--------|-----------|--------|
| (1) | (2)                                              | (3)                                                                              | (4)        | (5)                    | (6)          | (7)    | (8)       | (9)    |
| 3.  | Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B)              | Persentase | 79,00                  | Triwulan I   |        | -         | -      |
|     |                                                  |                                                                                  |            |                        | Triwulan II  | 79,00  | 89,19     | 112,90 |
|     |                                                  |                                                                                  |            |                        | Triwulan III |        | -         | -      |
|     |                                                  |                                                                                  |            |                        | Triwulan IV  |        | -         | -      |
|     |                                                  | Indeks Kelembagaan                                                               | Indeks     | 67,00<br>(peringkat 4) | Triwulan I   |        | -         |        |
|     |                                                  |                                                                                  |            |                        | Triwulan II  |        | -         |        |
|     |                                                  |                                                                                  |            |                        | Triwulan III |        | -         |        |
|     |                                                  |                                                                                  |            |                        | Triwulan IV  | 67,00  | 71,53     | 106,67 |
| 4.  | Meningkatnya kualitas layanan pemerintah         | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)     | Persentase | 70,00                  | Triwulan I   | -      | -         | -      |
|     |                                                  |                                                                                  |            |                        | Triwulan II  | -      | -         | -      |
|     |                                                  |                                                                                  |            |                        | Triwulan III | -      | -         | -      |
|     |                                                  |                                                                                  |            |                        | Triwulan IV  | 70,00  | 85,11     | 121,59 |
|     |                                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Indeks     | 77,50<br>(B/Baik)      | Triwulan I   |        | -         | -      |
|     |                                                  |                                                                                  |            |                        | Triwulan II  | 77,50  | 83,30     | 107,48 |
|     |                                                  |                                                                                  |            |                        | Triwulan III |        | -         | -      |
|     |                                                  |                                                                                  |            |                        | Triwulan IV  | 77,50  | 83,38     | 107,59 |
|     |                                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan              | Indeks     | 77,35                  | Triwulan I   | 77,35  | 85,39     | 110,39 |
|     |                                                  |                                                                                  |            |                        | Triwulan II  | 77,35  | 85,43     | 110,45 |
|     |                                                  |                                                                                  |            |                        | Triwulan III | 77,35  | 85,58     | 110,64 |
|     |                                                  |                                                                                  |            |                        | Triwulan IV  | 77,35  | 85,78     | 110,90 |

Sumber: data Biro-biro tahun 2022 diolah

\*) Kepmendagri No.118-8840 Tahun 2018 (peringkat 6) hasil EKPPD tahun 2018 terhadap LPPD tahun 2016  
Hasil EKPPD tahun 2019 terhadap LPPD tahun 2017 (3,102) dalam bentuk piagam

### 3.3 Analisis Capaian Kinerja

#### 3.3.1 Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

| No. | Indikator Kinerja                                                 | Satuan     | Target | Realisasi | % Capaian   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-------------|
| 1   | 2                                                                 | 3          | 4      | 5         | $6=5/4*100$ |
| 1.  | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Skor       | 3,10   | 3,0885*   | 99,62       |
| 2.  | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti                         | Persentase | 92,50  | 90,00     | 97,30       |
| 3.  | Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti            | Persentase | 87,00  | 100,00    | 114,94      |
| 4.  | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi              | Persentase | 100,00 | 102,00    | 102,00      |

Sumber: data Biro-biro tahun 2022 diolah

\*) Skor EKPPD angka sangat sementara

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan antara Realisasi Tahun 2021 dengan Tahun 2022**

| No. | Indikator Kinerja                                                 | Satuan     | Realisasi |         | % Peningkatan/<br>Penurunan<br>Tahun 2022 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|-------------------------------------------|
|     |                                                                   |            | 2021      | 2022    |                                           |
| 1   | 2                                                                 | 3          | 4         | 5       | $6=(5/4-1)*100$                           |
| 1.  | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Skor       | 3,0885*   | 3,0885* | 0                                         |
| 2.  | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti                         | Persentase | 85        | 90      | 5,88                                      |
| 3.  | Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti            | Persentase | 85,00     | 100,00  | 17,65                                     |
| 4.  | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi              | Persentase | 99,86     | 102,00  | 2,14                                      |

Sumber: data Biro-biro tahun 2022 diolah

\*) Skor EKPPD angka sangat sementara

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RENSTRA**

| No. | Indikator Kinerja                                                 | Satuan     | Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023) | Realisasi (Tahun 2022) | Tingkat Kemajuan |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1   | 2                                                                 | 3          | 4                                   | 5                      | 6=5/4*100        |
| 1.  | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Skor       | 3,15                                | 3,0885*                | 98,04            |
| 2.  | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti                         | Persentase | 95,00                               | 90,00                  | 94,74            |
| 3.  | Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti            | Persentase | 90,00                               | 100,00                 | 111,11           |
| 4.  | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi              | Persentase | 100,00                              | 102,00                 | 102,00           |

Sumber: data Biro-biro tahun 2022 diolah

\*) Skor EKPPD angka sangat sementara

d. Analisis penjabaran data capaian

**1) Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD):**

Merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/ Lembaga terkait dalam melakukan evaluasi terhadap:

- a) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdiri dari:
  - Capaian Kinerja Makro;
  - Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
  - Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
- b) Capaian Pelaksanaan Kinerja Tugas Pembantuan yang diterima Provinsi oleh Pemerintah Pusat;
- c) Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang terdiri dari:
  - Hasil penerapan SPM;
  - Kendala penerapan SPM;
  - Ketersediaan alokasi anggaran penerapan SPM.

**2) Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti:**

Capaian kerja sama pada tahun 2022 telah memenuhi target yaitu dengan capaian 90% kerja sama yang ditindak lanjuti. Beberapa usulan

kerja sama tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan beberapa hal antara lain:

- a) Tidak tersedianya lahan yang menjadi kebutuhan kerja sama;
- b) Tidak sepakatnya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten/Kota untuk melakukan kerja sama karena tidak sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
- c) Tidak lengkapnya permohonan kerja sama yang diusulkan.

**3) Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti:**

Capaian kinerja pada tahun 2022 telah mencapai target 100% dimana capaian ini diperoleh dari laporan semua bahan perumusan kebijakan di bidang Kesehatan, pendidikan dan sosial yang telah selesai dikoordinasikan, difasilitasi dan dimonitoring serta evaluasi yang dibagi total seluruh bahan kebijakan yang diinventarisir dijadikan dalam bentuk persentase. Hasil kinerja berupa Telaah pada pimpinan terkait Rekomendasi Kebijakan.

**4) Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi:**

- a) 8 Peraturan Daerah;
- b) 973 Keputusan Gubernur;
- c) 924 Produk Hukum yang dipublikasi;
- d) 352 Perda dan Perkada Kabupaten/Kota.

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

**1) Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD):**

Faktor pendukung:

- a) Tersedianya aplikasi SILPPD Kementerian Dalam Negeri guna melakukan Input Data Capaian Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b) Ketersediaan anggaran dalam melaksanakan asistensi data capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) SKPD terhadap penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Timur.

## **2) Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti:**

Dukungan dari berbagai pihak hingga bisa mencapai sesuai target diantaranya:

- a) TKKSD telah melaksanakan rapat teknis;
- b) Pemohon kerja sama/pemrakarsa dapat menjelaskan dengan baik terkait dengan maksud dan tujuan kerja sama yang diinginkan.

## **3) Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti:**

### a) Faktor pendukung

- Komitmen tinggi pemimpin daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajaran Perangkat Daerah dalam pencapaian sasaran bidang Kesejahteraan Rakyat yang tercemin dalam RPJMD;
- Kewenangan daerah, karakteristik, potensi daerah, kemampuan keuangan daerah (APBD), ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerjasama;
- Tersedianya peraturan-peraturan untuk mendukung tercapainya pencapaian sasaran bidang Kesejahteraan Rakyat.

### b) Faktor penghambat

- Keterbatasan kemampuan SDM dalam menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, monev pelaksanaan kebijakan yang tepat dan akurat Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota;
- Perencanaan pelaksanaan kegiatan yang belum mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah;
- Belum optimalnya peran Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat.

## **4) Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi:**

Salah satu faktor pendukung adalah usulan dari pemrakarsa/ Perangkat Daerah.

f. Permasalahan

**1) Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD):**

Skor EKPPD Tahun 2019 s.d Tahun 2021 belum dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dikarenakan Hasil EPPD terhadap LPPD 2019, 2020 dan 2021 masih menunggu hasil evaluasi dari Badan Hukum Independen dalam hal ini Tim Kemitraan Kemendagri.

**2) Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti:**

- a) Kurangnya sosialisasi Permendagri No.22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- b) Tindak lanjut dari kesepakatan Bersama berupa Perjanjian Kerja Sama tidak terlaksana dengan cepat;
- c) Laporan evaluasi pelaksanaan kerja sama per 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun tidak dilaporkan oleh perangkat daerah yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama.

**3) Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti:**

Dalam pelaksanaan program/kegiatan ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

- a) Terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan jadwal dalam RKT sehingga kegiatan tertumpuk di akhir tahun;
- b) Terdapat kegiatan yang konsep pertemuan masih belum mengacu pada tupoksi Biro, sehingga output kegiatan tidak optimal membantu pencapaian target kinerja pemerintah daerah dalam RPJMD;
- c) Belum optimalnya dalam penyiapan rumusan bahan kebijakan.

**4) Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi:**

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyusunan produk hukum;
- b) Konsep atau *draft* produk hukum yang diajukan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan;
- c) Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam penyusunan produk hukum daerah.

g. Solusi

**1) Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD):**

Melakukan koordinasi dalam bentuk Rapat Pra Evaluasi dengan Tim Evaluasi dalam hal ini adalah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bersama Tim Penyusun LPPD dan Tim Reviu (APIP).

**2) Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti:**

- a) Melakukan sosialisasi Permendagri No.22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- b) Mendorong setiap Perangkat Daerah yang memiliki ruang lingkup kerja sama agar segera menindaklanjuti Kesepakatan Bersama.
- c) Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melakukan Perjanjian Kerja Sama untuk membuat laporan per semester dan tahunan.

**3) Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti:**

- a) Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja per triwulan agar pelaksanaan kegiatan sesuai yang tersusun dalam RKT;
- b) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia guna mendukung pelaksanaan tugas Biro Kesejahteraan Rakyat.

**4) Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi:**

- a) Penambahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyusunan produk hukum daerah;
- b) Mengedukasi atau menginformasikan kepada Perangkat Daerah pengusul tata cara penyusunan produk hukum daerah.

h. Upaya

**1) Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD):**

- a) Melakukan Rapat Asistensi terhadap Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah;
- b) Melakukan Rapat Pra Evaluasi LPPD.

## 2) Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti:

- a) Melakukan rapat koordinasi untuk penyampaian/sosialisasi Permendagri No.22 Tahun 2020;
- b) Menyampaikan surat kepada Perangkat Daerah yang belum melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama.

## 3) Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti:

Salah satu upaya adalah mendorong inovasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan memberikan ruang bagi setiap ASN/Non-ASN untuk membuat inovasi terobosan di sub bagiannya masing-masing.

## 4) Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi:

Upaya yang dapat dilakukan adalah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting.

### 3.3.2 Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

| No. | Indikator Kinerja                                                                   | Satuan     | Target | Realisasi | % Capaian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| 1   | 2                                                                                   | 3          | 4      | 5         | 6=5/4*100 |
| 1.  | Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti             | Persentase | 95,00  | 96,77     | 101,86    |
| 2.  | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | Persentase | 75,00  | 97,24     | 129,65    |
| 3.  | Indeks tata kelola pengadaan                                                        | Indeks     | 75,00  | 64,30     | 85,73     |

Sumber: data Biro-biro tahun 2022 diolah

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan antara Realisasi Tahun 2021 dengan Tahun 2022**

| No. | Indikator Kinerja                                                                   | Satuan     | Realisasi |       | % Peningkatan/<br>Penurunan<br>Tahun 2021 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-------------------------------------------|
|     |                                                                                     |            | 2021      | 2022  |                                           |
| 1   | 2                                                                                   | 3          | 4         | 5     | 6=(5/4-1)*100                             |
| 1.  | Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti             | Persentase | 90,00     | 96,77 | 7,52                                      |
| 2.  | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | Persentase | 98,40     | 97,24 | -1,18                                     |
| 3.  | Indeks tata kelola pengadaan                                                        | Indeks     | 74,13     | 64,30 | -13,26                                    |

Sumber: data Biro-biro tahun 2022 diolah

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RENSTRA**

| No. | Indikator Kinerja                                                                   | Satuan     | Target Akhir<br>P-Renstra<br>(Tahun 2023) | Realisasi<br>(Tahun 2022) | Tingkat<br>Kemajuan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                   | 3          | 4                                         | 5                         | 6=5/4*100           |
| 1.  | Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti             | Persentase | 100,00                                    | 96,77                     | 96,77               |
| 2.  | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | Persentase | 80,00                                     | 97,24                     | 121,55              |
| 3.  | Indeks tata kelola pengadaan                                                        | Indeks     | 80,00                                     | 64,30                     | 80,37               |

Sumber: data Biro-biro tahun 2022 diolah

- d. Analisis penjabaran data capaian

**1) Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti:**

- Persentase Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yaitu **96,77%**.
- Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian yaitu **87,00%**.

| No | Sasaran Perjanjian Kinerja                                                        | Indikator                                                                                    | Target (%) | Realisasi (%) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1  | Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah Di Bidang Perekonomian | Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian | 95,00      | 96,77         |
| 2  | Tercapainya Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian                  | Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian                              | 83,00      | 87,00         |

## 2) Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama:

- Tabel 3.7 di atas dapat terlihat pada tahun 2022 memiliki target 75,00% dengan realisasi 97,24% sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 129,65%.
- Tabel 3.8 di atas dapat terlihat realisasi indikator capaian pada tahun anggaran 2021 adalah 98,40% dan terjadi penurunan pada tahun anggaran 2022 menjadi 97,24%. Dari perbandingan tersebut terjadi penurunan sebesar -1,18% karena dari 544 Program Prioritas terdapat 15 Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan.
- Tabel 3.9 di atas dapat terlihat target akhir RENSTRA pada tahun anggaran 2023 adalah 80,00% dan realisasi tahun 2022 sebesar 97,24% sehingga mengalami kenaikan sebesar 121,55%.

## 3) Indeks tata kelola pengadaan:

Kematangan organisasi pengadaan merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan bebas korupsi sebagaimana juga merupakan salah satu agenda dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Inpres No.7 Tahun 2015 dan Inpres No.10 Tahun 2016. Melalui indikator ini diharapkan akan memberikan gambaran hasil dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya pada pengadaan barang/jasa.

| No. | Sasaran Perjanjian Kinerja                                                                   | Indikator                                                                                 | Target             | Realisasi |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1.  | Terwujudnya UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan pengadaan                                    | Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)                               | Level 3 atau (9/9) | (8/9)     |
| 2.  | Tercapainya Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Kaltim | Persentase Kepuasan Masyarakat pada layanan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Kaltim | 83%                | 81,36%    |

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

### 1) Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti:

- Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Realisasi Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian}}{\text{Target Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian}} \times 100\%$$

- Persentase:  $\frac{30}{31} \times 100\% = 96,77\%$

Pada sub bagian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha:

Terdapat pekerjaan kajian akademis pendirian BUMD pengelola PI yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan mengingat batas waktu pelaksanaan tidak memadai sehingga pekerjaan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2023.

### RINCIAN REALISASI KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN:

| NO | TARGET                                                                                                                                                | JUMLAH | NO | REALISASI                                                                                                                                                         | JUMLAH |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1) | <b>Koordinasi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi</b>                                                                                                   | 3      | 1) | <b>Koordinasi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi</b>                                                                                                               | 3      |
| -  | High Level Meeting TPID Prov. Kaltim                                                                                                                  | -      | -  | High Level Meeting TPID Prov. Kaltim                                                                                                                              | -      |
| -  | Penyusunan Roadmap TPID 2022 - 2024                                                                                                                   | -      | -  | Penyusunan Roadmap TPID 2022 - 2024                                                                                                                               | -      |
| -  | Rapat Koordinasi untuk pengendalian inflasi                                                                                                           | -      | -  | Rapat Koordinasi untuk pengendalian inflasi                                                                                                                       | -      |
| 2) | <b>Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pupuk dan Pestisida</b>                                                                                         | 4      | 2) | <b>Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pupuk dan Pestisida</b>                                                                                                     | 4      |
| -  | Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Kalimantan Timur                                                                      | -      | -  | Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Kalimantan Timur                                                                                  | -      |
| -  | Koordinasi dalam Rangka Penetapan SK Alokasi Pupuk Bersubsidi Prov. Kalimantan Timur Tahun 2022                                                       | -      | -  | Koordinasi dalam Rangka Penetapan SK Alokasi Pupuk Bersubsidi Prov. Kalimantan Timur Tahun 2022                                                                   | -      |
| -  | Realokasi Pupuk Bersubsidi Prov. Kalimantan Timur Tahun 2022                                                                                          | -      | -  | Realokasi Pupuk Bersubsidi Prov. Kalimantan Timur Tahun 2022                                                                                                      | -      |
| -  | Koordinasi dalam Rangka Penetapan SK Alokasi Pupuk Bersubsidi Prov. Kalimantan Timur Tahun 2023                                                       | -      | -  | Koordinasi dalam Rangka Penetapan SK Alokasi Pupuk Bersubsidi Prov. Kalimantan Timur Tahun 2023                                                                   | -      |
| 3) | <b>Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi dan LPG</b>                                                                      | 3      | 3) | <b>Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi dan LPG</b>                                                                                  | 3      |
| -  | Koordinasi dalam Penetapan HET LPG bersubsidi tabung 3 kg                                                                                             | -      | -  | Koordinasi dalam Penetapan HET LPG bersubsidi tabung 3 kg                                                                                                         | -      |
| -  | Koordinasi dalam Pengusulan Kuota BBM bersubsidi JBT-JBKP 2023                                                                                        | -      | -  | Koordinasi dalam Pengusulan Kuota BBM bersubsidi JBT-JBKP 2023                                                                                                    | -      |
| -  | Koordinasi dalam Pengusulan Kuota LPG bersubsidi tabung 3 kg 2023                                                                                     | -      | -  | Koordinasi dalam Pengusulan Kuota LPG bersubsidi tabung 3 kg 2023                                                                                                 | -      |
| 4) | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi data bidang Usaha Kecil Menengah</b>                                                                                   | 1      | 4) | <b>Koordinasi Dalam Rangka Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>                                                                                     | 1      |
| -  | Koordinasi dan Sinkronisasi data bidang Usaha Kecil Menengah                                                                                          | -      | -  | Rapat Inventarisasi data UMKM dan membahas Program Pengembangan UMKM                                                                                              | -      |
| 5) | <b>Rapat Koordinasi Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro</b>                                                                                   | 1      | 5) | <b>Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)</b>                                                                                  | 1      |
| -  | Rapat Persiapan pelaksanaan Rakor Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro                                                                         | -      | -  | Rapat Teknis persiapan pelaksanaan Rakor P3DN Tahun 2022                                                                                                          | -      |
| -  | Rapat Finalisasi pelaksanaan Rakor Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro                                                                        | -      | -  | Rapat Finalisasi Pelaksanaan Rakor P3dn Tahun 2022                                                                                                                | -      |
| -  | Rapat Koordinasi Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro                                                                                          | -      | -  | Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Peraturan tentang Belanja Barang/Jasa pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur | -      |
| 6) | <b>Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha</b>                | 6      | 6) | <b>Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha</b>                            | 5      |
| -  | Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan BUMD Yang Baik di Lingkungan BUMD Provinsi Kaltim                                                | -      | -  | Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan BUMD Yang Baik di Lingkungan BUMD Provinsi Kaltim                                                            | -      |
| -  | Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pendapatan Asli Daerah melalui BUMD di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur                                         | -      | -  | Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pendapatan Asli Daerah melalui BUMD di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur                                                     | -      |
| -  | Evaluasi Triwulan IV Tahun Buku 2021 dan Triwulan I, II, III Tahun Buku 2022 BUMD Kaltim                                                              | -      | -  | Evaluasi Triwulan IV Tahun Buku 2021 dan Triwulan I, II, III Tahun Buku 2022 BUMD Kaltim                                                                          | -      |
| -  | Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pendapatan dari Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi | -      | -  | <b>Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pendapatan dari Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi</b>      | -      |
| -  | Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkungan BUMD Kaltim                                       | -      | -  | Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkungan BUMD Kaltim                                                   | -      |
| -  | Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Barang dan Jasa BUMD Kaltim                                                                        | -      | -  | Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Barang dan Jasa BUMD Kaltim                                                                                    | -      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 7)  | <b>Koordinasi Dalam Penentuan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum</b><br>- Rapat Pengusutan Tarif bersama PD Perpamsi<br>- Rapat Penetapan Tarif bersama Gubernur / Sekretaris Daerah<br>- Sosialisasi Surat Keputusan Gubernur terkait Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum<br>- Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Gubernur terkait Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum<br>- Sinkronisasi Pengusutan RKAP dalam Pengelolaan BUMD Air Minum se Kabupaten / Kota se Kaltim                                                                                                                                                                  | 1 | 7)  | <b>Koordinasi Dalam Penentuan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum</b><br>- Rapat Pengusutan Tarif bersama PD Perpamsi<br>- Rapat Penetapan Tarif bersama Gubernur / Sekretaris Daerah<br>- Sosialisasi Surat Keputusan Gubernur terkait Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum<br>- Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Gubernur terkait Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum<br>- Sinkronisasi Pengusutan RKAP dalam Pengelolaan BUMD Air Minum se Kabupaten / Kota se Kaltim                                                                                                                                                                  | 1 |
| 8)  | <b>Koordinasi Dalam Rangka Rencana Pengelolaan SPAM Regional</b><br>- Rapat Koordinasi Integrasi Pemipaan Jalur Air Minum Void ex Tambang Indominco<br>- Monitoring Action Plan Pembangunan Intake Sumber Air Baku ex tambang Indominco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 8)  | <b>Koordinasi Dalam Rangka Rencana Pengelolaan SPAM Regional</b><br>- Rapat Koordinasi Integrasi Pemipaan Jalur Air Minum Void ex Tambang Indominco<br>- Monitoring Action Plan Pembangunan Intake Sumber Air Baku ex tambang Indominco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
| 9)  | <b>Monitoring Kebijakan Pengelolaan Limbah dan Sanitasi</b><br>- Monev Pelaksanaan Implementasi Pasca Program PPSP Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 9)  | <b>Monitoring Kebijakan Pengelolaan Limbah dan Sanitasi</b><br>- Monev Pelaksanaan Implementasi Pasca Program PPSP Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 |
| 10) | <b>Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BLUD</b><br>- Sosialisasi pembinaan dan Pengelolaan BLUD<br>- Sosialisasi dan Pembinaan Pelaksanaan BLUD bidang pendidikan (SMK)<br>- evaluasi pelaksanaan pasca dan pra BLUD<br>- Pelaksanaan rapat koordinasi PPK BLUD<br>- Sosialisasi dan pembinaan di Kab/kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 10) | <b>Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BLUD</b><br>- Sosialisasi dan Pembinaan Pelaksanaan BLUD bidang kesehatan<br>- Sosialisasi dan Pembinaan Pelaksanaan BLUD bidang pendidikan (SMK)<br>- evaluasi pelaksanaan pasca dan pra BLUD<br>- Pelaksanaan rapat koordinasi PPK BLUD<br>- Sosialisasi dan pembinaan di Kab/kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| 11) | <b>Pembentukan Tim Penilai Penerapan PPK BLUD Prov Kaltim</b><br>- SK Gubernur Kaltim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 11) | <b>Pembentukan Tim Penilai Penerapan PPK BLUD Prov Kaltim</b><br>- SK Gub Kaltim pembentukan tim penilai penerapan pengelolaan BLUD No 500/K.147/2022 tanggal 1 Maret 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |
| 12) | <b>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Pertanian</b><br>- Focus Group Discussion (FGD) Bidang Ekonomi Dalam Rangka Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Kalimantan Timur<br>- Fasilitasi Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 526/K.568/2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tata Kelola Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur<br>- Fasilitasi Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 524/K.421/2022 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Kalimantan Timur | 1 | 12) | <b>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Pertanian</b><br>- Focus Group Discussion (FGD) Bidang Ekonomi Dalam Rangka Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Kalimantan Timur<br>- Fasilitasi Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 526/K.568/2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tata Kelola Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur<br>- Fasilitasi Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 524/K.421/2022 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Kalimantan Timur | 1 |
| 13) | <b>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Kehutanan</b><br>- Focus Group Discussion (FGD) Pengusutan Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Implementasi Program FCPF-CF di Provinsi Kalimantan Timur<br>- Focus Group Discussion (FGD) Tagging Sub Kegiatan di Kabupaten/Kota Tahun 2023 Dalam Rangka Persiapan Pengaluran Manfaat Program FCPF-CF<br>- Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan <i>Work Plan Forest Carbon Partnership Facility - Carbon Fund</i> (FCPF-CF)                                                                                                                                                                                 | 1 | 13) | <b>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Kehutanan</b><br>- Focus Group Discussion (FGD) Pengusutan Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Implementasi Program FCPF-CF di Provinsi Kalimantan Timur<br>- Focus Group Discussion (FGD) Tagging Sub Kegiatan di Kabupaten/Kota Tahun 2023 Dalam Rangka Persiapan Pengaluran Manfaat Program FCPF-CF<br>- Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan <i>Work Plan Forest Carbon Partnership Facility - Carbon Fund</i> (FCPF-CF)                                                                                                                                                                                 | 1 |

Faktor pendukung capaian kinerja pada Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian adalah:

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
BIRO PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
SEMESTER II TAHUN 2022**

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>NAMA LAYANAN :</b>                       |                |
| <b>RESPONDEN</b>                            |                |
| JUMLAH                                      | : 21 Orang     |
| JENIS KELAMIN                               | : L : 12 P : 9 |
| PENDIDIKAN                                  | : SD :-        |
|                                             | SMP :-         |
|                                             | SMA :-         |
|                                             | DIII :-        |
|                                             | S1 : 8         |
|                                             | S2 : 2         |
|                                             | S3 :-          |
| Tempat ket.peddkn                           | : 11           |
| PERIODE SURVEI : 01-07-2022 s/d. 31-10-2022 |                |

|           |
|-----------|
| NILAI SKM |
| 87        |
| "BAIK"    |

**PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN  
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

| NO.<br>RESP        | NILAI UNSUR PELAYANAN |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|--------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                    | U1                    | U2    | U3    | U4    | U5    | U6    | U7    | U8    | U9    |  |
|                    | 2                     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |  |
| 1                  | 3                     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |  |
| 2                  | 3                     | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     |  |
| 3                  | 4                     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     |  |
| 4                  | 3                     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |  |
| 5                  | 3                     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     |  |
| 6                  | 3                     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     | 3     | 3     |  |
| 7                  | 4                     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |  |
| 8                  | 4                     | 4     | 3     | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     |  |
| 9                  | 3                     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     |  |
| 10                 | 3                     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     |  |
| 11                 | 4                     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |  |
| 12                 | 3                     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 3     | 3     | 3     |  |
| 13                 | 4                     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 3     | 3     | 3     |  |
| 14                 | 3                     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |  |
| 15                 | 4                     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |  |
| 16                 | 4                     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |  |
| 17                 | 4                     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     |  |
| 18                 | 4                     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |  |
| 19                 | 4                     | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 3     |  |
| 20                 | 4                     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |  |
| 21                 | 4                     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     | 3     |  |
| 22                 |                       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 23                 |                       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 24                 |                       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 25                 |                       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| ΣNilai /Unsur      | 75                    | 73    | 72    | 72    | 78    | 79    | 70    | 72    | 71    |  |
| NRR / Unsur        | 3.571                 | 3.476 | 3.429 | 3.429 | 3.714 | 3.762 | 3.333 | 3.429 | 3.381 |  |
| NRR tertbg/ unsur  | 0.396                 | 0.386 | 0.381 | 0.381 | 0.412 | 0.418 | 0.370 | 0.381 | 0.375 |  |
| IKM Unit pelayanan |                       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 87.479             |                       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |

Keterangan :  
- U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan  
- NRR = Nilai rata-rata  
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat  
- \*) = Jumlah NRR IKM tertimbang  
- \*\*) = Jumlah NRR Tertimbang x 25

| No. | UNSUR PELAYANAN           | NILAI RATA-RATA |
|-----|---------------------------|-----------------|
| U1  | Persyaratan               | 3.571           |
| U2  | Prosedur                  | 3.476           |
| U3  | Waktu pelayanan           | 3.429           |
| U4  | Kesesuaian Produk Layanan | 3.429           |
| U5  | Kompetensi pelaksana      | 3.714           |
| U6  | Perilaku pelaksana        | 3.762           |
| U7  | Sarana Prasarana          | 3.333           |
| U8  | Maklumat Layanan          | 3.429           |
| U9  | Penanganan Pengaduan      | 3.381           |

**IKM UNIT PELAYANAN : 87.48**

Mutu Pelayanan :  
A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00  
B (Baik) : 76,61- 88,3  
C (Kurang Baik) : 76,6- 65  
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

Secara umum kualitas pelayanan publik Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim dipersepsikan baik oleh publik, hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh berkisar 76,61 - 88,30 dan Nilai SKM yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan dengan IKM adalah **87,48%**.

## 2) Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama:

a) Faktor pendukung:

- Koordinasi, evaluasi dan komunikasi;
- Sinergitas antar SKPD;

- Pengembangan Aplikasi Pendukung;
- Kerjasama tim;
- Monitoring dan evaluasi lapangan.

b) Faktor penghambat:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);
- Mutasi Pejabat;
- Belum tersedianya Aplikasi/Sistem Informasi Sumber Dana APBN;
- Jumlah laporan pada Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD hanya 6 (enam) laporan, sehingga yang terrealisasi hanya 6 (enam) laporan saja.

### 3) Indeks tata kelola pengadaan:

- a) Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) terkait Indikator Kinerja dengan realisasi **88,89%**:

Pemantauan Kematangan Penilaian Lapangan Kerjasama Antar UKPBJ Agen Pengadaan Pusat Informasi Unduh

| <div>  <div> <b>Hasil Pengisian Penilaian Mandiri</b><br/> <b>Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ</b><br/> <b>PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b> </div> </div> |                         |                                                                                                                                                                                     |                           |                             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Domain                                                                                                                                                                                                                                       | Variabel                | Key Drivers                                                                                                                                                                         | Kriteria Pusat Keunggulan | Tingkat Kematangan Saat Ini | File Bukti Dukung  |
| Proses                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1 Manajemen Pengadaan | Proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Memastikan keamanan & keberlangsungan layanan pengadaan secara elektronik  | 3                         | 3                           | Unduh Bukti Dukung |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 1.2 Manajemen Penyedia  | Tersedianya program pembinaan kepada penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak                                                                 | 3                         | 2                           | Unduh Bukti Dukung |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 1.3 Manajemen Kinerja   | Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan                                                             | 3                         | 3                           | Unduh Bukti Dukung |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 1.4 Manajemen Risiko    | Sudah diterapkan kode etik untuk para pengelola UKPBJ. Siklus manajemen risiko diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak                                  | 3                         | 3                           | Unduh Bukti Dukung |
| Kelembagaan                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1 Pengorganisasian    | Organisasi UKPBJ untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan                                                                                                                                | 3                         | 3                           | Unduh Bukti Dukung |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 2.2 Tugas dan Fungsi    | Pendampingan perencanaan pengadaan. Proses pemilihan, pendampingan pelaksanaan kontrak. Pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ. Pembinaan SDM PBJ. Layanan pengadaan secara elektronik | 3                         | 3                           | Unduh Bukti Dukung |
| SDM                                                                                                                                                                                                                                          | 3.1 Perencanaan SDM     | Sudah dilakukan Anjab dan ABK berbasis data paket pengadaan tahun lalu serta perluasan peran UKPBJ untuk seluruh personil UKPBJ                                                     | 3                         | 3                           | Unduh Bukti Dukung |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 3.2 Pengembangan SDM    | Program pelatihan dan mentoring kompetensi pengadaan berbasis: Standar Kompetensi Jabatan PBJP, Kompetensi Personil UKPBJ, Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ                 | 3                         | 3                           | Unduh Bukti Dukung |
| Sistem Informasi                                                                                                                                                                                                                             | 4.1 Sistem Informasi    | Penggunaan sistem yang mengintegrasikan mata rantai proses PBJ di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak                                                   | 3                         | 3                           | Unduh Bukti Dukung |



- b) Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pengadaan Barang/Jasa dengan realisasi **81,36%**:

**INDEK KEPUASAN MASYARAKAT  
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2022 S.D. NOVEMBER 2022**

| NILAI SKM     | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA               |
|---------------|----------------------------------------------|
| <b>81,358</b> | RESPONDEN                                    |
|               | JUMLAH : 66 Orang                            |
| <b>“BAIK”</b> | PEKERJAAN UTAMA : KPA : 2 Orang              |
|               | PPK : 9 Orang                                |
|               | PP : 12 Orang                                |
|               | POKJA : 8 Orang                              |
|               | Penyedia : 17 Orang                          |
|               | Op.SirUP : 17 Orang                          |
|               | Auditor : 1 Orang                            |
|               | Periode Survei (2-10-2022) s.d. (31-10-2022) |

- Profil Responden

Pengumpulan data ini melibatkan 66 responden (pelaku pengadaan barang dan jasa)

Profil responden dijabarkan sebagai berikut :

**PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN  
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

UNIT PELAYANAN : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

ALAMAT : J.L. GAJAH MADA NO 2 SAMARINDA

| NO.<br>RESP | NILAI UNSUR PELAYANAN |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|             | U1                    | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
| 1           | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 2           | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 3           | 3                     | 3  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |
| 4           | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 5           | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 6           | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 7           | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 8           | 3                     | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  |
| 9           | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  |
| 10          | 2                     | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 11          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 12          | 4                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 3  | 3  | 4  |
| 13          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 14          | 4                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  |
| 15          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 16          | 3                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 17          | 3                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  |
| 18          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  |
| 19          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  |
| 20          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |
| 21          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 22          | 3                     | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  |
| 23          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 24          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  |
| 25          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 26          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 27          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |
| 28          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  |
| 29          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 30          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  |
| 31          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  |
| 32          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |
| 33          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |
| 34          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 35          | 3                     | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  |
| 36          | 3                     | 3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 37          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 38          | 4                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  |
| 39          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 40          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  |
| 41          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  |
| 42          | 3                     | 2  | 2  | 3  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  |
| 43          | 3                     | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  | 2  | 3  | 4  |
| 44          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 3  | 3  |
| 45          | 3                     | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 46          | 3                     | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  |
| 47          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 48          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  |
| 49          | 3                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 50          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  |
| 51          | 2                     | 3  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 52          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 53          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 54          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  |
| 55          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  |
| 56          | 4                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  |
| 57          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 58          | 3                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  |
| 59          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 60          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 61          | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 62          | 3                     | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  |
| 63          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 64          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 65          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 66          | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |

|                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                         |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Nilai<br>A/unsur            | 214   | 211   | 210   | 218   | 209   | 215   | 222   | 210   | 226   |                         |
| NRR /<br>Unsur              | 3.242 | 3.197 | 3.182 | 3.303 | 3.167 | 3.258 | 3.364 | 3.182 | 3.424 |                         |
| NRR<br>tertimbang/<br>unsur | 0.360 | 0.355 | 0.353 | 0.367 | 0.352 | 0.362 | 0.373 | 0.353 | 0.380 | <sup>a)</sup>           |
|                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.254                   |
| IKM Unit pelayanan          |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <sup>a)</sup><br>81.358 |

|                     |                                                                        |            |                                                                                                 |                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Keterangan :</b> |                                                                        | <b>No.</b> | <b>UNSUR PELAYANAN</b>                                                                          | <b>NILAI RATA-RATA</b> |
| - U1 s.d. U9        | = Unsur-Unsur pelayanan                                                | U1         | Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Dengan Jenis Pelayanannya                                      | 3.242                  |
| - NRR               | = Nilai rata-rata                                                      | U2         | Kemudahan Prosedur Pelayanan                                                                    | 3.197                  |
| - IKM               | = Indeks Kepuasan Masyarakat                                           | U3         | Kecepatan Waktu Dalam Memberikan Pelayanan                                                      | 3.182                  |
| - <sup>a)</sup>     | = Jumlah NRR IKM tertimbang                                            | U4         | Kemudahan dalam Penggunaan Aplikasi                                                             | 3.303                  |
| - <sup>a)</sup>     | = Jumlah NRR Tertimbang x 25                                           | U5         | Kesesuaian Produk Pelayanan Antara Yang Tercantum Dalam Standar Pelayanan Dengan Yang Diberikan | 3.167                  |
| NRR Per Unsur       | = Jumlah nilai per unsur dibagi<br>Jumlah kuesioner yang terdistribusi | U6         | Kompetensi / Kemampuan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan                                       | 3.258                  |
| NRR tertimbang      | = NRR per unsur x 0,111                                                | U7         | Perilaku Terkait Kesopanan Dan Keramahan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan                     | 3.364                  |
|                     |                                                                        | U8         | Kualitas Sarana Dan Prasarana                                                                   | 3.182                  |
|                     |                                                                        | U9         | Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan Pengguna Layanan                                        | 3.424                  |

|                                        |        |                                                                  |
|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| <b>IKM UNIT PELAYANAN :</b>            | 81.358 | <b>Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kaltim,</b> |
| <b>Mutu Pelayanan :</b>                |        | <b>Buyung Dodi Gunawan, S.T., M.M</b>                            |
| <b>A (Sangat Baik) :</b> 88,31 - 100   |        | <b>Pembina IV/a</b>                                              |
| <b>B (Baik) :</b> 76,61 - 88,30        |        | <b>NIP. 19720528 200502 1 001</b>                                |
| <b>C (Cukup) :</b> 65,00 - 76,60       |        |                                                                  |
| <b>D (Kurang Baik) :</b> 25,00 - 64,99 |        |                                                                  |

#### f. Permasalahan

##### 1) Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti:

- Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar pihak terkait dalam rangka penyusunan kebijakan bidang perekonomian;
- Belum tersusunnya data yang terintegrasi terkait dengan sektor-sektor di bidang perekonomian;
- Kurang optimalnya upaya pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan bidang perekonomian.

##### 2) Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama:

Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelaporan.

##### 3) Indeks tata kelola pengadaan:

Terdapat beberapa permasalahan yang menghambat dalam pencapaian indikator kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kaltim:

- a) Terdapat 1 (satu) variabel yang belum terpenuhi yaitu Manajemen Penyedia dikarenakan bukti dukung yang disampaikan belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LKPP;
- b) Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- c) Sering terjadinya keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pelayanan;
- d) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah belum semuanya dilakukan secara elektronik sehingga kesulitan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

g. Solusi

**1) Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti:**

Melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi dalam rangka monitoring, evaluasi dan inventarisasi data secara intens antar pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta *stakeholder* terkait guna optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi.

**2) Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama:**

- a) Meningkatkan kualitas Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- b) Meningkatkan kualitas Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah;
- c) Meningkatkan kualitas Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

**3) Indeks tata kelola pengadaan:**

- a) Komitmen Pimpinan untuk memenuhi sumber daya manusia pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- b) Pemberian pendampingan dalam penyusunan RUP dan penyusunan dokumen persiapan pengadaan.

h. Upaya

**1) Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti:**

- a) Akan dilaksanakan kegiatan terkait dengan program/kegiatan di bidang perekonomian;
- b) Penyediaan data dan informasi tentang sector-sektor bidang perekonomian melalui pembuatan website;
- c) Penyusunan Peraturan Daerah terkait BUMD.

**2) Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama:**

- a) Telah diadakan Sistem Informasi terkait Realisasi Fisik dan Keuangan;
- b) Telah diadakan Sistem Informasi terkait Klasifikasi Pekerjaan Utama;
- c) Telah diadakan Sistem Informasi terkait Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota;
- d) Telah dilakukan koordinasi dengan antara SKPD dan Kabupaten/Kota;
- e) Telah dilakukan monitoring terkait Pembangunan Daerah;
- f) Telah dilakukan Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan.

**3) Indeks tata Kelola pengadaan:**

- a) Surat Edaran terkait kepada Perangkat Daerah untuk melakukan pencatatan pelaksanaan pengadaan melalui LPSE;
- b) Meningkatkan koordinasi dengan LKPP terkait penilaian dan pemenuhan data dukung kematangan UKPBJ.

**3.3.3 Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik**

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

| No. | Indikator Kinerja                                                   | Satuan     | Target | Realisasi | % Capaian   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-------------|
| 1   | 2                                                                   | 3          | 4      | 5         | $6=5/4*100$ |
| 1.  | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B) | Persentase | 79,00  | 89,19     | 112,90      |
| 2.  | Indeks Kelembagaan                                                  | Indeks     | 67,00  | 71,53     | 106,76      |

Sumber: data Biro-biro tahun 2022 diolah

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan antara Realisasi Tahun 2021 dengan Tahun 2022**

| No. | Indikator Kinerja                                                   | Satuan     | Realisasi              |                        | % Peningkatan/<br>Penurunan<br>Tahun 2021 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|     |                                                                     |            | 2021                   | 2022                   |                                           |
| 1   | 2                                                                   | 3          | 4                      | 5                      | $6=(5/4-1)*100$                           |
| 1.  | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B) | Persentase | 75,68                  | 89,19                  | 17,85                                     |
| 2.  | Indeks Kelembagaan                                                  | Indeks     | 68,14<br>(peringkat 4) | 71,53<br>(peringkat 4) | 4,97                                      |

Sumber: data Biro-biro tahun 2022 diolah

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RENSTRA**

| No. | Indikator Kinerja                                                   | Satuan     | Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023) | Realisasi (Tahun 2022) | Tingkat Kemajuan |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1   | 2                                                                   | 3          | 4                                   | 5                      | $6=5/4*100$      |
| 1.  | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B) | Persentase | 81,00                               | 89,19                  | 110,11           |
| 2.  | Indeks Kelembagaan                                                  | Indeks     | 69,00<br>(peringkat 4)              | 71,53<br>(peringkat 4) | 103,67           |

Sumber: data Biro-biro tahun 2022 diolah

d. Analisis penjabaran data capaian

**1) Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal B:**

**Indikator Kinerja** “Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B)” dengan target 79,00% dengan realisasi capaian 89,19% dengan persentase capaian 98,28%. Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal B (Baik) pada tahun 2022 adalah sebanyak 33 Perangkat Daerah dari 37 Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.13**  
**Daftar Nilai SAKIP Perangkat Daerah Pemprov. Kaltim Tahun 2022**

| NO | PERANGKAT DAERAH                                                                      | EVALUASI TAHUN 2021 |                           | EVALUASI TAHUN 2022 |                           | Kenaikan / Penurunan<br>Th. 2022 Terhadap Th.<br>2021 |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                                       | HASIL<br>EVALUASI   | KATEGORI/<br>INTERPRETASI | HASIL<br>EVALUASI   | KATEGORI/<br>INTERPRETASI | Nilai                                                 | Persen |
|    |                                                                                       |                     |                           |                     |                           |                                                       |        |
| 1  | Inspektorat                                                                           | 79,15               | BB/Sangat Baik            | 79,21               | BB/Sangat Baik            | 0,06                                                  | 0,08%  |
| 2  | Badan Kepegawaian Daerah                                                              | 76,09               | BB/Sangat Baik            | 79,07               | BB/Sangat Baik            | 2,98                                                  | 3,92%  |
| 3  | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                                                  | 76,17               | BB/Sangat Baik            | 77,06               | BB/Sangat Baik            | 0,89                                                  | 1,17%  |
| 4  | RSJD Atma Husada Mahakam                                                              | 75,62               | BB/Sangat Baik            | 76,43               | BB/Sangat Baik            | 0,81                                                  | 1,07%  |
| 5  | RSUD A.W. Sjachranie Samarinda                                                        | 74,10               | BB/Sangat Baik            | 76,38               | BB/Sangat Baik            | 2,28                                                  | 3,08%  |
| 6  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                       | 75,60               | BB/Sangat Baik            | 76,31               | BB/Sangat Baik            | 0,71                                                  | 0,94%  |
| 7  | Dinas Perkebunan                                                                      | 72,43               | BB/Sangat Baik            | 76,12               | BB/Sangat Baik            | 3,69                                                  | 5,09%  |
| 8  | Badan Pendapatan Daerah                                                               | 72,95               | BB/Sangat Baik            | 75,71               | BB/Sangat Baik            | 2,76                                                  | 3,78%  |
| 9  | RSUD Dr. Kanujoso Djati W. Balikpapan                                                 | 75,85               | BB/Sangat Baik            | 75,39               | BB/Sangat Baik            | -0,46                                                 | -0,61% |
| 10 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                  | 78,19               | BB/Sangat Baik            | 74,56               | BB/Sangat Baik            | -3,63                                                 | -4,64% |
| 11 | Dinas Sosial                                                                          | 70,99               | BB/Sangat Baik            | 73,15               | BB/Sangat Baik            | 2,16                                                  | 3,04%  |
| 12 | Dinas Perindustrian, Perdagangan,<br>Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah<br>(UKM); | 70,06               | BB/Sangat Baik            | 72,98               | BB/Sangat Baik            | 2,92                                                  | 4,17%  |
| 13 | Badan Penghubung                                                                      | 71,07               | BB/Sangat Baik            | 72,43               | BB/Sangat Baik            | 1,36                                                  | 1,91%  |
| 14 | Dinas Kehutanan                                                                       | 70,58               | BB/Sangat Baik            | 71,92               | BB/Sangat Baik            | 1,34                                                  | 1,90%  |
| 15 | Dinas Kesehatan                                                                       | 70,33               | BB/Sangat Baik            | 70,73               | BB/Sangat Baik            | 0,40                                                  | 0,57%  |
| 16 | Sekretariat DPRD                                                                      | 70,32               | BB/Sangat Baik            | 70,15               | BB/Sangat Baik            | -0,17                                                 | -0,24% |
| 17 | Dinas Perhubungan                                                                     | 71,28               | BB/Sangat Baik            | 70,11               | BB/Sangat Baik            | -1,17                                                 | -1,64% |
| 18 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                                  | 70,09               | BB/Sangat Baik            | 70,03               | BB/Sangat Baik            | -0,06                                                 | -0,09% |
| 19 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan<br>Pemerintahan Desa                                | 63,82               | B/Baik                    | 68,47               | B/Baik                    | 4,65                                                  | 7,29%  |
| 20 | Dinas Pariwisata                                                                      | 64,95               | B/Baik                    | 68,26               | B/Baik                    | 3,31                                                  | 5,10%  |
| 21 | Sekretariat Daerah                                                                    | 59,14               | CC/Cukup                  | 67,93               | B/Baik                    | 8,79                                                  | 14,86% |
| 22 | Dinas Lingkungan Hidup                                                                | 65,93               | B/Baik                    | 67,47               | B/Baik                    | 1,54                                                  | 2,33%  |

| NO                            | PERANGKAT DAERAH                                                  | EVALUASI TAHUN 2021 |                           | EVALUASI TAHUN 2022 |                           | Kenaikan / Penurunan<br>Th. 2022 Terhadap Th.<br>2021 |        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
|                               |                                                                   | HASIL<br>EVALUASI   | KATEGORI/<br>INTERPRETASI | HASIL<br>EVALUASI   | KATEGORI/<br>INTERPRETASI | Nilai                                                 | Persen |
|                               |                                                                   |                     |                           |                     |                           |                                                       |        |
| 23                            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                 | 64,07               | B/Baik                    | 66,97               | B/Baik                    | 2,90                                                  | 4,53%  |
| 24                            | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 63,84               | B/Baik                    | 66,91               | B/Baik                    | 3,07                                                  | 4,81%  |
| 25                            | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah                           | 66,04               | B/Baik                    | 66,39               | B/Baik                    | 0,35                                                  | 0,53%  |
| 26                            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                               | 62,78               | B/Baik                    | 65,49               | B/Baik                    | 2,71                                                  | 4,32%  |
| 27                            | Dinas Kelautan dan Perikanan                                      | 62,11               | B/Baik                    | 65,30               | B/Baik                    | 3,19                                                  | 5,14%  |
| 28                            | Dinas Komunikasi dan Informatika                                  | 57,29               | CC/Cukup                  | 64,18               | B/Baik                    | 6,89                                                  | 12,03% |
| 29                            | Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura                    | 62,57               | B/Baik                    | 64,10               | B/Baik                    | 1,53                                                  | 2,44%  |
| 30                            | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            | 51,09               | CC/Cukup                  | 62,18               | B/Baik                    | 11,09                                                 | 21,70% |
| 31                            | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah                          | 59,26               | CC/Cukup                  | 61,26               | B/Baik                    | 2,00                                                  | 3,37%  |
| 32                            | Dinas Pemuda dan Olahraga                                         | 61,84               | B/Baik                    | 60,13               | B/Baik                    | -1,71                                                 | -2,77% |
| 33                            | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat        | 57,91               | CC/Cukup                  | 60,05               | B/Baik                    | 2,14                                                  | 3,69%  |
| 34                            | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                        | 51,11               | CC/Cukup                  | 59,45               | CC/Cukup                  | 8,34                                                  | 16,31% |
| 35                            | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia                            | 57,40               | CC/Cukup                  | 58,20               | CC/Cukup                  | 0,80                                                  | 1,39%  |
| 36                            | Satuan Polisi Pamong Praja                                        | 57,12               | CC/Cukup                  | 57,59               | CC/Cukup                  | 0,47                                                  | 0,82%  |
| 37                            | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                               | 50,35               | CC/Cukup                  | 55,54               | CC/Cukup                  | 5,19                                                  | 10,31% |
| Jumlah Rara-rata per komponen |                                                                   | 66,47               | B/Baik                    | 68,75               | B/Baik                    | 2,27                                                  | 3,42%  |

Sumber: data Biro Organisasi tahun 2022

**Tabel 3.14**  
**Pemetaan Jumlah Perangkat Daerah per Predikat Kinerja Hasil Evaluasi Tahun 2022**

| PREDIKAT         | TAHUN     |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                  | 2020      | 2021      | 2022      |
| BB/Sangat Baik   | 15        | 18        | 18        |
| B/Baik           | 14        | 10        | 15        |
| CC/Cukup         | 8         | 9         | 4         |
| C/Kurang         | 0         | 0         | 0         |
| D/Sangat Kurang  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Jumlah PD</b> | <b>37</b> | <b>37</b> | <b>37</b> |

Sumber: data Biro Organisasi tahun 2022

## 2) Indeks Kelembagaan:

**Indikator Kinerja** “Indeks Kelembagaan” dengan target Indeks 67,00 (Peringkat 4) dengan Realisasi Capaian Indeks 71,53 (Peringkat 4)

dengan Persentase Capaian 106,76% dengan rincian data seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 3.15**  
**Hasil Penilaian Indeks Kelembagaan Pemprov. Kaltim Tahun 2022**

| No.                   | PERANGKAT DAERAH                                                     |                                     |                                   |                               |                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                       |                                                                      | JUMLAH<br>NILAI<br>DIMENSI STRUKTUR | JUMLAH<br>NILAI<br>DIMENSI PROSES | SKOR<br>PENILAIAN<br>(INDEKS) | PERINGKAT<br>KOMPOSIT |
| 1                     | Dinas Perkebunan                                                     | 47,338                              | 45,333                            | 92,672                        | PERINGKAT 5           |
| 2                     | Dinas Kelautan dan Perikanan                                         | 36,114                              | 45,875                            | 81,989                        | PERINGKAT 5           |
| 3                     | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                                 | 37,320                              | 43,202                            | 80,522                        | PERINGKAT 5           |
| 4                     | RSUD Kanujoso Djiwibowo                                              | 35,741                              | 44,536                            | 80,277                        | PERINGKAT 5           |
| 5                     | Dinas Sosial                                                         | 33,772                              | 46,202                            | 79,975                        | PERINGKAT 4           |
| 6                     | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                 | 34,279                              | 44,125                            | 78,404                        | PERINGKAT 4           |
| 7                     | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 34,997                              | 42,637                            | 77,634                        | PERINGKAT 4           |
| 8                     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                      | 33,653                              | 43,592                            | 77,245                        | PERINGKAT 4           |
| 9                     | Dinas Pemuda dan Olahraga                                            | 38,043                              | 38,938                            | 76,980                        | PERINGKAT 4           |
| 10                    | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat           | 37,971                              | 38,938                            | 76,908                        | PERINGKAT 4           |
| 11                    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa                  | 33,479                              | 40,952                            | 74,432                        | PERINGKAT 4           |
| 12                    | Dinas Kehutanan                                                      | 35,090                              | 39,196                            | 74,287                        | PERINGKAT 4           |
| 13                    | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah                             | 28,277                              | 45,494                            | 73,771                        | PERINGKAT 4           |
| 14                    | Satuan Polisi Pamong Praja                                           | 27,306                              | 45,726                            | 73,032                        | PERINGKAT 4           |
| 15                    | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                     | 28,019                              | 43,821                            | 71,841                        | PERINGKAT 4           |
| 16                    | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia                               | 28,525                              | 43,036                            | 71,561                        | PERINGKAT 4           |
| 17                    | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                  | 35,068                              | 36,458                            | 71,526                        | PERINGKAT 4           |
| 18                    | Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura                       | 33,477                              | 37,920                            | 71,397                        | PERINGKAT 4           |
| 19                    | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak    | 33,540                              | 37,188                            | 70,727                        | PERINGKAT 4           |
| 20                    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)        | 29,469                              | 41,012                            | 70,481                        | PERINGKAT 4           |
| 21                    | Sekretariat Daerah                                                   | 32,647                              | 37,748                            | 70,395                        | PERINGKAT 4           |
| 22                    | Dinas Perhubungan                                                    | 33,605                              | 36,458                            | 70,063                        | PERINGKAT 4           |
| 23                    | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                    | 32,660                              | 37,232                            | 69,892                        | PERINGKAT 4           |
| 24                    | Badan Pendapatan Daerah                                              | 33,605                              | 36,250                            | 69,855                        | PERINGKAT 4           |
| 25                    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                  | 29,732                              | 39,875                            | 69,607                        | PERINGKAT 4           |
| 26                    | RSUD A. Wahab Sjahranie                                              | 28,503                              | 41,000                            | 69,503                        | PERINGKAT 4           |
| 27                    | Badan Penghubung                                                     | 30,565                              | 37,065                            | 67,631                        | PERINGKAT 4           |
| 28                    | Dinas Kesehatan                                                      | 30,576                              | 36,414                            | 66,990                        | PERINGKAT 4           |
| 29                    | Sekretariat DPRD                                                     | 28,742                              | 38,065                            | 66,807                        | PERINGKAT 4           |
| 30                    | Dinas Lingkungan Hidup                                               | 29,479                              | 37,188                            | 66,666                        | PERINGKAT 4           |
| 31                    | UOBK RUMAH SAKIT MATA                                                | 30,662                              | 35,958                            | 66,620                        | PERINGKAT 4           |
| 32                    | RSUD Atama Husada Mahakam                                            | 26,694                              | 39,622                            | 66,316                        | PERINGKAT 4           |
| 33                    | Badan Kepegawaian Daerah                                             | 30,279                              | 35,976                            | 66,255                        | PERINGKAT 4           |
| 34                    | UOBK RSUD KOPRI                                                      | 27,169                              | 37,250                            | 64,419                        | PERINGKAT 4           |
| 35                    | Dinas Komunikasi dan Informatika                                     | 27,289                              | 36,250                            | 63,539                        | PERINGKAT 4           |
| 36                    | Inspektorat Daerah                                                   | 26,593                              | 36,250                            | 62,843                        | PERINGKAT 4           |
| 37                    | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                           | 26,657                              | 35,833                            | 62,490                        | PERINGKAT 4           |
| 38                    | Dinas Pariwisata                                                     | 29,326                              | 33,015                            | 62,341                        | PERINGKAT 4           |
| 39                    | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                 | 27,702                              | 34,015                            | 61,717                        | PERINGKAT 4           |
| NILAI PEMPROV. KALTIM |                                                                      | 31,896                              | 39,592                            | 71,53                         | PERINGKAT 4           |

| RENTANG NILAI | PD | %     |
|---------------|----|-------|
| 0 - 30        | 0  | 0,0%  |
| 31 - 50       | 0  | 0,0%  |
| 51 - 70       | 20 | 41,7% |
| 71 - 85       | 27 | 56,3% |
| 86 - 100      | 1  | 2,1%  |
| JUMLAH        | 48 | 100%  |

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

**1) Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal**

**B:**

- a) Sebagian besar Perangkat Daerah telah menyusun Cascading Kinerja;
- b) Sebagian besar Perangkat Daerah telah menyusun dan melakukan Monitoring Evaluasi Rencana Aksi;
- c) Telah ditetapkan peraturan:
  - Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pengelolaan Kinerja (SKP).
- d) Dilakukan monitoring/evaluasi secara rutin terhadap Penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah.

**2) Indeks Kelembagaan:**

- a) Kewenangan daerah, karakteristik, potensi daerah kemampuan keuangan daerah (APBD), ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerjasama;
- b) Peraturan tentang kewenangan daerah, tugas dan fungsi berdasarkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis.

f. Permasalahan

**1) Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal B:**

Kinerja pada beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (*measurable*), relevan dan cukup. Hal tersebut berpengaruh pada perjenjangan kinerja (*cascading*), pengukuran kinerja, perjanjian kinerja, monitoring capaian kinerja dan pelaporan kinerja.

**2) Indeks Kelembagaan:**

- a) Masih banyaknya Perangkat Daerah yang belum tertib administrasi, dengan belum melengkapi pemenuhan dokumen administrasi berdasarkan variabel dan indikator kematangan organisasi;
- b) Kemampuan dan kapasitas aparatur pemerintah yang belum merata/masih kurang terutama terhadap perkembangan teknologi;
- c) Belum maksimalnya pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

g. Solusi

**1) Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B):**

- a) Melakukan fasilitasi penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Melakukan fasilitasi penyusunan Rencana Aksi dan Monitoring Evaluasi secara berkala.

**2) Indeks Kelembagaan:**

Melakukan sosialisasi tentang pemenuhan dimensi-dimensi yang menjadi variabel penilaian dalam Indeks Kelembagaan yang tertuang dalam Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2018.

### **3.3.4 Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintah**

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

| No. | Indikator Kinerja                                                                | Satuan     | Target | Realisasi | % Capaian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| 1   | 2                                                                                | 3          | 4      | 5         | 6=5/4*100 |
| 1.  | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)     | Persentase | 70,00  | 85,11     | 121,59    |
| 2.  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Indeks     | 77,50  | 83,38     | 107,59    |
| 3.  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan              | Indeks     | 77,35  | 85,78     | 110,90    |

Sumber: Data Biro-biro tahun 2022 diolah

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

**Tabel 3.17**  
**Perbandingan antara Realisasi Tahun 2021 dengan Tahun 2022**

| No. | Indikator Kinerja                                                                | Satuan     | Realisasi |       | % Peningkatan/<br>Penurunan<br>Tahun 2021 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-------------------------------------------|
|     |                                                                                  |            | 2021      | 2022  |                                           |
| 1   | 2                                                                                | 3          | 4         | 5     | 6=(5/4-1)*100                             |
| 1.  | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)     | Persentase | 72,67     | 85,11 | 17,12                                     |
| 2.  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Indeks     | 79,81     | 83,38 | 4,47                                      |
| 3.  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan              | Indeks     | 85,24     | 85,78 | 0,63                                      |

Sumber: Data Biro-biro tahun 2022 diolah

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

**Tabel 3.18**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra**

| No. | Indikator Kinerja                                                                | Satuan     | Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023) | Realisasi (Tahun 2022) | Tingkat Kemajuan |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                | 3          | 4                                   | 5                      | 6=5/4*100        |
| 1.  | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)     | Persentase | 71,00                               | 85,11                  | 119,87           |
| 2.  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Indeks     | 77,80                               | 83,38                  | 107,17           |
| 3.  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan              | Indeks     | 77,50                               | 85,78                  | 110,68           |

Sumber: Data Biro-biro tahun 2022 diolah

d. Analisis penjabaran data capaian

**1) Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B):**

**Indikator Kinerja** “Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B) dengan Target 70,00% dengan Realisasi Capaian 85,11% dengan Persentase Capaian 121,59%. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 17,12% dari capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 72,67%. Perangkat Daerah yang menyampaikan hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 adalah 94 Unit Layanan dengan 80 Unit Layanan memperoleh nilai indeks diatas 80 dengan rincian sebagai berikut:

| NO | PERANGKAT DAERAH/UPTD/CABDIN. |                                               | SEMESTER 1 |                       | SEMESTER 2 |                       | IKM 2022                     |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
|    |                               |                                               | P D        | UPTD/CAB DIN dan UOBK | P D        | UPTD/CAB DIN dan UOBK | PD dan UPTD/CAB DIN dan UOBK |
| 1  | SEKRETARIAT DAERAH            |                                               | 75,00      |                       | 75,91      |                       | 75,46                        |
|    | 1,1                           | Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah (B. POD) |            | 90,18                 |            | 90,46                 | 90,32                        |
|    | 1,2                           | Biro Kesejahteraan Rakyat (B.Kesra)           |            | 81,01                 |            | 80,63                 | 80,82                        |
|    | 1,3                           | Biro Hukum                                    |            | 87,13                 |            | 87,70                 | 87,415                       |
|    | 1,4                           | Biro Perekonomian                             |            |                       |            |                       | 87,48                        |

| NO | PERANGKAT DAERAH/UPTD/CABDIN.                                  |                                                                                      | SEMESTER 1 |                       | SEMESTER 2 |                       | IKM 2022                     |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
|    |                                                                |                                                                                      | P D        | UPTD/CAB DIN dan UOBK | P D        | UPTD/CAB DIN dan UOBK | PD dan UPTD/CAB DIN dan UOBK |
|    | 1,5                                                            | Biro Administrasi Pembangunan (B.Adbang)                                             |            | 79,06                 |            | 84,03                 | 81,545                       |
|    | 1,6                                                            | Biro Pengadaan Barang dan Jasa (B.PBJ)                                               |            | 80,05                 |            | 81,35                 | 80,70                        |
|    | 1,7                                                            | Biro Organisasi                                                                      |            | 88,85                 |            | 90,16                 | 89,51                        |
|    | 1,8                                                            | Biro Administrasi Pimpinan (B.Adipim)                                                |            | 85,41                 |            | 85,58                 | 85,50                        |
|    | 1,9                                                            | Biro Umum                                                                            |            | 83,30                 |            | 83,30                 | 83,30                        |
|    | SET. DPRD, INSPEKTORAT, SATPOL. PP, dan RSUD                   |                                                                                      |            |                       |            |                       |                              |
| 2  | Sekretariat DPRD                                               |                                                                                      | 73,71      |                       | 81,71      |                       | 77,71                        |
| 3  | Inspektorat                                                    |                                                                                      |            |                       |            |                       | 80,66                        |
| 4  | Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL. PP)                        |                                                                                      | 81,42      |                       |            |                       | 81,42                        |
| 5  | RSUD A. Wahab Sjahranie                                        |                                                                                      |            |                       |            |                       | 77,70                        |
| 6  | RSUD Dr.Kanujoso Djatiwibowo                                   |                                                                                      | 92,18      |                       | 93,62      |                       | 92,90                        |
| 7  | RSJD Atma Husada Mahakam                                       |                                                                                      | 89,33      |                       |            |                       | 89,33                        |
|    | DINAS-DINAS                                                    |                                                                                      |            |                       |            |                       |                              |
| 8  | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (DISDIKBUD)                    |                                                                                      | 89,13      |                       | 89,51      |                       | 89,32                        |
|    | 8,1                                                            | UPTD Taman Budaya                                                                    |            | 81,71                 |            | 85,21                 | 83,46                        |
|    | 8,2                                                            | UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan                                   |            | 83,14                 |            | 80,1                  | 81,62                        |
|    | 8,3                                                            | UPTD Museum Negeri Mulawarman                                                        |            | 79,41                 |            | 79,61                 | 79,51                        |
|    | 8,4                                                            | Cabang Dinas Wilayah I berkedudukan di Balikpapan (wilayah kerja Balikpapan dan PPU) |            |                       |            | 87                    | 87                           |
|    | 8,5                                                            | Cabang Dinas Wilayah II berkedudukan di Sangatta (wilayah kerja Kutim dan Bontang)   |            |                       |            | 87,25                 | 87,25                        |
|    | 8,6                                                            | Cabang Dinas Wilayah III berkedudukan di Tenggarong (wilayah kerja Kukar)            |            | 89,12                 |            | 80,76                 | 84,94                        |
|    | 8,7                                                            | Cabang Dinas Wilayah IV berkedudukan di Sendawar (wilayah kerja Kubar dan Mahulu)    |            | 94,63                 |            | 93,06                 | 93,845                       |
|    | 8,8                                                            | Cabang Dinas Wilayah V berkedudukan di Tana Paser (wilayah kerja Kab. Paser)         |            | 82,91                 |            | 87,63                 | 85,27                        |
|    | 8,9                                                            | Cabang Dinas Wilayah VI berkedudukan di Tanjung Redeb (wilayah kerja Kab. Berau)     |            | 81,89                 |            | 80,03                 | 80,96                        |
| 9  | Dinas Kesehatan (DINKES)                                       |                                                                                      | 86,09      |                       | 86,91      |                       | 86,5                         |
|    | 9,1                                                            | UPTD. Balai Latihan Kesehatan                                                        |            | 97,70                 |            | 81,57                 | 89,64                        |
|    | 9,2                                                            | UPTD. Laboratorium Kesehatan                                                         |            | 79,59                 |            | 80,25                 | 79,92                        |
|    | 9,3                                                            | UOBK. Rumah Sakit Mata                                                               |            | 81,62                 |            | 85,92                 | 83,77                        |
|    | 9,4                                                            | UOBK. KORPRI                                                                         |            | 85                    |            | 91                    | 88                           |
| 10 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat (PUPR) |                                                                                      | 78,63      |                       | 78,12      |                       | 78,38                        |
|    | 10,1                                                           | UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I                             |            |                       |            |                       |                              |
|    | 10,2                                                           | UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II                            |            |                       |            |                       |                              |
|    | 10,3                                                           | UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III                           |            |                       |            |                       |                              |
|    | 10,4                                                           | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi                                                   |            | 85,56                 |            | 85,56                 | 85,56                        |
| 11 | Dinas Sosial (DINSOS)                                          |                                                                                      | 81,04      |                       | 91,31      |                       | 86,175                       |
|    | 11,1                                                           | UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri                                         |            |                       |            |                       |                              |
|    | 11,2                                                           | UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma                                           |            |                       |            |                       |                              |
|    | 11,3                                                           | UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan                                                |            |                       |            |                       |                              |
|    | 11,4                                                           | UPTD Panti Sosial Bina Remaja                                                        |            | 86,15                 |            | 86,08                 | 86,12                        |

| NO | PERANGKAT DAERAH/UPTD/CABDIN.                                         |                                                                    | SEMESTER 1 |                       | SEMESTER 2 |                       | IKM 2022                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
|    |                                                                       |                                                                    | P D        | UPTD/CAB DIN dan UOBK | P D        | UPTD/CAB DIN dan UOBK | PD dan UPTD/CAB DIN dan UOBK |
|    | 11,5                                                                  | UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia                       |            |                       |            |                       | 85,14                        |
| 12 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans)                   |                                                                    |            |                       |            |                       | 74,54                        |
|    | 12,1                                                                  | UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan                       |            |                       |            |                       |                              |
|    | 12,2                                                                  | UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang                          |            |                       |            |                       |                              |
| 13 | Dis.Kependudukan,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) |                                                                    | 90         |                       | 91         |                       | 90,5                         |
|    | 13,1                                                                  | UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak                              |            |                       |            |                       |                              |
| 14 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura                         |                                                                    | 88,34      |                       | 88,56      |                       | 88,45                        |
|    | 14,1                                                                  | UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih TP dan Hortikultura          |            | 78,02                 |            | 80,27                 | 79,15                        |
|    | 14,2                                                                  | UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura                      |            | 77                    |            | 78,96                 | 77,98                        |
|    | 14,3                                                                  | UPTD Balai Benih Induk Hortikultura                                |            | 78,15                 |            | 80,67                 | 79,41                        |
|    | 14,4                                                                  | UPTD Balai Penyuluhan & Pengembangan SDM                           |            | 87,77                 |            | 88                    | 87,885                       |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup (DLH)                                          |                                                                    | 84,25      |                       | 80,04      |                       | 82,15                        |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD)           |                                                                    | 78,72      |                       | 83,48      |                       | 81,10                        |
| 17 | Dinas Perhubungan (DISHUB)                                            |                                                                    | 95,73      |                       | 95,75      |                       | 95,74                        |
|    | 17,1                                                                  | UPTD Terminal                                                      |            | 80,42                 |            | 81,08                 | 80,75                        |
| 18 | Dinas Komunikasi Dan Informatika (DISKOMINFO)                         |                                                                    | 80,85      |                       | 80,85      |                       | 80,85                        |
| 19 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)      |                                                                    |            |                       |            |                       | 90,15                        |
| 20 | Dinas Pemuda Dan Olahraga (DISPORA)                                   |                                                                    | 82,36      |                       |            |                       | 82,36                        |
|    | 20,1                                                                  | UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya                   |            |                       |            |                       |                              |
| 21 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan                                      |                                                                    | 81,70      |                       | 81,72      |                       | 81,71                        |
| 22 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (DESDM)                          |                                                                    | 82,54      |                       | 83,46      |                       | 83                           |
| 23 | Dinas Kehutanan (DIHUT)                                               |                                                                    | 86         |                       | 88,32      |                       | 87,16                        |
|    | 23,1                                                                  | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat               |            | 81,69                 |            |                       | 81,69                        |
|    | 23,2                                                                  | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon (Kutim)          |            |                       |            |                       |                              |
|    | 23,3                                                                  | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Das Belayan (Kukar)       |            |                       |            |                       |                              |
|    | 23,4                                                                  | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan (Samarinda)        |            |                       |            |                       | 86,34                        |
|    | 23,5                                                                  | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau (Kubar)         |            | 83                    |            |                       | 83                           |
|    | 23,6                                                                  | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus (Kukar)           |            |                       |            |                       |                              |
|    | 23,7                                                                  | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan (Balikpapan)       |            | 79,60                 |            | 81,18                 | 80,39                        |
|    | 23,8                                                                  | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo (Paser)           |            | 80,31                 |            |                       | 80,31                        |
|    | 23,9                                                                  | UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto                               |            |                       |            |                       | 89,95                        |
|    | 23,10                                                                 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar (Kutim)           |            | 80,2                  |            |                       | 80,2                         |
|    | 23,11                                                                 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai (Kubar)             |            | 86,36                 |            |                       | 86,36                        |
|    | 23,12                                                                 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam (Samarinda) |            |                       |            |                       |                              |
|    | 23,13                                                                 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau (Samarinda)      |            |                       |            |                       |                              |
|    | 23,14                                                                 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake (PPU)              |            |                       |            |                       |                              |
|    | 23,15                                                                 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulan (Kubar)  |            |                       |            |                       |                              |

| NO        | PERANGKAT DAERAH/UPTD/CABDIN.                                              |                                                                             | SEMESTER 1   |                       | SEMESTER 2   |                       | IKM 2022                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|
|           |                                                                            |                                                                             | P D          | UPTD/CAB DIN dan UOBK | P D          | UPTD/CAB DIN dan UOBK | PD dan UPTD/CAB DIN dan UOBK |
|           | 23.16                                                                      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai                       |              | 76                    |              | 81                    | 78,5                         |
|           | 23.17                                                                      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara                        |              | 78                    |              |                       | 78                           |
|           | 23.18                                                                      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah                       |              | 77,47                 |              |                       | 77,47                        |
|           | 23.19                                                                      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook (Kubar)                   |              | 82,84                 |              |                       | 82,84                        |
|           | 23.20                                                                      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan                          |              | 81,40                 |              | 81,42                 | 81,41                        |
| <b>24</b> | <b>Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP)</b>                                  |                                                                             | <b>92,85</b> |                       |              |                       | 92,85                        |
|           | 24,1                                                                       | UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan                                         |              |                       |              |                       |                              |
|           | 24,2                                                                       | UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar. Balikpapan |              | 89,02                 |              |                       | 89,02                        |
|           | 24,3                                                                       | UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu              |              | 82                    |              |                       | 82                           |
| <b>25</b> | <b>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm (DISPERINDAGKOP)</b> |                                                                             | <b>89</b>    |                       | <b>88,07</b> |                       | 88,54                        |
|           | 25,1                                                                       | UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang                            |              | 85,63                 |              | 96,46                 | 91,05                        |
|           | 25,2                                                                       | UPTD Pelatihan Koperasi                                                     |              |                       |              |                       |                              |
| <b>26</b> | <b>Dinas Pariwisata</b>                                                    |                                                                             | <b>88,16</b> |                       |              |                       | 88,16                        |
| <b>27</b> | <b>Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan (DPKH)</b>                         |                                                                             | <b>79,38</b> |                       | <b>81,12</b> |                       | 80,25                        |
|           | 27,1                                                                       | UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                             |              | 80,71                 |              | 80,71                 | 80,71                        |
|           | 27,2                                                                       | UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner        |              | 81,97                 |              | 82,38                 | 82,18                        |
| <b>28</b> | <b>Dinas Perkebunan (DISBUN)</b>                                           |                                                                             | <b>89,24</b> |                       | <b>89,3</b>  |                       | 89,27                        |
|           | 28,1                                                                       | UPTD Pengawasan Benih Perkebunan                                            |              |                       |              |                       |                              |
|           | 28,2                                                                       | UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan                           |              |                       |              | 89,37                 | 89,37                        |
|           | 28,3                                                                       | UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan                                      |              | 87,29                 |              | 92,32                 | 89,81                        |
|           | <b>BADAN-BADAN</b>                                                         |                                                                             |              |                       |              |                       |                              |
| <b>29</b> | <b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)</b>                      |                                                                             |              |                       |              |                       | 79,42                        |
| <b>30</b> | <b>Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)</b>                                   |                                                                             | <b>92,24</b> |                       | <b>89,91</b> |                       | 91,075                       |
|           | 30,1                                                                       | UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wil. Kota Smd.                    |              | 92,23                 |              | 92,33                 | 92,28                        |
|           | 30,2                                                                       | UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wil. Kab. Kukar.                  |              | 84,10                 |              | 84,20                 | 84,15                        |
|           | 30,3                                                                       | UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wil. Kab. Kutim.                  |              | 88,43                 |              | 88,35                 | 88,39                        |
|           | 30,4                                                                       | UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wil. Kab. Kubar.                  |              | 83,42                 |              | 84                    | 83,71                        |
|           | 30,5                                                                       | UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wil. Kota Bpp.                    |              | 91,75                 |              | 91,76                 | 91,755                       |
|           | 30,6                                                                       | UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wil. Kota Bontang                 |              | 82,83                 |              | 82,60                 | 82,72                        |
|           | 30,7                                                                       | UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wil. Kab. PPU.                    |              | 82                    |              | 83,11                 | 82,555                       |
|           | 30,8                                                                       | UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wil. Kab. Paser                   |              | 84,10                 |              | 84,22                 | 84,16                        |
|           | 30,9                                                                       | UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wil. Kab. Berau                   |              | 80,16                 |              | 84,45                 | 82,305                       |
| <b>31</b> | <b>Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)</b>                  |                                                                             | <b>79,41</b> |                       | <b>81,03</b> |                       | 80,22                        |
| <b>32</b> | <b>Badan Kepegawaian Daerah (BKD)</b>                                      |                                                                             | <b>91,42</b> |                       | <b>90,31</b> |                       | 90,865                       |
|           | 32,1                                                                       | UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai                                           |              | 82,54                 |              |                       | 82,54                        |
| <b>33</b> | <b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)</b>                      |                                                                             |              |                       |              |                       |                              |
| <b>34</b> | <b>Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)</b>              |                                                                             |              |                       |              |                       | 82,03                        |
| <b>35</b> | <b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)</b>                          |                                                                             |              |                       |              |                       |                              |
| <b>36</b> | <b>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Badan Kesbangpol)</b>                |                                                                             | <b>79,08</b> |                       | <b>72,88</b> |                       | 75,98                        |
| <b>37</b> | <b>Badan Penghubung (Jakarta)</b>                                          |                                                                             | <b>86,52</b> |                       | <b>89,84</b> |                       | 88,18                        |

| NO                | PERANGKAT DAERAH/UPTD/CABDIN. | SEMESTER 1  |                             | SEMESTER 2  |                             | IKM 2022                              |
|-------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|                   |                               | P D         | UPTD/CAB<br>DIN dan<br>UOBK | P D         | UPTD/CAB<br>DIN dan<br>UOBK | PD dan<br>UPTD/CAB<br>DIN dan<br>UOBK |
| J U M L A H       |                               | 2464,<br>32 | 4429,83                     | 2052,<br>73 | 3823,08                     |                                       |
| Nilai Rata - rata |                               | 85,33       | 83,58                       | 85,95       | 84,96                       | 84,41                                 |

## 2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah:

Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum (Semester I dan II) yaitu **83,30%** dan **83,38%**.

| No | Sasaran Perjanjian Kinerja                               | Indikator                                               | Target (%) | Realisasi (%) | Keterangan   |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| 1  | Tercapainya Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum | Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum | 83         | 83,3          | Semester (1) |
| 2  | Tercapainya Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum | Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum | 83         | 83,3          | Semester (2) |

## 3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan:

- Persentase Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Biro Administrasi Pimpinan pada Triwulan I yaitu **85,39%**;
- Persentase Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Biro Administrasi Pimpinan pada Triwulan II yaitu **85,43%**;
- Persentase Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Biro Administrasi Pimpinan pada Triwulan III yaitu **85,58%**;
- Persentase Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Biro Administrasi Pimpinan pada Triwulan IV yaitu **85,78%**.

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

**1) Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B):**

- a) Peningkatan Kapasitas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- b) Fasilitasi dan Asistensi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- c) Evaluasi/Reviu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

**2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah:**

- a) Faktor pendukung capaian kinerja Semester I:

**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro Umum  
Seretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
Semester I Tahun 2022**

| INFORMASI SURVEY |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Jumlah Responden | 68                                                                   |
| Jenis Kelamin    | 40 (L)<br>28 (P)                                                     |
| Pendidikan       | SD: 0<br>SMP: 4<br>SMA/SMK sederajat: 21<br>S1: 35<br>S2: 8<br>S3: 0 |
| Periode Survey   | 1 Jan – 30 Juni 2022                                                 |

NILAI SKM

**83,30**

“BAIK”

**PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN  
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

| No.<br>RESPONDEN            | NILAI UNSUR PELAYANAN |         |         |         |         |         |         |         |         | Unsur Pelayanan ke-<br>Nomor pertanyaan |
|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------|
|                             | U1<br>1               | U2<br>2 | U3<br>3 | U4<br>4 | U5<br>5 | U6<br>6 | U7<br>7 | U8<br>8 | U9<br>9 |                                         |
| 1                           | 4                     | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |                                         |
| 2                           | 4                     | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |                                         |
| 3                           | 3                     | 3       | 3       | 4       | 3       | 4       | 4       | 3       | 4       |                                         |
| 4                           | 3                     | 3       | 3       | 4       | 3       | 4       | 4       | 3       | 3       |                                         |
| 5                           | 3                     | 3       | 3       | 4       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |                                         |
| 6                           | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       | 3       |                                         |
| 7                           | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |                                         |
| 8                           | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       | 3       | 4       |                                         |
| 9                           | 3                     | 4       | 3       | 4       | 4       | 3       | 4       | 3       | 4       |                                         |
| 10                          | 3                     | 3       | 3       | 4       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 11                          | 3                     | 3       | 3       | 4       | 3       | 3       | 4       | 3       | 4       |                                         |
| 12                          | 3                     | 3       | 2       | 3       | 3       | 3       | 3       | 2       | 4       |                                         |
| 13                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 14                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 15                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 16                          | 3                     | 3       | 3       | 4       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 17                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 18                          | 4                     | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |                                         |
| 19                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 20                          | 4                     | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |                                         |
| 21                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       | 4       |                                         |
| 22                          | 3                     | 2       | 3       | 2       | 3       | 2       | 3       | 2       | 3       |                                         |
| 23                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 2       | 3       |                                         |
| 24                          | 4                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 25                          | 4                     | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 26                          | 3                     | 3       | 3       | 2       | 3       | 3       | 3       | 2       | 3       |                                         |
| 27                          | 4                     | 4       | 3       | 3       | 4       | 3       | 4       | 4       | 4       |                                         |
| 28                          | 3                     | 3       | 3       | 4       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 29                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 30                          | 4                     | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |                                         |
| 31                          | 3                     | 3       | 3       | 4       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 32                          | 4                     | 4       | 3       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |                                         |
| 33                          | 3                     | 3       | 4       | 4       | 3       | 4       | 4       | 4       | 4       |                                         |
| 34                          | 4                     | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |                                         |
| 35                          | 4                     | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |                                         |
| 36                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 37                          | 4                     | 3       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |                                         |
| 38                          | 3                     | 3       | 3       | 2       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 39                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 40                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 41                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 42                          | 4                     | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |                                         |
| 43                          | 4                     | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |                                         |
| 44                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 45                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 46                          | 3                     | 4       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       | 3       | 4       |                                         |
| 47                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       | 4       | 4       | 4       |                                         |
| 48                          | 4                     | 4       | 4       | 3       | 4       | 3       | 4       | 4       | 4       |                                         |
| 49                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       | 4       | 3       | 4       |                                         |
| 50                          | 4                     | 4       | 4       | 4       | 3       | 4       | 4       | 4       | 4       |                                         |
| 51                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 52                          | 4                     | 4       | 4       | 4       | 3       | 4       | 4       | 4       | 4       |                                         |
| 53                          | 3                     | 4       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       | 4       | 4       |                                         |
| 54                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 55                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |                                         |
| 56                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       | 3       | 4       |                                         |
| 57                          | 4                     | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |                                         |
| 58                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 59                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 60                          | 3                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       | 3       |                                         |
| 61                          | 4                     | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |                                         |
| 62                          | 4                     | 4       | 4       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       |                                         |
| 63                          | 3                     | 3       | 2       | 3       | 3       | 1       | 2       | 1       | 2       |                                         |
| 64                          | 3                     | 4       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |                                         |
| 65                          | 3                     | 3       | 4       | 4       | 4       | 3       | 4       | 4       | 3       |                                         |
| 66                          | 3                     | 4       | 3       | 4       | 3       | 4       | 3       | 3       | 3       |                                         |
| 67                          | 4                     | 4       | 3       | 3       | 3       | 3       | 4       | 3       | 4       |                                         |
| 68                          | 4                     | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |                                         |
| Σ Nilai/<br>Unsur           | 226                   | 227     | 221     | 229     | 222     | 223     | 234     | 221     | 257     |                                         |
| NRR/Unsur                   | 3.3235                | 3.3382  | 3.2500  | 3.3676  | 3.2647  | 3.2794  | 3.4412  | 3.2500  | 3.7794  |                                         |
| NRR<br>Tertimbang/<br>Unsur | 0.3656                | 0.3672  | 0.3575  | 0.3704  | 0.3591  | 0.3607  | 0.3785  | 0.3575  | 0.4157  | *)                                      |
| SKM Unit Pelayanan          |                       |         |         |         |         |         |         |         |         | **) 83.30882353                         |

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  |
| 0  | 1  | 2  | 3  | 0  | 1  | 1  | 4  | 1  |
| 46 | 43 | 47 | 37 | 50 | 44 | 36 | 40 | 13 |
| 22 | 24 | 19 | 28 | 18 | 22 | 31 | 23 | 54 |
| 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |

Keterangan:

- U1 s.d. U9

- NRR

- SKM

- \*)

- \*\*)

NRR Per Unsor

NRR tertimbang  
per unsor

= Unsur-Unsur pelayanan

= Nilai rata-rata

= Indeks Kepuasan Masyarakat

= Jumlah NRR IKM tertimbang

= Jumlah NRR tertimbang x 25

= Jumlah nilai per unsor dibagi

Jumlah kuesioner yang terisi

= NRR per unsor x 0,11

| No. | UNSUR PELAYAN                           | NILAI RATA-RATA |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|
| U1  | Persyaratan                             | 3.32            |
| U2  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur          | 3.34            |
| U3  | Waktu pelayanan                         | 3.25            |
| U4  | Biaya/tarif                             | 3.37            |
| U5  | Produk spesifikasi jenis pelayanan      | 3.26            |
| U6  | Kompetensi pelaksana                    | 3.28            |
| U7  | Perilaku pelaksana                      | 3.44            |
| U8  | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 3.25            |
| U9  | Sarana dan prasarana                    | 3.78            |

**SKM UNIT PELAYANAN : 83.3**

Mutu Pelayanan:

A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00

B (Baik) : 76,61 - 88,30

C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60

D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

Secara umum kualitas pelayanan publik Biro Umum Setda Prov. Kaltim dipersepsikan baik oleh publik, hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I yang diperoleh berkisar 76,61-88,30 dan Nilai SKM yang diperoleh dari 9 (sembilan) unsur pelayanan dengan IKM adalah **83,30%**.

b) Faktor pendukung capaian kinerja Semester II:

**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro Umum  
Seretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
Semester II Tahun 2022**

| INFORMASI SURVEY |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Jumlah Responden | 155                                                                  |
| Jenis Kelamin    | 96 (L)<br>59 (P)                                                     |
| Pendidikan       | SD: 0<br>SMP: 1<br>SMA/SMK sederajat: 81<br>S1: 67<br>S2: 6<br>S3: 0 |
| Periode Survey   | 1 Juli – 31 Des 2022                                                 |

**NILAI SKM**

**83,38**

**“BAIK”**

**PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN  
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

| No.<br>RESPONDEN | NILAI UNSUR PELAYANAN |    |    |    |    |    |    |    |    | Unsur<br>Pelayanan ke- |
|------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------------|
|                  | U1                    | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |                        |
|                  | 1                     | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |                        |
| 1                | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |                        |
| 2                | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |                        |
| 3                | 3                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  |                        |
| 4                | 3                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  |                        |
| 5                | 3                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |                        |
| 6                | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  |                        |
| 7                | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |                        |
| 8                | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  |                        |
| 9                | 3                     | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  |                        |
| 10               | 3                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 11               | 3                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  |                        |
| 12               | 3                     | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 4  |                        |
| 13               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 14               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 15               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 16               | 3                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 17               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 18               | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |                        |
| 19               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 20               | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |                        |
| 21               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  |                        |
| 22               | 3                     | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  |                        |
| 23               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 3  |                        |
| 24               | 4                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 25               | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 26               | 3                     | 3  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  | 2  | 3  |                        |
| 27               | 4                     | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  |                        |
| 28               | 3                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 29               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 30               | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |                        |
| 31               | 3                     | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 32               | 4                     | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |                        |
| 33               | 3                     | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  |                        |
| 34               | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |                        |
| 35               | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |                        |
| 36               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 37               | 4                     | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |                        |
| 38               | 3                     | 3  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 39               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 40               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 41               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 42               | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |                        |
| 43               | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |                        |
| 44               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 45               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 46               | 3                     | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  |                        |
| 47               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  |                        |
| 48               | 4                     | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  |                        |
| 49               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  |                        |
| 50               | 4                     | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  |                        |
| 51               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 52               | 4                     | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  |                        |
| 53               | 3                     | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  |                        |
| 54               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 55               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |                        |
| 56               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  |                        |
| 57               | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |                        |
| 58               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 59               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  |                        |
| 60               | 3                     | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  |                        |
| 61               | 4                     | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |                        |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 63  | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 64  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 65  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 66  | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 67  | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 68  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 69  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 70  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 71  | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 72  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 73  | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 74  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 75  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 76  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 77  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 78  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 79  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 80  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 81  | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 82  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 83  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 84  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 85  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 86  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 87  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 88  | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 89  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 90  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 91  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 92  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 93  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 94  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 95  | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 96  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 97  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 98  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 99  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 100 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 101 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 102 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 103 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 104 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 105 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 107 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 108 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 109 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 110 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 112 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 113 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 115 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 116 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 117 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 118 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 119 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 120 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 122 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 123 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 124 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 126 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 128 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |

|                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 129                   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |             |
| 130                   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |             |
| 131                   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |             |
| 132                   | 3      | 4      | 4      | 3      | 3      | 4      | 3      | 4      | 3      |             |
| 133                   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |             |
| 134                   | 3      | 3      | 3      | 4      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |             |
| 135                   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |             |
| 136                   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |             |
| 137                   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |             |
| 138                   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |             |
| 139                   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |             |
| 140                   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |             |
| 141                   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |             |
| 142                   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |             |
| 143                   | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 3      |             |
| 144                   | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 4      | 3      | 3      |             |
| 145                   | 3      | 3      | 4      | 2      | 3      | 4      | 4      | 3      | 3      |             |
| 146                   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 3      | 3      |             |
| 147                   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |             |
| 148                   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |             |
| 149                   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |             |
| 150                   | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 3      |             |
| 151                   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |             |
| 152                   | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |             |
| 153                   | 3      | 3      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 3      | 3      |             |
| 154                   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |             |
| 155                   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      |             |
| Σ Nilai/ Unsur        | 225    | 227    | 221    | 229    | 223    | 223    | 234    | 221    | 257    |             |
| NRR/Unsur             | 3,3088 | 3,3382 | 3,2500 | 3,3676 | 3,2794 | 3,2794 | 3,4412 | 3,2500 | 3,7794 |             |
| NRR Tertimbang/ Unsur | 0,3640 | 0,3672 | 0,3575 | 0,3704 | 0,3607 | 0,3607 | 0,3785 | 0,3575 | 0,4157 | 3,332352941 |
| SKM Unit Pelayanan    |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 83,30882353 |

Keterangan:

|                          |   |                                                            |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| - U1 s.d. U9             | = | Unsur-Unsur pelayanan                                      |
| - NRR                    | = | Nilai rata-rata Indkes                                     |
|                          | = | Kepuasan Masyarakat                                        |
| - SKM                    | = | Jumlah NRR                                                 |
| - *)                     | = | IKM tertimbang                                             |
| - **)                    | = | Jumlah NRR tertimbang x 25                                 |
| NRR Per Unsur            | = | Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi |
| NRR tertimbang per unsur | = | NRR per unsur x 0,11                                       |

| No. | UNSUR PELAYAN                           | NILAI RATA-RATA |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|
| U1  | Persyaratan                             | 3,31            |
| U2  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur          | 3,34            |
| U3  | Waktu pelayanan                         | 3,25            |
| U4  | Biaya/tarif                             | 3,37            |
| U5  | Produk spesifikasi jenis pelayanan      | 3,28            |
| U6  | Kompetensi pelaksana                    | 3,28            |
| U7  | Perilaku pelaksana                      | 3,44            |
| U8  | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 3,25            |
| U9  | Sarana dan prasarana                    | 3,78            |

**SKM UNIT PELAYANAN : 83,30882353**

**Mutu**

**Pelayanan:**

|                 |   |                |
|-----------------|---|----------------|
| A (Sangat Baik) | : | 88,31 - 100,00 |
| B (Baik)        | : | 76,61 - 88,30  |
| C (Kurang Baik) | : | 65,00 - 76,60  |
| D (Tidak Baik)  | : | 25,00 - 64,99  |

Secara umum kualitas pelayanan public Biro Umum Setda Prov. Kaltim dipersepsikan baik oleh public, hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II yang diperoleh berkisar 76,61-83,38 dan Nilai SKM yang diperoleh dari 9 (sembilan) unsur pelayanan dengan IKM adalah **83,38%**.

### **3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan:**

Faktor pendukung capaian kinerja pada persentase kepuasan masyarakat yaitu:

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TRIWULAN IV TAHUN 2022

NAMA LAYANAN:

**RESPONDEN**

Jumlah : 23 Orang

Jenis Kelamin : L = 10 P = 13

Pendidikan:SMA : 2 Orang

DIII : 0 Orang

S1 : 20 Orang

S2 : 1 Orang

Periode Survei Triwulan IV = Oktober s/d Desember 2022

**85,78**

**“BAIK”**

**PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN  
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

| NO.<br>RESP             | NILAI UNSUR PELAYANAN |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                         | U1                    | U2    | U3    | U4    | U5    | U6    | U7    | U8    | U9     |
| 1                       | 2                     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10     |
| 1                       | 3                     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4      |
| 2                       | 3                     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4      |
| 3                       | 4                     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4      |
| 4                       | 4                     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4      |
| 5                       | 3                     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3      |
| 6                       | 3                     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3      |
| 7                       | 4                     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4      |
| 8                       | 4                     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4      |
| 9                       | 3                     | 3     | 3     | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     | 4      |
| 10                      | 3                     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4      |
| 11                      | 3                     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4      |
| 12                      | 3                     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4      |
| 13                      | 4                     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4      |
| 14                      | 2                     | 2     | 2     | 4     | 2     | 3     | 3     | 3     | 3      |
| 15                      | 3                     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4      |
| 16                      | 4                     | 4     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4      |
| 17                      | 3                     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 3      |
| 18                      | 4                     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3      |
| 19                      | 4                     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 3     | 3     | 4      |
| 20                      | 3                     | 4     | 3     | 3     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4      |
| 21                      | 4                     | 3     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4      |
| 22                      | 3                     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 2      |
| 23                      | 4                     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     | 3     | 4      |
| ΣNilai/<br>(Unsur       | 78                    | 79    | 75    | 83    | 76    | 77    | 80    | 78    | 85     |
| NRR /<br>Unsur          | 3,391                 | 3,435 | 3,261 | 3,609 | 3,304 | 3,348 | 3,478 | 3,391 | 3,696  |
| NRR<br>terbng/<br>unsur | 0,376                 | 0,381 | 0,362 | 0,401 | 0,367 | 0,372 | 0,386 | 0,376 | 0,410  |
| IKM Unit pelayanan      |                       |       |       |       |       |       |       |       | 3,431  |
|                         |                       |       |       |       |       |       |       |       | 85,784 |

**Keterangan :**

- I= Unsur-Unsur pelayanan
- II= Nilai rata-rata
- I= Indeks Kepuasan Masyarakat
- I= Jumlah NRR IKM tertimbang
- I= Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NI= Jumlah nilai per unsur dibagi  
Jumlah kuesioner yang terisi
- NI= NRR per unsur x 0,01 111  
per unsur

| No. | UNSUR PELAYANAN               | NILAI RATA-RATA |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| U1  | Persyaratan                   | 3,391           |
| U2  | Prosedur                      | 3,435           |
| U3  | Waktu pelayanan               | 3,261           |
| U4  | Biaya/tarif                   | 3,609           |
| U5  | Produk layanan                | 3,304           |
| U6  | Kompetensi pelaksana          | 3,348           |
| U7  | Perilaku pelaksana            | 3,478           |
| U8  | Kualitas Sarana dan Prasarana | 3,391           |
| U9  | Penanganan Pengaduan          | 3,696           |

**IKM UNIT PELAYANAN:** 85,784

**Mutu Pelayanan :**

- A : 81,26 - 100,00
- B : 62,51 - 81,25
- C : 43,76 - 62,50
- D : 25,00 - 43,75

Kategori Mutu Layanan  
(Balk)

Secara umum kualitas pelayanan publik Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim yang diperoleh dari 9 (sembilan) unsur pelayanan dengan IKM adalah **85,78%**.

f. Permasalahan

**1) Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B):**

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah belum optimalnya dan masih ada beberapa Perangkat Daerah dan UPTD yang belum melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

**2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah:**

- a) Intensitas kegiatan pimpinan yang cukup tinggi dan terkadang tidak terprediksi sebelumnya (insidental) sehingga banyak belanja-belanja yang tidak tercover dalam DPA Biro Umum, dan akhirnya harus dilakukan pergeseran anggaran atau usulan penambahan anggaran;
- b) Regulasi tentang perencanaan dan penganggaran yang sering berubah-ubah;
- c) Kurangnya pemahaman pelaksana kegiatan terkait pelaksanaan anggaran;
- d) Serapan anggaran yang tidak mencapai target, sehingga realisasi di tahun 2022 kurang efektif;
- e) Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

**3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan:**

- a) Perbedaan realisasi pada Teptra dan realisasi riil keuangan dan fisik akhir November dikarenakan faktor internal dalam melaporkan realisasi per Bagian;
- b) Realisasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Teptra terlihat kecil (masih merah) padahal seharusnya 64,58% (hijau), realisasi keuangan dari TUP. Selain hal tersebut, ada 1 (satu) kegiatan yang direncanakan minggu ke-2 Desember 2022 yakni Renaksi Kinerja Triwulan IV;
- c) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah, tidak semua belanja Internet Terpenuhi.

g. Solusi dan Upaya

**1) Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B):**

- a) Melakukan fasilitasi/asistensi SKM terhadap Perangkat Daerah dan UPTD/Unit Layanan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b) Evaluasi/Reviu SKM terhadap Perangkat Daerah dan UPTD/Unit Layanan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

**2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah:**

- a) Tingginya mobilitas pelayanan pada Biro Umum khususnya pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Sekretariat Daerah, perlu didukung penuh oleh Pimpinan, karena dalam pelaksanaan kegiatan banyak terdapat kendala-kendala yang memerlukan kebijakan Pimpinan;
- b) *Update* terhadap isu-isu strategis seputar Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga dapat meminimalisir kebutuhan kegiatan Pimpinan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c) Dukungan anggaran yang penuh oleh Pimpinan, untuk mengcover pelayanan Pimpinan dan pelayanan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- d) Perlu peningkatan sinergi antara tim perencanaan anggaran dengan setiap PPTK dalam upaya mencapai target realisasi yang telah ditetapkan;
- e) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Umum, dengan cara mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, *in house training*, sosialisasi, maupun koordinasi dan konsultasi baik ke dalam maupun ke luar daerah, sehingga mampu mengembangkan kemampuan dan wawasan pelaksana;
- f) Melakukan peremajaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.

### 3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan:

- Kedepan akan diketatkan jadwal pelaporannya dan dibuatkan form yang seragam agar mempermudah pengisian data;
- Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dipersiapkan untuk dilaksanakan rutin apda akhir tahun (Desember);
- Untuk penganggaran tahun depan akan diperhitungan sesuai dengan kebutuhan.

#### 3.3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.19**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022**

| No. | Sasaran Strategis                                            | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                            | 3                 | 4                     | 5=3-4             |
| 1.  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah       | 103,46            | 94,41                 | 9,05              |
| 2.  | Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan | 105,75            | 91,52                 | 14,23             |
| 3.  | Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik             | 109,83            | 96,39                 | 13,44             |
| 4.  | Meningkatnya kualitas layanan pemerintah                     | 113,36            | 84,68                 | 28,68             |

Sumber: Data Biro-biro tahun 2022 diolah

#### 3.3.6 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran strategis disajikan dalam Tabel 3.17 berikut ini:

**Tabel 3.20**  
**Program Prioritas dalam Pelaksanaan Sasaran Strategis Tahun 2022**

| No.                                                               | Program Prioritas                       | Anggaran       |                |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
|                                                                   |                                         | Pagu           | Realisasi      | %         |
| 1                                                                 | 2                                       | 3              | 4              | 5=4/3*100 |
| Sasaran 1: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah |                                         |                |                |           |
| 1.                                                                | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 4.691.905.604  | 4.645.920.449  | 99,02     |
| 2.                                                                | Program Kesejahteraan Rakyat            | 71.600.754.071 | 67.281.184.597 | 93,97     |

|                                                                         |                                                           |                 |                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| 3.                                                                      | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                   | 4.131.357.200   | 4.001.386.190   | 96,85 |
| Sasaran 2: Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan |                                                           |                 |                 |       |
| 1.                                                                      | Program Perekonomian dan Pembangunan                      | 4.331.310.000   | 3.529.726.613   | 81,49 |
| 2.                                                                      | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan                | 5.987.957.323   | 5.656.307.116   | 94,46 |
| 3.                                                                      | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | 7.989.355.457   | 7.570.217.623   | 94,75 |
| Sasaran 3: Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik             |                                                           |                 |                 |       |
| 1.                                                                      | Program Penataan Organisasi                               | 1.356.320.000   | 1.307.292.243   | 96,39 |
| Sasaran 4: Meningkatnya kualitas layanan pemerintah                     |                                                           |                 |                 |       |
| 1.                                                                      | Program Penataan Organisasi                               | 450.368.000     | 388.199.662     | 86,20 |
| 2.                                                                      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi     | 207.846.129.681 | 174.371.413.579 | 83,90 |
| 3.                                                                      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi     | 12.612.242.053  | 12.302.625.569  | 97,54 |

Sumber: Data Biro-biro tahun 2022 diolah

### 3.4 Realisasi Anggaran

#### 3.4.1 Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2022 disajikan dalam Tabel 3.18 berikut ini:

**Tabel 3.21**  
**Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

| No. | Sasaran Strategis                                            | Kinerja |           |           | Anggaran           |                    |              |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|
|     |                                                              | Target  | Realisasi | % Capaian | Pagu               | Realisasi          | % Capaian    |
| 1   | 2                                                            | 3       | 4         | 5         | 6                  | 7                  | 8            |
| 1.  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah       | 3,10    | -         | -         | Rp 724.420.000     | Rp 722.810.110     | <b>99,78</b> |
|     |                                                              | 92,50   | 90,00     | 97,30     | Rp 669.739.204     | Rp 668.970.00      | <b>99,89</b> |
|     |                                                              | 87,00   | 100,00    | 114,94    | Rp 71.600.754.071  | Rp 67.281.184.597  | <b>93,97</b> |
|     |                                                              | 100,00  | 102,00    | 102,00    | Rp 4.131.357.200   | Rp 4.001.386.190   | <b>96,85</b> |
| 2.  | Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan | 95,00   | 96,77     | 101,86    | Rp 6.287.126.000   | Rp 5.401.399.340   | <b>85,91</b> |
|     |                                                              | 75,00   | 97,24     | 129,65    | Rp 9.229.275.775   | Rp 8.620.115.806   | <b>93,40</b> |
|     |                                                              | 75,00   | 64,30     | 85,73     | Rp 7.989.355.457   | Rp 7.570.217.623   | <b>94,75</b> |
| 3.  | Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik             | 79,00   | 89,19     | 112,90    | Rp 632.070.000     | Rp 599.710.844     | <b>96,25</b> |
|     |                                                              | 67,00   | 71,53     | 106,76    | Rp 733.250.000     | Rp 707.581.399     | <b>96,50</b> |
| 4.  | Meningkatnya kualitas layanan pemerintah                     | 70,00   | 85,11     | 121,59    | Rp 450.368.000     | Rp 388.199.662     | <b>86,20</b> |
|     |                                                              | 77,50   | 83,38     | 107,59    | Rp 207.846.129.681 | Rp 174.371.413.579 | <b>83,90</b> |
|     |                                                              | 77,35   | 85,78     | 110,90    | Rp 12.612.242.053  | Rp 12.302.625.569  | <b>97,54</b> |

Sumber: Data Biro-biro tahun 2022 diolah

### **3.4.2 Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**

Realisasi anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada tahun 2022 disajikan dalam Tabel 3.19 berikut ini:

**Tabel 3.22**  
**Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022**

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                   | Kinerja     |             |             | Anggaran             |                      |               | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|
|                                                                                                                 | Target      | Realisasi   | (%) Capaian | (Rp.) Pagu           | (Rp.) Realisasi      | (%) Capaian   |            |
| (1)                                                                                                             | (2)         | (3)         | (4)         | (2)                  | (3)                  | (4)           | (5)        |
| <b>BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>                                                                     |             |             |             | <b>6.538.016.317</b> | <b>6.486.052.573</b> | <b>99,21</b>  |            |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                    | <b>83%</b>  | <b>83%</b>  | <b>100%</b> | <b>1.846.110.713</b> | <b>1.840.132.124</b> | <b>99,68</b>  |            |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                         | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>5.205.700</b>     | <b>5.113.000</b>     | <b>98,22</b>  |            |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 100%        | 5.205.700            | 5.113.000            | 98,22         |            |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>98%</b>  | <b>98%</b>  | <b>100%</b> | <b>139.800.000</b>   | <b>139.800.000</b>   | <b>100,00</b> |            |
| Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 100%        | 139.800.000          | 139.800.000          | 100,00        |            |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>12.150.000</b>    | <b>12.150.000</b>    | <b>100,00</b> |            |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 6 Orang     | 6 Orang     | 100%        | 12.150.000           | 12.150.000           | 100,00        |            |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>889.807.500</b>   | <b>889.587.150</b>   | <b>99,98</b>  |            |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 100%        | 75.022.000           | 74.997.900           | 99,97         |            |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100%        | 41.131.500           | 41.109.250           | 99,95         |            |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 90 OT       | 90 OT       | 100%        | 773.654.000          | 773.480.000          | 99,98         |            |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>206.371.900</b>   | <b>205.840.000</b>   | <b>99,74</b>  |            |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 12 Unit     | 12 Unit     | 100%        | 206.371.900          | 205.840.000          | 99,74         |            |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>521.566.613</b>   | <b>518.256.160</b>   | <b>99,37</b>  |            |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 350 Lembar  | 350 Lembar  | 100%        | 3.500.000            | 3.500.000            | 100,00        |            |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | 100%        | 518.066.613          | 514.756.160          | 99,36         |            |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>71.209.000</b>    | <b>69.385.814</b>    | <b>97,44</b>  |            |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 9 Unit      | 9 Unit      | 100%        | 9.000.000            | 7.177.214            | 79,75         |            |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 100%        | 62.209.000           | 62.208.600           | 100,00        |            |
| <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>                                                                  | <b>87%</b>  | <b>87%</b>  | <b>100%</b> | <b>4.691.905.604</b> | <b>4.645.920.449</b> | <b>99,02</b>  |            |
|                                                                                                                 | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |                      |                      |               |            |
|                                                                                                                 | <b>87%</b>  | <b>87%</b>  | <b>100%</b> |                      |                      |               |            |
| <b>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>                                                                           | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>2.100.766.800</b> | <b>2.078.431.311</b> | <b>98,94</b>  |            |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum                                                                        | 3 Laporan   | 3 Laporan   | 100%        | 1.665.967.200        | 1.657.659.432        | 99,50         |            |
| Fasilitasi Penataan Wilayah                                                                                     | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 100%        | 434.799.600          | 420.771.879          | 96,77         |            |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                | Kinerja     |             |             | Anggaran              |                       |              | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
|                                                                              | Target      | Realisasi   | (%) Capaian | (Rp.) Pagu            | (Rp.) Realisasi       | (%) Capaian  |            |
| (1)                                                                          | (2)         | (3)         | (4)         | (2)                   | (3)                   | (4)          | (5)        |
| <b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>                                            | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>1.921.399.600</b>  | <b>1.898.519.138</b>  | <b>98,81</b> |            |
| Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                               | 3 Laporan   | 3 Laporan   | 100%        | 476.278.000           | 465.632.077           | 97,76        |            |
| Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan                                     | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 100%        | 720.701.600           | 710.076.951           | 98,53        |            |
| Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                                    | 3 Laporan   | 3 Laporan   | 100%        | 724.420.000           | 722.810.110           | 99,78        |            |
| <b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>                                           | <b>95%</b>  | <b>95%</b>  | <b>100%</b> | <b>669.739.204</b>    | <b>668.970.000</b>    | <b>99,89</b> |            |
| Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah                                        | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 100%        | 340.243.204           | 339.842.000           | 99,88        |            |
| Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta                                      | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 100%        | 128.000.000           | 128.000.000           | 100,00       |            |
| Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                              | 1 Laporan   | 1 Laporan   | 100%        | 201.496.000           | 201.128.000           | 99,82        |            |
| <b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                             |             |             |             | <b>74.032.241.335</b> | <b>69.433.153.566</b> | <b>93,79</b> |            |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                 | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>2.431.487.264</b>  | <b>2.151.968.969</b>  | <b>88,50</b> |            |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>      | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>89.362.000</b>     | <b>50.975.197</b>     | <b>57,04</b> |            |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 100%        | 21.572.000            | 13.237.700            | 61,37        |            |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                   | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 100%        | 23.820.000            | 14.408.000            | 60,49        |            |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                           | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 100%        | 14.820.000            | 6.521.999             | 44,01        |            |
| Evaluasi Kinerja perangkat daerah                                            | 4 Dokumen   | 4 Dokumen   | 100%        | 29.150.000            | 16.807.498            | 57,66        |            |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>1.018.911.264</b>  | <b>958.810.334</b>    | <b>94,10</b> |            |
| Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD             | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | 100%        | 1.005.402.264         | 950.630.334           | 94,55        |            |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                  | 1 Laporan   | 1 Laporan   | 100%        | 13.509.000            | 8.180.000             | 60,55        |            |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>8.400.000</b>      | <b>2.631.200</b>      | <b>31,32</b> |            |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 2 Laporan   | 2 Laporan   | 100%        | 8.400.000             | 2.631.200             | 31,32        |            |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>1.179.924.000</b>  | <b>1.043.381.225</b>  | <b>88,43</b> |            |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 17 Paket    | 17 Paket    | 100%        | 491.514.000           | 434.434.000           | 88,39        |            |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100%        | 59.000.000            | 25.922.600            | 43,94        |            |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100%        | 629.410.000           | 583.024.625           | 92,63        |            |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>31.376.000</b>     | <b>30.924.018</b>     | <b>98,56</b> |            |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100%        | 20.000.000            | 19.924.018            | 99,62        |            |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 100%        | 11.376.000            | 11.000.000            | 96,69        |            |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>103.514.000</b>    | <b>65.246.995</b>     | <b>63,03</b> |            |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kinerja          |                  |                | Anggaran              |                       |               | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target           | Realisasi        | (%) Capaian    | (Rp.) Pagu            | (Rp.) Realisasi       | (%) Capaian   |            |
| (1)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | (2)              | (3)              | (4)            | (2)                   | (3)                   | (4)           | (5)        |
|                                                                         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                      | 20 Unit          | 20 Unit          | 100%           | 20.290.000            | 16.850.514            | 83,05         |            |
|                                                                         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                               | 10 Unit          | 10 Unit          | 100%           | 83.224.000            | 48.396.481            | 58,15         |            |
| <b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>90%</b>       | <b>100%</b>      | <b>111%</b>    | <b>71.600.754.071</b> | <b>67.281.184.597</b> | <b>93,97</b>  |            |
| <b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | <b>100%</b>    | <b>18.583.715.000</b> | <b>17.983.443.617</b> | <b>96,77</b>  |            |
|                                                                         | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan                                                                                                                                                           | 16 Dokumen       | 16 Dokumen       | 100%           | 496.148.000           | 442.840.213           | 89,26         |            |
|                                                                         | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan                                                                                                                                                          | 15 Dokumen       | 15 Dokumen       | 100%           | 2.524.487.000         | 2.104.192.802         | 83,35         |            |
|                                                                         | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                              | 10 Dokumen       | 10 Dokumen       | 100%           | 15.563.080.000        | 15.436.410.602        | 99,19         |            |
| <b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | <b>100%</b>    | <b>2.762.292.000</b>  | <b>2.395.500.104</b>  | <b>86,72</b>  |            |
|                                                                         | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            | 11 Dokumen       | 11 Dokumen       | 100%           | 1.287.085.000         | 1.057.247.226         | 82,14         |            |
|                                                                         | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 13 Dokumen       | 13 Dokumen       | 100%           | 1.076.860.000         | 983.605.276           | 91,34         |            |
|                                                                         | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang komunikasi, informatika, statistik, perpustakaan, arsip dan perhubungan                                                                                                                                     | 10 Dokumen       | 10 Dokumen       | 100%           | 398.347.000           | 354.647.602           | 89,03         |            |
| <b>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | <b>100%</b>    | <b>50.254.747.071</b> | <b>46.902.240.876</b> | <b>93,33</b>  |            |
|                                                                         | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                                                                                                                                                                                    | 100 Unit         | 100 Unit         | 100%           | 41.052.721.075        | 39.040.396.056        | 95,10         |            |
|                                                                         | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                                                                                                                                                                         | 10 Lembaga       | 10 Lembaga       | 100%           | 9.202.025.996         | 7.861.844.820         | 85,44         |            |
| <b>BIRO HUKUM</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                | <b>5.961.570.000</b>  | <b>5.706.905.642</b>  | <b>95,73</b>  |            |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>83%</b>       | <b>87%</b>       | <b>104,82%</b> | <b>1.830.212.800</b>  | <b>1.705.519.452</b>  | <b>93,19</b>  |            |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 Dokumen</b> | <b>2 Dokumen</b> | <b>100%</b>    | <b>4.410.000</b>      | <b>3.593.500</b>      | <b>81,49</b>  |            |
|                                                                         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                               | 2 Dokumen        | 2 Dokumen        | 100%           | 4.410.000             | 3.593.500             | 81,49         |            |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 Dokumen</b> | <b>1 Dokumen</b> | <b>100%</b>    | <b>103.920.000</b>    | <b>103.920.000</b>    | <b>100,00</b> |            |
|                                                                         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                                              | 12 Dokumen       | 12 Dokumen       | 100%           | 103.920.000           | 103.920.000           | 100,00        |            |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 Dokumen</b> | <b>1 Dokumen</b> | <b>100%</b>    | <b>7.680.000</b>      | <b>7.680.000</b>      | <b>100,00</b> |            |
|                                                                         | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                   | 12 Laporan       | 12 Laporan       | 100%           | 7.680.000             | 7.680.000             | 100,00        |            |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                | Kinerja           |                  |                | Anggaran             |                      |              | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
|                                                                              | Target            | Realisasi        | (%) Capaian    | (Rp.) Pagu           | (Rp.) Realisasi      | (%) Capaian  |            |
| (1)                                                                          | (2)               | (3)              | (4)            | (2)                  | (3)                  | (4)          | (5)        |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             | <b>3 Orang</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>72.000.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  |            |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                | 3 Orang           | 0                | 0              | 72.000.000           | 0                    | 0,00         |            |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>4 Dokumen</b>  | <b>4 Dokumen</b> | <b>100%</b>    | <b>860.811.356</b>   | <b>845.941.000</b>   | <b>98,27</b> |            |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 12 Laporan        | 12 Laporan       | 100%           | 117.391.000          | 117.317.500          | 99,94        |            |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | 701 Kotak         | 393 Kotak        | 56,10%         | 60.952.000           | 55.152.000           | 90,48        |            |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | 12 Bulan          | 12 Bulan         | 100%           | 20.068.200           | 15.990.000           | 79,68        |            |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 40 OT             | 40 OT            | 100%           | 662.400.156          | 657.481.500          | 99,26        |            |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>1 Dokumen</b>  | <b>1 Dokumen</b> | <b>100%</b>    | <b>297.878.500</b>   | <b>271.549.000</b>   | <b>91,16</b> |            |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | 1 Laporan         | 1 Laporan        | 100%           | 297.878.500          | 271.549.000          | 91,16        |            |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>12 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>8,33%</b>   | <b>458.762.944</b>   | <b>448.090.952</b>   | <b>97,67</b> |            |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | 500 Lembar        | 500 Lembar       | 100%           | 5.000.000            | 5.000.000            | 100,00       |            |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | 12 Laporan        | 12 Laporan       | 100%           | 453.762.944          | 443.090.952          | 97,65        |            |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>1 Dokumen</b>  | <b>1 Dokumen</b> | <b>100%</b>    | <b>24.750.000</b>    | <b>24.745.000</b>    | <b>99,98</b> |            |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     | 12 Bulan          | 12 Bulan         | 100%           | 24.750.000           | 24.745.000           | 99,98        |            |
| <b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>                               | <b>100%</b>       | <b>100%</b>      | <b>100%</b>    | <b>4.131.357.200</b> | <b>4.001.386.190</b> | <b>96,85</b> |            |
| <b>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan</b>                              | <b>4 Dokumen</b>  | <b>4 Dokumen</b> | <b>100%</b>    | <b>2.331.304.200</b> | <b>2.219.855.226</b> | <b>95,22</b> |            |
| Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan                                | 80 Dokumen        | 53 Dokumen       | 66,25%         | 754.504.000          | 706.499.738          | 93,64        |            |
| Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan                                 | 600 Dokumen       | 905 Dokumen      | 150,83%        | 308.505.000          | 285.423.983          | 92,52        |            |
| Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya                       | 680 Dokumen       | 958 Dokumen      | 140,89%        | 486.105.200          | 474.691.953          | 97,65        |            |
| Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota                          | 250 Dokumen       | 352 Dokumen      | 140,80%        | 782.190.000          | 753.239.552          | 96,30        |            |
| <b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>                                              | <b>2 Dokumen</b>  | <b>2 Dokumen</b> | <b>100%</b>    | <b>1.800.053.000</b> | <b>1.781.530.964</b> | <b>98,97</b> |            |
| Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                                        | 10 Dokumen        | 10 Dokumen       | 100%           | 1.212.830.000        | 1.206.096.199        | 99,44        |            |
| Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                         | 2 Laporan         | 2 Laporan        | 100%           | 587.223.000          | 575.434.765          | 97,99        |            |
| <b>BIRO PEREKONOMIAN</b>                                                     |                   |                  |                | <b>6.287.126.000</b> | <b>5.401.399.340</b> | <b>85,91</b> |            |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>                   | <b>83%</b>        | <b>87%</b>       | <b>104,82%</b> | <b>1.955.816.000</b> | <b>1.873.422.729</b> | <b>95,79</b> |            |
| <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>       | <b>100%</b>       | <b>100%</b>      | <b>100%</b>    | <b>45.853.000</b>    | <b>36.897.200</b>    | <b>80,47</b> |            |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | 4 Dokumen         | 4 Dokumen        | 100%           | 34.993.000           | 27.957.200           | 79,89        |            |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                            | 4 Dokumen         | 4 Dokumen        | 100%           | 10.860.000           | 8.940.000            | 82,32        |            |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                   | Kinerja          |                  |                | Anggaran             |                      |              | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
|                                                                                                                 | Target           | Realisasi        | (%) Capaian    | (Rp.) Pagu           | (Rp.) Realisasi      | (%) Capaian  |            |
| (1)                                                                                                             | (2)              | (3)              | (4)            | (2)                  | (3)                  | (4)          | (5)        |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>92%</b>       | <b>85,94%</b>    | <b>93,41%</b>  | <b>112.650.000</b>   | <b>106.505.300</b>   | <b>94,55</b> |            |
| Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 12 Laporan       | 12 Laporan       | 100%           | 112.650.000          | 106.505.300          | 94,55        |            |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                   | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | <b>100%</b>    | <b>13.440.000</b>    | <b>12.160.000</b>    | <b>90,48</b> |            |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                     | 1 Laporan        | 1 Laporan        | 100%           | 13.440.000           | 12.160.000           | 90,48        |            |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | <b>100%</b>    | <b>101.200.000</b>   | <b>61.250.000</b>    | <b>60,52</b> |            |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                             | 28 Laporan       | 26 Laporan       | 92,86%         | 1.200.000            | 0                    | 0,00         |            |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 14 Orang         | 9 Orang          | 64,29%         | 100.000.000          | 61.250.000           | 61,25        |            |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | <b>100%</b>    | <b>867.776.000</b>   | <b>862.818.551</b>   | <b>99,43</b> |            |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 12 Laporan       | 12 Laporan       | 100%           | 47.080.000           | 47.004.000           | 99,84        |            |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 600 Porsi        | 540 Porsi        | 90%            | 30.000.000           | 27.000.000           | 90,00        |            |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 12 Laporan       | 12 Laporan       | 100%           | 18.016.000           | 17.559.800           | 97,47        |            |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 12 Laporan       | 12 Laporan       | 100%           | 7.680.000            | 7.680.000            | 100,00       |            |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 153 OT           | 124 OT           | 81,05%         | 765.000.000          | 763.574.751          | 99,81        |            |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | <b>100%</b>    | <b>130.832.000</b>   | <b>130.101.700</b>   | <b>99,44</b> |            |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 1 Laporan        | 1 Laporan        | 100%           | 130.832.000          | 130.101.700          | 99,44        |            |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | <b>100%</b>    | <b>630.050.000</b>   | <b>619.723.018</b>   | <b>98,36</b> |            |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 120 Lembar       | 114 Lembar       | 95%            | 1.320.000            | 1.260.000            | 95,45        |            |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 12 Dokumen       | 12 Dokumen       | 100%           | 628.730.000          | 618.463.018          | 98,37        |            |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | <b>100%</b>    | <b>54.015.000</b>    | <b>43.966.960</b>    | <b>81,40</b> |            |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 Unit           | 1 Unit           | 100%           | 35.765.000           | 25.806.960           | 72,16        |            |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 12 Laporan       | 12 Laporan       | 100%           | 18.250.000           | 18.160.000           | 99,51        |            |
| <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                                                                     | <b>95%</b>       | <b>96,77%</b>    | <b>101,86%</b> | <b>4.331.310.000</b> | <b>3.529.726.613</b> | <b>81,49</b> |            |
| <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>                                                        | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>100%</b>    | <b>840.833.000</b>   | <b>786.867.972</b>   | <b>93,58</b> |            |
| Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                  | 2 Laporan        | 2 Laporan        | 100%           | 511.950.000          | 490.502.390          | 95,81        |            |
| Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                  | 1 Laporan        | 1 Laporan        | 100%           | 328.883.000          | 296.365.582          | 90,11        |            |
| <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>                                                    | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>100%</b>    | <b>1.402.483.000</b> | <b>1.331.207.710</b> | <b>94,92</b> |            |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                   | 6 Laporan        | 6 Laporan        | 100%           | 969.683.000          | 931.439.758          | 96,06        |            |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                    |                                                                                                                                 | Kinerja          |                  |               | Anggaran             |                      |              | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                 | Target           | Realisasi        | (%) Capaian   | (Rp.) Pagu           | (Rp.) Realisasi      | (%) Capaian  |            |
| (1)                                                                              |                                                                                                                                 | (2)              | (3)              | (4)           | (2)                  | (3)                  | (4)          | (5)        |
|                                                                                  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                                               | 2 Laporan        | 2 Laporan        | 100%          | 245.050.000          | 220.120.752          | 89,83        |            |
|                                                                                  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                  | 2 Laporan        | 2 Laporan        | 100%          | 187.750.000          | 179.647.200          | 95,68        |            |
| <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>                        |                                                                                                                                 | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b> | <b>100%</b>   | <b>2.087.994.000</b> | <b>1.411.650.931</b> | <b>67,61</b> |            |
|                                                                                  | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 4 Laporan        | 4 Laporan        | 100%          | 1.596.040.000        | 925.959.580          | 58,02        |            |
|                                                                                  | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | 1 Laporan        | 1 Laporan        | 100%          | 215.508.000          | 208.254.349          | 96,63        |            |
|                                                                                  | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               | 1 Laporan        | 1 Laporan        | 100%          | 276.446.000          | 275.687.002          | 99,73        |            |
| <b>BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>                                            |                                                                                                                                 |                  |                  |               | <b>9.173.798.257</b> | <b>7.570.217.623</b> | <b>82,52</b> |            |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                     |                                                                                                                                 | <b>83</b>        | <b>81,36</b>     | <b>98,02</b>  | <b>3.713.050.857</b> | <b>3.179.727.516</b> | <b>85,64</b> |            |
| <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                                                                                                                                 | <b>3</b>         | <b>1</b>         | <b>33,33</b>  | <b>134.278.000</b>   | <b>120.636.000</b>   | 89,84        |            |
|                                                                                  | Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | 12               | 12               | 100,00        | 134.278.000          | 120.636.000          | 89,84        |            |
| <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |                                                                                                                                 | <b>3</b>         | <b>3</b>         | <b>100,00</b> | <b>514.680.000</b>   | <b>426.102.649</b>   | <b>82,79</b> |            |
|                                                                                  | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut                                                                            | 70               | 70               | 100,00        | 31.500.000           | 29.400.000           | 93,33        |            |
|                                                                                  | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | 34               | 43               | 126,47        | 420.000.000          | 355.302.649          | 84,60        |            |
|                                                                                  | Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                           | 12               | 2                | 16,67         | 63.180.000           | 41.400.000           | 65,53        |            |
| <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                                                                                                                                 | <b>3</b>         | <b>3</b>         | <b>100,00</b> | <b>766.729.500</b>   | <b>687.458.060</b>   | <b>89,66</b> |            |
|                                                                                  | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 36               | 36               | 100,00        | 176.988.000          | 172.753.000          | 97,61        |            |
|                                                                                  | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 50               | 30               | 60,00         | 16.902.500           | 16.732.000           | 98,99        |            |
|                                                                                  | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 70               | 72               | 102,86        | 572.839.000          | 497.973.060          | 86,93        |            |
| <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                                                                                                                                 | <b>1</b>         | <b>1</b>         | <b>100,00</b> | <b>1.057.352.000</b> | <b>926.924.000</b>   | <b>87,66</b> |            |
|                                                                                  | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 96               | 96               | 100,00        | 1.057.352.000        | 926.924.000          | 87,66        |            |
| <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                                                                                                                                 | <b>3</b>         | <b>3</b>         | <b>100,00</b> | <b>1.136.095.357</b> | <b>999.030.307</b>   | <b>87,94</b> |            |
|                                                                                  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 1                | 1                | 100,00        | 5.250.000            | 5.057.000            | 96,32        |            |
|                                                                                  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 12               | 12               | 100,00        | 81.587.600           | 41.602.168           | 50,99        |            |
|                                                                                  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 12               | 12               | 100,00        | 1.049.257.757        | 952.371.139          | 90,77        |            |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                  |                                                                                                                              | Kinerja             |                  |                | Anggaran             |                      |              | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
|                                                                                |                                                                                                                              | Target              | Realisasi        | (%) Capaian    | (Rp.) Pagu           | (Rp.) Realisasi      | (%) Capaian  |            |
| (1)                                                                            |                                                                                                                              | (2)                 | (3)              | (4)            | (2)                  | (3)                  | (4)          | (5)        |
| <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b> |                                                                                                                              | <b>3</b>            | <b>3</b>         | <b>100,00</b>  | <b>103.916.000</b>   | <b>19.576.500</b>    | <b>18,84</b> |            |
|                                                                                | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan                                 | 1                   | 1                | 100,00         | 38.000.000           | 2.750.000            | 7,24         |            |
|                                                                                | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1                   | 0                | 0,00           | 32.216.000           | 0                    | 0,00         |            |
|                                                                                | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 22                  | 17               | 77,27          | 33.700.000           | 16.826.500           | 49,93        |            |
| <b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>               |                                                                                                                              | <b>3 atau (9/9)</b> | <b>(8/9)</b>     | <b>88,89</b>   | <b>5.460.747.400</b> | <b>4.390.490.107</b> | <b>80,40</b> |            |
| <b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                          |                                                                                                                              | <b>3</b>            | <b>3</b>         | <b>100,00</b>  | <b>1.413.404.000</b> | <b>1.085.770.344</b> | <b>76,82</b> |            |
|                                                                                | Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                  | 12                  | 12               | 100,00         | 370.782.000          | 272.599.999          | 73,52        |            |
|                                                                                | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                           | 2                   | 2                | 100,00         | 657.830.000          | 519.957.105          | 79,04        |            |
|                                                                                | Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                               | 2                   | 2                | 100,00         | 384.792.000          | 293.213.240          | 76,20        |            |
| <b>Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>                |                                                                                                                              | <b>3</b>            | <b>3</b>         | <b>100,00</b>  | <b>2.173.728.400</b> | <b>1.838.419.923</b> | <b>84,57</b> |            |
|                                                                                | Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik                                                                  | 700                 | 667              | 95,29          | 1.485.240.400        | 1.258.848.158        | 84,76        |            |
|                                                                                | Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                         | 2                   | 2                | 100,00         | 330.300.000          | 256.669.500          | 77,71        |            |
|                                                                                | Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                 | 4                   | 4                | 100,00         | 358.188.000          | 322.902.265          | 90,15        |            |
| <b>Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>               |                                                                                                                              | <b>3</b>            | <b>3</b>         | <b>100,00</b>  | <b>1.873.615.000</b> | <b>1.466.299.840</b> | <b>78,26</b> |            |
|                                                                                | Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                                                         | 200                 | 292              | 146,00         | 491.440.000          | 462.456.682          | 94,10        |            |
|                                                                                | Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                 | 11                  | 11               | 100,00         | 914.215.000          | 732.556.169          | 80,13        |            |
|                                                                                | Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa                                   | 8                   | 6                | 75,00          | 467.960.000          | 271.286.989          | 57,97        |            |
| <b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>                                           |                                                                                                                              |                     |                  |                | <b>9.229.275.775</b> | <b>8.620.115.806</b> | <b>93,40</b> |            |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                   |                                                                                                                              | <b>83%</b>          | <b>84,03%</b>    | <b>101,24%</b> | <b>3.241.318.543</b> | <b>2.963.808.690</b> | <b>91,44</b> |            |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                                                                                                                              | <b>1 Dokumen</b>    | <b>1 Dokumen</b> | <b>100%</b>    | <b>197.500.000</b>   | <b>197.245.716</b>   | <b>99,87</b> |            |
|                                                                                | Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                             | 12 Laporan          | 12 Laporan       | 100%           | 197.500.000          | 197.245.716          | 99,87        |            |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                                                                                                                              | <b>1 Dokumen</b>    | <b>1 Dokumen</b> | <b>100%</b>    | <b>96.200.000</b>    | <b>64.906.437</b>    | <b>67,47</b> |            |
|                                                                                | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                       | 33 Stel             | 33 Stel          | 100%           | 15.000.000           | 14.835.150           | 98,90        |            |
|                                                                                | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                | 10 Laporan          | 10 Laporan       | 100%           | 69.600.000           | 41.777.287           | 60,02        |            |
|                                                                                | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                     | 12 Laporan          | 12 Laporan       | 100%           | 11.600.000           | 8.294.000            | 71,50        |            |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                                                                                                                              | <b>3 Dokumen</b>    | <b>3 Dokumen</b> | <b>100%</b>    | <b>1.601.012.223</b> | <b>1.502.597.487</b> | <b>93,85</b> |            |
|                                                                                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                 | 32 Unit             | 32 Unit          | 100%           | 719.392.000          | 656.486.130          | 91,26        |            |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                                                          | Kinerja          |                  |                | Anggaran             |                      |               | Keterangan |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|
|                               |                                                                                                          | Target           | Realisasi        | (%) Capaian    | (Rp.) Pagu           | (Rp.) Realisasi      | (%) Capaian   |            |
| (1)                           |                                                                                                          | (2)              | (3)              | (4)            | (2)                  | (3)                  | (4)           | (5)        |
|                               | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                  | 10 Buku          | 10 Buku          | 100%           | 6.781.843            | 6.170.000            | 90,98         |            |
|                               | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                     | 15 Laporan       | 15 Laporan       | 100%           | 874.838.380          | 839.941.357          | 96,01         |            |
|                               | <b>Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                              | <b>3 Dokumen</b> | <b>3 Dokumen</b> | <b>100%</b>    | <b>1.131.052.320</b> | <b>1.092.627.957</b> | <b>96,60</b>  |            |
|                               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                           | 12 Laporan       | 12 Laporan       | 100%           | 33.000.000           | 32.119.707           | 97,33         |            |
|                               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                  | 12 Bulan         | 12 Bulan         | 100%           | 37.795.800           | 32.687.890           | 86,49         |            |
|                               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                    | 25 Orang         | 25 Orang         | 100%           | 1.060.256.520        | 1.027.820.360        | 96,94         |            |
|                               | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                             | <b>30 Unit</b>   | <b>30 Unit</b>   | <b>100%</b>    | <b>215.554.000</b>   | <b>106.431.093</b>   | <b>49,38</b>  |            |
|                               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan                          | 1 Unit           | 1 Unit           | 100%           | 40.562.000           | 34.747.251           | 85,66         |            |
|                               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3 Unit           | 3 Unit           | 100%           | 121.482.000          | 20.800.592           | 17,12         |            |
|                               | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                 | 30 Unit          | 30 Unit          | 100%           | 53.510.000           | 50.883.250           | 95,09         |            |
|                               | <b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>                                                        |                  |                  |                | <b>5.987.957.232</b> | <b>5.656.307.116</b> | <b>94,46</b>  |            |
|                               | <b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>                                          | <b>3 Dokumen</b> | <b>3 Dokumen</b> | <b>100%</b>    | <b>4.325.257.232</b> | <b>4.133.369.767</b> | <b>95,56</b>  |            |
|                               | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                                   | 12 Laporan       | 12 Laporan       | 100%           | 663.074.000          | 528.764.652          | 79,74         |            |
|                               | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                                   | 12 Laporan       | 12 Laporan       | 100%           | 476.500.000          | 467.235.449          | 98,06         |            |
|                               | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                                | 12 Laporan       | 12 Laporan       | 100%           | 3.185.683.232        | 3.137.369.666        | 98,48         |            |
|                               | <b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>                                                          | <b>3 Dokumen</b> | <b>3 Dokumen</b> | <b>100%</b>    | <b>1.662.700.000</b> | <b>1.522.937.349</b> | <b>91,59</b>  |            |
|                               | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah                                                              | 4 Dokumen        | 4 Dokumen        | 100%           | 400.100.000          | 374.473.404          | 93,59         |            |
|                               | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                 | 12 Laporan       | 12 Laporan       | 100%           | 899.800.000          | 861.295.732          | 95,72         |            |
|                               | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                                                 | 1 Dokumen        | 1 Dokumen        | 100%           | 362.800.000          | 287.168.213          | 79,15         |            |
|                               | <b>BIRO ORGANISASI</b>                                                                                   |                  |                  |                | <b>5.293.530.000</b> | <b>4.765.691.402</b> | <b>90,03</b>  |            |
|                               | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                             | <b>83%</b>       | <b>90,16%</b>    | <b>108,63%</b> | <b>1.636.551.000</b> | <b>1.379.054.089</b> | <b>84,27</b>  |            |
|                               | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                            | <b>92%</b>       | <b>90,03%</b>    | <b>97,86%</b>  | <b>100.395.000</b>   | <b>86.888.000</b>    | <b>86,55</b>  |            |
|                               | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                         | 12 Laporan       | 12 Laporan       | 100%           | 100.395.000          | 86.888.000           | 86,55         |            |
|                               | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                            | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | <b>100%</b>    | <b>9.240.000</b>     | <b>9.240.000</b>     | <b>100,00</b> |            |
|                               | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                              | 1 Laporan        | 1 Laporan        | 100%           | 9.240.000            | 9.240.000            | 100,00        |            |
|                               | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                         | <b>100%</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>8.040.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   |            |
|                               | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                            | 7 Orang          | 0                | 0              | 8.040.000            | 0                    | 0,00          |            |
|                               | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                | <b>100%</b>      | <b>92%</b>       | <b>92%</b>     | <b>888.376.000</b>   | <b>710.633.296</b>   | <b>79,32</b>  |            |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                |                                                                                                                 | Kinerja            |             |             | Anggaran               |                        |              | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|--------------|------------|
|                                                                              |                                                                                                                 | Target             | Realisasi   | (%) Capaian | (Rp.) Pagu             | (Rp.) Realisasi        | (%) Capaian  |            |
| (1)                                                                          |                                                                                                                 | (2)                | (3)         | (4)         | (2)                    | (3)                    | (4)          | (5)        |
|                                                                              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 12 Laporan         | 12 Laporan  | 100%        | 73.694.000             | 24.842.500             | 33,71        |            |
|                                                                              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 1580 Porsi         | 1500 Porsi  | 94,94%      | 290.839.000            | 189.960.000            | 63,25        |            |
|                                                                              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 12 Bulan           | 12 Bulan    | 100%        | 38.943.000             | 16.881.000             | 43,35        |            |
|                                                                              | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 95 Orang           | 8 Orang     | 8,42%       | 7.900.000              | 5.490.000              | 69,49        |            |
|                                                                              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 164 OT             | 160 OT      | 97,56%      | 477.000.000            | 473.459.796            | 99,26        |            |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                                                                                                                 | <b>100%</b>        | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>256.366.500</b>     | <b>246.783.375</b>     | <b>96,26</b> |            |
|                                                                              | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 10 Unit            | 16 Unit     | 160%        | 256.366.500            | 246.783.375            | 96,26        |            |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                                                                                                                 | <b>100%</b>        | <b>95%</b>  | <b>95%</b>  | <b>328.673.500</b>     | <b>325.273.056</b>     | <b>98,97</b> |            |
|                                                                              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 1 Dokumen          | 1 Dokumen   | 100%        | 500.000                | 0                      | 0,00         |            |
|                                                                              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 12 Dokumen         | 12 Dokumen  | 100%        | 328.173.500            | 325.273.056            | 99,12        |            |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                                                                                 | <b>100%</b>        | <b>50%</b>  | <b>50%</b>  | <b>45.460.000</b>      | <b>6.236.362</b>       | <b>13,72</b> |            |
|                                                                              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12 Unit            | 3 Unit      | 25%         | 7.500.000              | 4.776.362              | 63,68        |            |
|                                                                              | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 20 Unit            | 3 Unit      | 15%         | 37.960.000             | 1.460.000              | 3,85         |            |
| <b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>                                           |                                                                                                                 |                    |             |             | <b>3.656.979.000</b>   | <b>3.386.637.313</b>   | <b>92,61</b> |            |
| <b>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>                           |                                                                                                                 | <b>42 (Indeks)</b> |             |             | <b>1.556.841.000</b>   | <b>1.486.994.394</b>   | <b>95,51</b> |            |
|                                                                              | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                                                                        | 37 PD              | 34 PD       | 91,90%      | 733.250.000            | 707.581.399            | 96,50        |            |
|                                                                              | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                                                  | 10 Kab/Kota        | 10 Kab/Kota | 100%        | 404.191.000            | 373.349.454            | 92,37        |            |
|                                                                              | Penataan Analisis Jabatan                                                                                       | 10 Kab/Kota        | 10 Kab/Kota | 100%        | 419.400.000            | 406.063.541            | 96,82        |            |
| <b>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>              |                                                                                                                 | <b>65 (Nilai)</b>  |             |             | <b>2.100.138.000</b>   | <b>1.899.642.919</b>   | <b>90,45</b> |            |
|                                                                              | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                                                       | 1 Dokumen          | 1 Dokumen   | 100%        | 585.362.000            | 540.862.431            | 92,40        |            |
|                                                                              | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                                                   | 1 Dokumen          | 1 Dokumen   | 100%        | 623.070.000            | 599.710.844            | 96,25        |            |
|                                                                              | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                                                               | 37 PD              | 37 PD       | 100%        | 145.998.000            | 134.256.837            | 91,96        |            |
|                                                                              | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                                                                            | 1 Dokumen          | 1 Dokumen   | 100%        | 295.340.000            | 236.613.145            | 80,12        |            |
|                                                                              | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                                                                         | 1 Dokumen          | 1 Dokumen   | 100%        | 450.368.000            | 388.199.662            | 86,20        |            |
| <b>BIRO UMUM</b>                                                             |                                                                                                                 |                    |             |             | <b>207.846.129.681</b> | <b>174.371.413.579</b> | <b>83,89</b> |            |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                 |                                                                                                                 |                    |             |             | <b>207.846.129.681</b> | <b>174.371.413.579</b> | <b>83,89</b> |            |
| <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                       |                                                                                                                 | <b>100%</b>        | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>82.012.215.553</b>  | <b>65.687.184.587</b>  | <b>80,09</b> |            |
|                                                                              | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 14 Dokumen         | 14 Dokumen  | 100%        | 80.374.761.553         | 64.364.671.879         | 80,08        |            |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                         |                                                                                     | Kinerja     |             |             | Anggaran              |                       |              | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
|                                                                                       |                                                                                     | Target      | Realisasi   | (%) Capaian | (Rp.) Pagu            | (Rp.) Realisasi       | (%) Capaian  |            |
| (1)                                                                                   |                                                                                     | (2)         | (3)         | (4)         | (2)                   | (3)                   | (4)          | (5)        |
|                                                                                       | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD       | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | 100%        | 1.637.454.000         | 1.322.512.708         | 80,77        |            |
| <b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                |                                                                                     | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>689.700.000</b>    | <b>666.878.458</b>    | <b>96,69</b> |            |
|                                                                                       | Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD  | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 100%        | 689.700.000           | 666.878.458           | 96,69        |            |
| <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             |                                                                                     | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>2.748.706.000</b>  | <b>2.399.980.268</b>  | <b>87,31</b> |            |
|                                                                                       | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                 | 400 Stel    | 400 Stel    | 100%        | 521.910.000           | 521.553.000           | 99,93        |            |
|                                                                                       | Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                      | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 100%        | 1.569.216.000         | 1.437.727.268         | 91,62        |            |
|                                                                                       | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | 3 Laporan   | 3 Laporan   | 100%        | 657.580.000           | 440.700.000           | 67,02        |            |
| <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    |                                                                                     | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>24.855.831.402</b> | <b>22.489.581.281</b> | <b>90,48</b> |            |
|                                                                                       | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 15 Jenis    | 15 Jenis    | 100%        | 581.303.100           | 548.842.220           | 94,42        |            |
|                                                                                       | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 100%        | 700.478.000           | 499.330.000           | 71,28        |            |
|                                                                                       | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 100%        | 6.782.575.000         | 5.240.549.400         | 77,26        |            |
|                                                                                       | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 5 Jenis     | 5 Jenis     | 100%        | 761.300.000           | 718.703.000           | 94,40        |            |
|                                                                                       | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 100%        | 15.066.732.541        | 14.640.435.961        | 97,17        |            |
|                                                                                       | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 100%        | 598.040.961           | 504.749.200           | 84,40        |            |
|                                                                                       | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 3 Aplikasi  | 3 Aplikasi  | 100%        | 365.401.800           | 336.971.500           | 92,22        |            |
| <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                                                                                     | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>26.312.783.285</b> | <b>19.665.150.241</b> | <b>74,74</b> |            |
|                                                                                       | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | 66 Unit     | 66 Unit     | 100%        | 23.476.886.000        | 17.174.662.076        | 73,16        |            |
|                                                                                       | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | 10 Jenis    | 10 Jenis    | 100%        | 2.835.897.285         | 2.490.488.165         | 87,82        |            |
| <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                                                                                     | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>25.626.390.916</b> | <b>22.938.449.719</b> | <b>89,51</b> |            |
|                                                                                       | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 2100 Lembar | 2100 Lembar | 100%        | 65.000.000            | 44.664.300            | 68,71        |            |
|                                                                                       | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 100%        | 10.260.500.000        | 9.267.719.228         | 90,32        |            |
|                                                                                       | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 100%        | 15.300.890.916        | 13.626.066.191        | 89,05        |            |
| <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                                                     | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>18.681.442.237</b> | <b>16.692.973.709</b> | <b>89,36</b> |            |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                               |                                                                                                                              | Kinerja     |             |               | Anggaran              |                       |              | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
|                                                                                             |                                                                                                                              | Target      | Realisasi   | (%) Capaian   | (Rp.) Pagu            | (Rp.) Realisasi       | (%) Capaian  |            |
| (1)                                                                                         |                                                                                                                              | (2)         | (3)         | (4)           | (2)                   | (3)                   | (4)          | (5)        |
|                                                                                             | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 223 Unit    | 223 Unit    | 100%          | 7.858.561.060         | 6.620.185.025         | 84,24        |            |
|                                                                                             | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 12 Unit     | 12 Unit     | 100%          | 9.875.661.177         | 9.174.170.484         | 92,90        |            |
|                                                                                             | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 154 Unit    | 154 Unit    | 100%          | 947.220.000           | 898.618.200           | 94,87        |            |
| <b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b> |                                                                                                                              | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b>   | <b>10.828.818.788</b> | <b>10.820.350.440</b> | <b>99,92</b> |            |
|                                                                                             | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                             | 2 Laporan   | 2 Laporan   | 100%          | 10.828.818.788        | 10.820.350.440        | 99,92        |            |
| <b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                |                                                                                                                              | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b>   | <b>16.090.241.500</b> | <b>13.010.864.876</b> | <b>80,86</b> |            |
|                                                                                             | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                 | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 100%          | 4.799.385.800         | 3.477.484.142         | 72,46        |            |
|                                                                                             | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                           | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 100%          | 5.703.167.200         | 4.335.616.107         | 76,02        |            |
|                                                                                             | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                                            | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 100%          | 5.587.688.500         | 5.197.764.627         | 93,02        |            |
| <b>BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN</b>                                                           |                                                                                                                              |             |             |               | <b>12.612.242.053</b> | <b>12.302.625.569</b> | <b>97,55</b> |            |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                |                                                                                                                              | <b>85</b>   | <b>27</b>   | <b>31,76</b>  | <b>12.612.242.053</b> | <b>12.302.625.569</b> | <b>97,55</b> |            |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                     |                                                                                                                              | <b>5</b>    | <b>2</b>    | <b>40,00</b>  | <b>639.659.000</b>    | <b>622.629.846</b>    | <b>97,34</b> |            |
|                                                                                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                              | 5           | 2           | 40,00         | 506.458.000           | 493.128.646           | 97,37        |            |
|                                                                                             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                            | 2           | 1           | 50,00         | 133.201.000           | 129.501.200           | 97,22        |            |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                               |                                                                                                                              | <b>12</b>   | <b>3</b>    | <b>25,00</b>  | <b>253.920.000</b>    | <b>231.360.000</b>    | <b>91,12</b> |            |
|                                                                                             | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                | 12          | 3           | 25,00         | 253.920.000           | 231.360.000           | 91,12        |            |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                            |                                                                                                                              | <b>20</b>   | <b>20</b>   | <b>100,00</b> | <b>697.054.971</b>    | <b>580.557.877</b>    | <b>83,29</b> |            |
|                                                                                             | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                            | 5           | 1           | 20,00         | 404.372.000           | 344.897.071           | 85,29        |            |
|                                                                                             | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                | 20          | 20          | 100,00        | 292.682.971           | 235.660.806           | 80,52        |            |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                   |                                                                                                                              | <b>150</b>  | <b>35</b>   | <b>23,33</b>  | <b>886.038.350</b>    | <b>864.188.669</b>    | <b>97,53</b> |            |
|                                                                                             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                 | 150         | 35          | 23,33         | 128.725.350           | 111.036.435           | 86,26        |            |
|                                                                                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                             | 50          | 5           | 10,00         | 15.048.000            | 15.048.000            | 100,00       |            |
|                                                                                             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                      | 15          | 2           | 13,33         | 25.865.000            | 25.845.700            | 99,93        |            |
|                                                                                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                         | 150         | 35          | 23,33         | 716.400.000           | 712.258.534           | 99,42        |            |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                |                                                                                                                              | <b>10</b>   | <b>2</b>    | <b>20,00</b>  | <b>68.173.000</b>     | <b>48.994.091</b>     | <b>71,87</b> |            |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                           |                                                                                                                    | Kinerja   |           |               | Anggaran             |                      |              | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
|                                                                         |                                                                                                                    | Target    | Realisasi | (%) Capaian   | (Rp.) Pagu           | (Rp.) Realisasi      | (%) Capaian  |            |
| (1)                                                                     |                                                                                                                    | (2)       | (3)       | (4)           | (2)                  | (3)                  | (4)          | (5)        |
|                                                                         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 5         | 2         | 40,00         | 40.703.000           | 22.838.241           | 56,11        |            |
|                                                                         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 10        | 2         | 20,00         | 27.470.000           | 26.155.850           | 95,22        |            |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                                                                                                                    | <b>12</b> | <b>3</b>  | <b>25,00</b>  | <b>1.524.477.232</b> | <b>1.464.118.665</b> | <b>96,04</b> |            |
|                                                                         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 12        | 3         | 25,00         | 25.700.400           | 9.891.015            | 38,49        |            |
|                                                                         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 12        | 3         | 25,00         | 1.498.776.832        | 1.454.227.650        | 97,03        |            |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                                                                                                                    | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>100,00</b> | <b>680.329.500</b>   | <b>676.757.539</b>   | <b>99,47</b> |            |
|                                                                         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 20        | 20        | 100,00        | 680.329.500          | 676.757.539          | 99,47        |            |
| <b>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>                        |                                                                                                                    | <b>12</b> | <b>3</b>  | <b>25,00</b>  | <b>6.078.676.000</b> | <b>6.033.569.472</b> | <b>99,26</b> |            |
|                                                                         | Penyiapan Materi Pimpinan                                                                                          | 12        | 3         | 25,00         | 354.903.000          | 352.885.806          | 99,43        |            |
|                                                                         | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                     | 6         | 1         | 16,67         | 3.214.286.000        | 3.212.314.876        | 99,94        |            |
|                                                                         | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                                                                   | 12        | 3         | 25,00         | 2.509.487.000        | 2.468.368.790        | 98,36        |            |
| <b>Fasilitasi Keprotokolan</b>                                          |                                                                                                                    | <b>12</b> | <b>3</b>  | <b>25,00</b>  | <b>1.783.914.000</b> | <b>1.780.449.410</b> | <b>99,81</b> |            |
|                                                                         | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                                                                        | 12        | 2         | 16,67         | 757.020.000          | 754.512.652          | 99,67        |            |
|                                                                         | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                    | 6         | 1         | 16,67         | 648.150.000          | 647.783.620          | 99,94        |            |
|                                                                         | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                                                                  | 12        | 3         | 25,00         | 378.744.000          | 378.153.138          | 99,84        |            |

Sumber: Data Biro-biro tahun 2022 diolah

## BAB IV PENUTUP

---

Penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Setda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Setda Prov. Kaltim Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pencapaian program kerja dan keberhasilan pencapaian sasarnya, yang menggambarkan hasil kinerja selama satu tahun. Penyusunan LKjIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada BAB III, maka dapat disampaikan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena hampir seluruh target sasaran yang ditetapkan telah dicapai sesuai harapan.

Dari 4 (empat) sasaran yang terbagi kedalam 12 (dua belas) indikator kinerja, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang mempunyai capaian melebihi 100% dan 3 (tiga) indikator kinerja diatas 85% yang belum mencapai 100%. Ketiga indikator kinerja tersebut adalah:

1. Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dengan persentase capaian kinerja 99,62%. Hal ini dikarenakan skor EKPPD tahun 2019 s.d 2021 belum ditetapkan Kepmendagri dan hasil EPPD terhadap LPPD 2019, 2020 dan 2021 masih menunggu evaluasi dari Badan Hukum Independen dalam hal ini Tim Kemitraan Kemendagri.
2. Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan persentase 97,30%. Hal ini dikarenakan beberapa usulan kerja sama tidak dapat ditindaklanjuti yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:
  - Tidak tersedianya lahan yang menjadi kebutuhan kerja sama;
  - Tidak sepakatnya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten/Kota untuk melakukan kerja sama karena tidak sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
  - Tidak lengkapnya permohonan kerja sama yang diusulkan.

3. Indeks Tata Kelola Pengadaan dengan persentase 85,73%. Hal ini dikarenakan:

- Terdapat 1 (satu) variabel yang belum terpenuhi yaitu Manajemen Penyedia dikarenakan bukti dukung yang disampaikan belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LKPP;
- Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- Sering terjadinya keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pelayanan;
- Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah belum semuanya dilakukan secara elektronik sehingga kesulitan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Akan dilakukan upaya guna memperbaiki kinerja tersebut dengan melakukan kembali sosialisasi aturan yang berlaku, asistensi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2022. Dengan tersusunnya LKjIP Setda Prov. Kaltim Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan bahan pertimbangan/evaluasi dalam pelaksanaan kinerja Setda Prov. Kaltim yang akan datang.

**LAMPIRAN**



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

## KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100 /K. 122 /2022

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN  
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan dalam Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 melalui Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007

Ditetapkan di Samarinda.  
pada tanggal 17 Februari 2022  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd  
ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 100/K. 122/ 2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN  
KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

---

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN  
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pembina : 1. Gubernur Kalimantan Timur  
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
3. Unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
4. Unsur Kementerian Dalam Negeri
- Ketua : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Unsur Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur  
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
3. Unsur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
4. Unsur Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
5. Unsur Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
6. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
7. Unsur Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
8. Unsur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
9. Unsur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

10. Unsur Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11. Unsur Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 050 /0692 /B.Adpim-I**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah

**Berani Untuk Kaltim Berdaulat**

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 18).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas Menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkan  
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Tahun Anggaran 2022 Provinsi Kalimantan Timur Biro  
Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan  
Timur;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Samarinda, 31 Januari 2022

Sekretaris Daerah,  
  
Muhammad Sa'bani  
Pembina Utama  
NIP. 19620128 198803 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR: 050 / 0692 /B.Adpim-I TENTANG TIM  
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN PETA PROSES  
BISNIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR

---

Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Wakil Ketua : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Anggota : 1. M. Aditya Rahman, S.ST., M.Si. (Analisis Perencanaan)  
2. Eduardo Heyko, M.Si. (Analisis Perencanaan dan Pelaporan)  
3. Dita Shafrina, B.Sc. (Pengelola Data Perencanaan)  
4. Khairina Zulfathana Mahmuda, S.Mat. (Pengelola Data Perencanaan)  
5. Staf Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

Samarinda, 31 Januari 2022

Sekretaris Daerah,  
  
Muhammad Sa'bani  
Pembina Utama

NIP. 19620128 198803 1 005



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 050 / 971 / B. Adpim-I**

**TENTANG**

**TIM ASISTENSI / COACHING CLINIC LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan asistensi / *coaching clinic* agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan dimaksud maka dipandang perlu membentuk Tim asistensi / *Coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- c. Bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsinya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim Asistensi / *coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan

Kalimantan Timur (Lembar Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Asistensi / *Coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Asistensi / *Coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, melaksanakan :
- Melakukan fasilitasi, koordinasi, pendampingan dan arahan-arahan serta konsultasi dalam rangka kegiatan asistensi / *Coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim asistensi / *Coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Samarinda  
Pada tanggal : Februari 2022

  
**Pj. Sekretaris Daerah,**  
  
**Ir. Riza Indra Riadi, M. Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP 196410281990031009**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 050/ 971 /B.Adpim-I  
TENTANG TIM ASISTENSI / COACHING CLINIC LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

---  
SUSUNAN PERSONIL TIM TIM ASISTENSI / COACHING  
CLINIC LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2022  
---

Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Wakil Ketua : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Anggota : 1. M. Aditya Rahman, S.ST., M.Si. (Analisis Perencanaan)  
2. Eduardo Heyko, M.Si. (Analisis Perencanaan dan Pelaporan)  
3. Dita Shafrina, B.Sc. (Pengelola Data Perencanaan)  
4. Khairina Zulfathana Mahmuda, S.Mat. (Pengelola Data Perencanaan)  
5. Staf Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan : Samarinda  
Pada tanggal : 21 Februari 2022

  
Pj. Sekretaris Daerah,

Ir. Riza Indra Riadi, M. Si  
Pembina Utama Madya  
NIP 196410281990031009



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA, TELEPON : (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 - 742111

Website : <http://kaltimprov.go.id>

SAMARINDA 75121

Samarinda, 03 Januari 2023

Kepada

Nomor : 066/0040 /B.Org-RB  
Sifat : Penting  
Lampiran : 3 (tiga) lembar  
Hal : Penyampaian Dokumen  
SAKIP Tahun 2023.

Yth. (Daftar Perangkat Daerah terlampir)

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bentuk komitmen pelaksanaan manajemen kinerja Pemerintahan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta mendukung penerapan SAKIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui upload data pada website : [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id) serta mengisi aplikasi E-SAKIP Kaltim sebagai sarana monitoring kinerja oleh Pimpinan dan Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Sehubungan hal di atas, kepada Kepala Perangkat Daerah diminta untuk :
  - a. Membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022;
  - b. Membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
  - c. Menugaskan pejabat yang menangani SAKIP untuk :
    - Melakukan upload data terkait SAKIP ke website : [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id)
    - Melakukan pengisian aplikasi E-SAKIP Kaltim secara lengkap sesuai format aplikasi
  - d. Melakukan monitoring capaian kinerja dan anggaran per triwulan melalui aplikasi E-SAKIP Kaltim;
  - e. Ketentuan penyusunan LKjIP Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, upload data ke website : [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id) dan pengisian aplikasi E-SAKIP Kaltim sebagaimana terlampir.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 disampaikan paling lambat pada **hari Selasa Tanggal 28 Februari 2023** sebanyak 1 (satu) rangkap dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disampaikan **paling lambat 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023** ditetapkan sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Biro Organisasi Setda. Prov. Kaltim dalam bentuk *hard copy*.
4. Sistematika dan Format Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat di unduh pada alamat : <https://bit.ly/formatSAKIP2023>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Daerah,

Dra. Sri Wahyuni, M.P.P.  
Pembina Utama Madya

NIP. 19701229 199003 2 003

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor : 066/0040/B.Org-RB  
Tanggal : 03 Januari 2023  
Hal : Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2023

**A. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022:**

- a. LKjIP Tahun 2022 dibuat sesuai format dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- b. Tim penyusun LKjIP di Perangkat Daerah wajib memuat data dukung yang valid atas capaian kinerja utama Perangkat Daerah pada lampiran LKjIP tahun 2022

**B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023:**

- a. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dibuat dengan memperhatikan RPJMD, Renstra dan Renja/RKT Tahun 2023
- b. Pejabat eselon IV yang telah disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Pelaksana tidak perlu membuat Perjanjian Kinerja, namun cukup membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada awal tahun yang mengacu / selaras dengan cascading kinerja PD

**C. Upload data ke website : [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id)**

- a. Ketentuan upload dokumen :

| No | Jenis Dokumen             | Batas Upload                                                                        | Upload pada menu |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Renstra                   | (Jika ada perubahan)                                                                | Renstra          |
| 2  | IKU                       | (Jika ada perubahan)                                                                | IKU              |
| 3  | Renja / RKT               | 1 (satu) minggu setelah ditetapkan / paling lambat pada 31 Maret 2023               | Lainnya          |
| 4  | Perjanjian Kinerja        | 1 (satu) minggu setelah ditanda tangani Gubernur / paling lambat pada 31 Maret 2023 | PK               |
| 5  | Rencana Aksi              | 31 Maret 2023                                                                       | Lainnya          |
| 6  | Laporan Kinerja           | 31 Maret 2023                                                                       | Laporan Kinerja  |
| 7  | DPA                       | 1 (satu) minggu setelah ditetapkan / paling lambat pada 31 Maret 2023               | Lainnya          |
| 8  | LHE AKIP dari Inspektorat | 1 (satu) minggu setelah diterima / paling lambat pada 31 Maret 2023                 | Lainnya          |

- b. Dokumen yang diupload menggunakan format : (jenis dokumen)\_(perangkat daerah)\_(tahun). Contoh : **DPA\_BKD\_2023**
- c. Pastikan dokumen yang diupload telah **ditanda tangani** Pejabat yang berwenang dan **di scan secara rapi dan baik**.

#### D. Pengisian E-SAKIP Kaltim

##### a. Realisasi RPJMD 2022

Perangkat daerah yang terkait langsung dengan capaian RPJMD (pada menu RPJMD→Realisasi RPJMD) mengisi :

- Realisasi sampai dengan triwulan 4
  - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja dengan memuat informasi sebagai berikut :
    - Deskripsi Indikator Kinerja
    - Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ ) / Faktor penyebab Kegagalan Capaian Kinerja (Jika capaian kinerja  $<100\%$ )
    - Permasalahan yang dihadapi
    - Solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah
    - Upaya perbaikan pada tahun berikutnya
  - Contoh pengisian analisis dapat dilihat pada <https://bit.ly/formatSAKIP2023>
  - Melampirkan softcopy data dukung capaian kinerja (diupload pada file pendukung)
- b. Seluruh Perangkat Daerah menginput pada menu Realisasi Kinerja (pada kolom realisasi, analisa dan rencana aksi) serta menu Anggaran untuk tahun 2023 yang dilakukan setiap tanggal 1 s.d tanggal 10 pada triwulan berikutnya dengan waktu penginputan sebagai berikut:
- Inputan triwulan 1 pada tgl 1-10 April 2023
  - Inputan triwulan 2 pada tgl 1-10 Juli 2023
  - Inputan triwulan 3 pada tgl 1-10 Oktober 2023
  - Inputan triwulan 4 pada tgl 1-10 Januari 2024
- c. Seluruh Perangkat Daerah menyampaikan hasil inputan realisasi kinerja **Kepala Perangkat Daerah** (JPT saja) per triwulan dalam bentuk *hard copy* kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Biro Organisasi Setda. Prov. Kaltim paling lambat **setiap tanggal 10 pada triwulan berikutnya**.



Sekretaris Daerah,

Dra. Sri Wahyuni, M.PP.  
Pembina Utama Madya

NIP. 19701229 199003 2 003

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 066/0040/B.Org-RB

Tanggal : 03 Januari 2023

Hal : Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2023.

Daftar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur :

1. Sekretariat Daerah Prov. Kaltim
  - 1.1 Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Prov. Kaltim
2. Sekretaris DPRD Prov. Kaltim
3. Inspektur Prov. Kaltim
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim
5. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltim
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim
7. Kepala Dinas Sosial Prov. Kaltim
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim
9. Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim
10. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kaltim
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim
13. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prov. Kaltim
16. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
17. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim
18. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim
19. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim
20. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim
21. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kaltim
22. Kepala Dinas Pariwisata Prov. Kaltim
23. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim
24. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
25. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltim
26. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim
27. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim
28. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim
29. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim
30. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kaltim
31. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim
32. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kaltim
33. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim
34. Kepala Badan Penghubung Prov. Kaltim
35. Direktur RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Prov. Kaltim
36. Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Prov. Kaltim
37. Direktur RSJD Atma Husada Mahakam Prov. Kaltim

## OUTLINE PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Halaman

Kata Pengantar  
Ikhtisar Eksekutif  
Daftar Isi  
Daftar Tabel  
Daftar Lampiran

### I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pembentukan Organisasi
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia (ada non pns)
- E. Aspek Strategis Organisasi
- F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- G. Sarana dan Prasana Kerja

### II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya
- B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi
- C. Analisis Capaian Kinerja
- D. Capaian Kinerja lainnya (bila ada) (Misalnya Pencapaian Target MDGs atau SDGs Lingkungan Hidup)
- E. Realisasi Anggaran

### IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran

1. Lain-lain yang dianggap perlu Seperti : Rencana Aksi Pertriwulan, Cascading Kinerja.

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Dasar Pembentukan Organisasi  
Pada sub bab ini disajikan dasar pembentukan organisasi masing-masing perangkat daerah
- B. Tugas dan Fungsi  
Pada sub bab ini disajikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- C. Struktur Organisasi  
Pada sub bab ini disajikan penjelasan singkat dan Struktur Organisasi
- D. Sumber Daya Aparatur  
Pada sub bab ini disajikan penjelasan singkat sumber daya aparatur dan grafik jumlah pengawai berdasarkan jenis kelamin, golongan, pendidikan serta jabatan.

| Jabatan             | Jenis Kelamin |           | Golongan |     |    |   | Pendidikan    |         |      |      |      |    |
|---------------------|---------------|-----------|----------|-----|----|---|---------------|---------|------|------|------|----|
|                     | Laki-Laki     | Perempuan | IV       | III | II | I | Pasca Sarjana | Sarjana | Dipl | SLTA | SLTP | SD |
| Kepala Dinas        |               |           |          |     |    |   |               |         |      |      |      |    |
| Sekretaris          |               |           |          |     |    |   |               |         |      |      |      |    |
|                     |               |           |          |     |    |   |               |         |      |      |      |    |
|                     |               |           |          |     |    |   |               |         |      |      |      |    |
|                     |               |           |          |     |    |   |               |         |      |      |      |    |
|                     |               |           |          |     |    |   |               |         |      |      |      |    |
|                     |               |           |          |     |    |   |               |         |      |      |      |    |
| Jlh PNS             |               |           |          |     |    |   |               |         |      |      |      |    |
| Jlh Honor/PTT       |               |           |          |     |    |   |               |         |      |      |      |    |
| Jlh PNS + Honor/PTT |               |           |          |     |    |   |               |         |      |      |      |    |
|                     |               |           |          |     |    |   |               |         |      |      |      |    |
| Jumlah              |               |           |          |     |    |   |               |         |      |      |      |    |

- E. Aspek Strategis Organisasi  
Pada sub bab ini disajikan aspek strategis Perangkat Daerah dalam mendukung visi dan misi
- F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)  
Pada sub bab ini disajikan permasalahan utama yang dihadapi perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi
- G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah  
Pada sub bab ini disajikan secara singkat Sarana dan Prasarana Kerja perangkat daerah per 31 Desember 2020  
Contoh:

| No. | Uraian  | Banyaknya  | Satuan                            |
|-----|---------|------------|-----------------------------------|
| 1   | 2       | 3          | 4                                 |
| 1   | Tanah   | 3.370      | m <sup>2</sup>                    |
| 2   | Gedung  | 2<br>2.048 | Unit (2 Lantai)<br>m <sup>2</sup> |
| 3   | Listrik | 3          | Jaringan                          |

|    |             |   |              |
|----|-------------|---|--------------|
| 4  | Air         | 2 | Jaringan     |
| 5  | Telepon     | 4 | Line (1 Fax) |
| 6  | Area Parkir | 3 | Area         |
| 7  | Ruang Rapat | 2 | Ruang        |
| 8  | Ruang Arsip | 1 | Ruang        |
| 9  | Koperasi    | 1 | Buah         |
| 10 | Taman Dalam | 1 | Area         |

**BAB II. PERENCANAN KINERJA**

**A. Perencanaan Strategis**

Pada sub bab ini disajikan secara singkat poin-point penting dalam rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi serta penyajian IKU.  
(Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indiakto Kinerja, Strategi, Kebijakan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Capaian s.d. Th. 2018 | Target Kinerja Sasaran Tahun |      |      |      |      |
|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|------------------------------|------|------|------|------|
|        |                  |                   |                   |        |                       | 2019                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1      | 2                | 3                 | 4                 | 5      | 6                     | 7                            | 8    | 9    | 10   | 11   |
|        |                  |                   |                   |        |                       |                              |      |      |      |      |

(renstra awal)

Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|-----|--------|-------------------|-------------------|--------|---------|----------|--------------|
| 1   | 2      | 3                 | 4                 | 5      | 6       | 7        | 8            |
|     |        |                   |                   |        |         |          |              |

**B. Indikator Kinerja Utama**

Pada Sub bab ini disajikan IKU Tahun 2018-2023

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (Formulasi Penghitungan) | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|
| 1   | 2                 | 3                 | 4                                   | 5           | 6                |
|     |                   |                   |                                     |             |                  |

**C. Perjanjain Kinerja**

Pada sub bab ini disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|-------------------|-------------------|--------|--------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4      | 5      |
|    |                   |                   |        |        |

1. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas/Badan/Biro melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.....,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp .....,- dan Belanja Langsung Rp.....,-. Adapun realisasi anggaran sebesar .....,- (.....%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp .....,- (..... %) belanja langsung sebesar Rp .....,- (.....%).

2 . Target Belanja Dinas/Badan/Biro .....

Tabel ..... Target Belanja Dinas/Badan/Biro Tahun 2021

| No.    | Uraian                 | Tahun Anggaran 2021    |                         |   |
|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|
|        |                        | Anggaran Belanja (Rp.) | Realisasi Belanja (Rp.) | % |
| 1      | Belanja Tidak Langsung |                        |                         |   |
| 2      | Belanja Langsung       |                        |                         |   |
| Jumlah |                        |                        |                         |   |

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Dinas/Badan/Biro yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel ..... Anggaran per Sasaran Strategis.

| No. | Sasaran Strategis/ Program                                                            | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi | % Capaian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1   | 2                                                                                     | 3                   | 4         | 5         |
| 1   | Terwujudnya pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan |                     |           |           |
| 2   | Terwujudnya destinasi wisata yang berdaya saing                                       |                     |           |           |

**BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya Pada Sub bab ini disajikan :

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja

| No. | Komponan Yang Nilai           | Bobot | Nilai<br>2020 | Nilai<br>2021 | +/-   |
|-----|-------------------------------|-------|---------------|---------------|-------|
| 1   | 2                             | 3     | 4             | 5             | 6=5-4 |
| 1   | Perencanaan Kinerja           | 30%   |               |               |       |
| 2   | Pengukuran Kinerja            | 25%   |               |               |       |
| 3   | Pelaporan Kinerja             | 15%   |               |               |       |
| 4   | Evaluasi Kinerja              | 10%   |               |               |       |
| 5   | Capaian Kinerja               | 20%   |               |               |       |
|     | Nilai Hasil Evaluasi          | 100%  |               |               |       |
|     | Tingkat Akuntabilitas Kinerja |       |               |               |       |

\*Nilai 2 (dua) Tahun terakhir

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

| No. | Rekomendasi | Tindak Lanjut / Rencana Aksi | Sudah / Belum |
|-----|-------------|------------------------------|---------------|
|     |             |                              |               |

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulanan   | Target | Realisasi | % |
|-----|-------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|--------|-----------|---|
| 1   | 2                 | 3                 | 4      | 5              | 6            | 7      | 8         | 9 |
|     |                   |                   |        |                | Triwulan I   |        |           |   |
|     |                   |                   |        |                | Triwulan II  |        |           |   |
|     |                   |                   |        |                | Triwulan III |        |           |   |
|     |                   |                   |        |                | Triwulan IV  |        |           |   |

C. Analisis Capaian Kinerja

Contoh Sasaran 1. ....

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | %<br>Capaian |
|-----|-------------------|--------|--------|-----------|--------------|
| 1   | 2                 | 3      | 4      | 5         | 6=5/4*100    |
|     |                   |        |        |           |              |

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi |      | % Peningkatan /Penurunan<br>Tahun 2021 |
|-----|-------------------|--------|-----------|------|----------------------------------------|
|     |                   |        | 2020      | 2021 |                                        |
| 1   | 2                 | 3      | 4         | 5    | $6 = (5/4-1)*100$                      |
|     |                   |        |           |      |                                        |

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir Renstra (Th. 2023) | Realisasi (Th. 2021) | Tingkat Kemajuan |
|-----|-------------------|--------|---------------------------------|----------------------|------------------|
| 1   | 2                 | 3      | 4                               | 5                    | $6 = 5/4*100$    |
|     |                   |        |                                 |                      |                  |

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2021 | Realisasi Nasional | Ket. (+/-)    |
|-----|-------------------|--------|----------------|--------------------|---------------|
| 1   | 2                 | 3      | 4              | 5                  | $6 = 5/4*100$ |
|     |                   |        |                |                    |               |

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (Masing-masing Angka 1 s.d. 4)

***(Analisis Permasalahan dan Solusi serta secara mendetail disertai Data Matrik/ Gambar/Grafik dll sebagai analisis)***

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

| No | Sasaran Strategis | %<br>Capaian Kinerja | %<br>Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1  | 2                 | 4                    | 5                        | $6 = (4-5)$       |
|    |                   |                      |                          |                   |

8. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

D. Capaian Kinerja Lainnya (bila ada)

Pencapaian MDG's Tahun 2021

| No. | Indikator Kinerja              | Target | Capaian | Status |
|-----|--------------------------------|--------|---------|--------|
| 1   | 2                              | 3      | 4       | 5      |
|     | Balita Gizi Buruk<br>(contoh)  |        |         |        |
|     | Balita Gizi Kurang<br>(contoh) |        |         |        |
|     |                                |        |         |        |

E. Realisasi Anggaran

Sub bab menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan hasil analisa.

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinejra

| No | Sasaran Strategis | Kinerja |           |           | Anggaran |           |           |
|----|-------------------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|    |                   | Target  | Realisasi | % Capaian | Target   | Realisasi | % Capaian |
| 1  | 2                 | 3       | 4         | 5         | 6        | 7         | 8         |
|    |                   |         |           |           |          |           |           |

Analisis :

2. Realisasi anggaran per program/Kegiatan/Sub Kegiatan

| No | Program/kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran |           |   | Keterangan |
|----|-------------------------------|----------|-----------|---|------------|
|    |                               | Target   | Realisasi | % |            |
| 1  | 2                             | 3        | 4         | 5 | 6          |
|    |                               |          |           |   |            |

Analisis :

BAB. IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpukan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Prov.Kaltim Tahun 2022



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 – 742111

Home Page : <http://kaltimprov.go.id>

**SAMARINDA 75121**

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : Seluruh Kepala Biro di lingkungan Setda Prov. Kaltim  
D a r i : Asisten Administrasi Umum Sekda Prov. Kaltim  
Tanggal : 03 April 2023  
Nomor : 000.1.5/0729/B.Adpm-I  
Perihal : Undangan

Dalam rangka Finalisasi Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, maka dengan ini kami mengundang Saudara/i pada:

Hari : Kamis s/d Jumat  
Tanggal : 06 s/d 07 April 2023  
Waktu : (Jadwal Terlampir)  
Tempat : Hotel Grand Tjokro Balikpapan  
Jl. Marsma R. Iswahyudi No.21 Sepinggan, Balikpapan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dimohon untuk dapat menugaskan Kabag, Kasubbag dan Staf (operator) yang membidangi tugas tersebut dengan membawa kelengkapan dokumen dan data yang diperlukan serta membawa laptop. Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi narahubung Sdri. Dita Shafrina (Hp 0821-1069-0619).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**  
  
**Ir. RIZA INDRA RIADI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641028 199003 1 009

## JADWAL KEGIATAN

### Rapat Finalisasi RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 dan Penyusunan LKjIP Setda Prov. Kaltim Tahun 2022

| HARI/TANGGAL           | WAKTU         | KEGIATAN                                                                                                       | KETERANGAN                       |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Kamis,<br>6 April 2023 | 08.30 - 09.00 | Registrasi Peserta                                                                                             | Panitia                          |
|                        | 09.00 - 09.30 | Pembukaan                                                                                                      |                                  |
|                        |               | 1. Mendengarkan Lagu Indonesia Raya                                                                            | Panitia                          |
|                        |               | 2. Pembacaan Doa                                                                                               | Panitia                          |
|                        |               | 3. Laporan Ketua Panitia                                                                                       | Kabag Perencanaan<br>Kepegawaian |
|                        |               | 4. Sambutan Sekaligus Pembukaan                                                                                | Karo Adpim                       |
|                        | 09.30 - 09.45 | <i>Ice breaking</i>                                                                                            | Panitia                          |
|                        | 09.45 - 12.00 | Finalisasi RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026                                | Moderator/<br>Biro-Biro          |
| Jumat,<br>7 April 2023 | 12.00 - 13.00 | Ishoma                                                                                                         | Panitia                          |
|                        | 13.00 - 15.00 | Finalisasi RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026                                | Moderator/<br>Biro-Biro          |
|                        | 15.00 - 15.15 | Penutupan                                                                                                      | Panitia                          |
|                        | 08.30 - 09.00 | Registrasi Peserta                                                                                             | Panitia                          |
|                        | 09.00 - 11.45 | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 | Moderator/<br>Biro-Biro          |
| Jumat,<br>7 April 2023 | 11.45 - 13.00 | Ishoma                                                                                                         | Panitia                          |
|                        | 13.00 - 15.00 | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 | Moderator/<br>Biro-Biro          |
|                        | 15.00 - 15.15 | Penutupan                                                                                                      | Panitia                          |

## NOTULEN

### Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Hari/Tanggal : Jumat, 07 April 2023  
Waktu : 08.30 WITA - Selesai  
Tempat : Hotel Grand Tjokro Balikpapan  
Peserta : (Absen Terlampir)

---

#### **PEMBUKAAN :**

Sambutan dan arahan yang disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Hj. Syarifah Alawiyah, S.Sos., M.Si., sekaligus membuka Acara Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

#### **HASIL DISKUSI :**

##### **Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah :**

- Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD) tahun 2019 s.d tahun 2021 belum dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dikarenakan hasil EPPD terhadap LPPD 2019, 2020 dan 2021 masih menunggu hasil evaluasi dari Badan Hukum Independen dalam hal ini Tim Kemitraan Kemendagri. Untuk saat ini, menggunakan realisasi EKPPD sementara yaitu 3,0885.
- Capaian kinerja terkait persentase kerjasama yang ditindaklanjuti sebesar 90,00%. Beberapa usulan kerja sama tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan beberapa hal seperti:
  - a. Tidak tersedianya lahan yang menjadi kebutuhan kerja sama;
  - b. Tidak sepakatnya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten/Kota untuk melakukan kerja sama karena tidak sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
  - c. Tidak lengkapnya permohonan kerja sama yang diusulkan.
- Dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya 2021 (85,00%), tahun 2022 (90,00%) ini mengalami peningkatan sebesar 5,88%.

##### **Biro Kesejahteraan Rakyat :**

- Capaian kinerja pada tahun 2022 telah mencapai 100,00% dimana capaian ini diperoleh dari laporan semua bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan dan social yang telah selesai dikoordinasikan, difasilitasi dan dimonitoring serta evaluasi yang dibagi total seluruh bahan kebijakan yang diinventarisir dijadikan dalam bentuk persentase.
- Salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu, terdapat kegiatan yang konsep pertemuan masih belum mengacu pada tupoksi Biro, sehingga *output* kegiatan tidak optimal membantu pencapaian target kinerja pemerintah daerah dalam RPJMD.
- Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya 2021 (85,00%), capaian kinerja tahun 2022 (100,00%) mengalami peningkatan sebesar 17,65%.

##### **Biro Hukum :**

- Perhitungan realisasi kinerja Biro Hukum tahun 2022 perlu dihitung ulang.
- Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tahun 2022, yaitu:
  - a. Konsep atau *draft* produk hukum yang diajukan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan;
  - b. Kurangnya pemahanan Perangkat Daerah dalam penyusunan produk hukum daerah.
- Dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya 2021 (99,86%), tahun 2022 ini (102,00%) Biro Hukum mengalami peningkatan sebesar 2,14%.

**Biro Perekonomian :**

- Persentase terlaksananya koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian sebesar 96,77% sedangkan persentase kepuasan masyarakat pada pelayanan Biro Perekonomian sebesar 87,00%.
- Terdapat pekerjaan kajian akademis pendirian BUMD pengelola PI yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan mengingat batas waktu pelaksanaan tidak memadai sehingga pekerjaan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2023.
- Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja:
  - a. Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar pihak terkait dalam rangka penyusunan kebijakan bidang perekonomian;
  - b. Belum tersusunnya data yang terintegrasi terkait dengan sektor-sektor di bidang perekonomian;
  - c. Kurang optimalnya upaya pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan bidang perekonomian.

**Biro Administrasi Pembangunan :**

- Biro Administrasi Pembangunan pada tahun 2022 memiliki target 75,00% dengan realisasi 97,24% sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 129,65%.
- Dilihat dari perbandingan realisasi indikator capaian pada tahun sebelumnya 2021 (98,40%), realisasi tahun 2022 sebesar 97,24% sehingga mengalami penurunan sebesar 1,18%.
- Penyebab penurunan capaian pada tahun ini adalah belum optimalnya pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelaporan. Guna memperbaiki capaian tersebut, berikut beberapa solusi:
  - a. Meningkatkan kualitas Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Meningkatkan kualitas Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah;
  - c. Meningkatkan kualitas Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

**Biro Pengadaan Barang dan Jasa :**

- Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) terkait Indikator Kinerja tahun 2022 sebesar 88,89%.
- Realisasi kinerja tahun 2022 mencapai 64,30% yang menunjukkan bahwa capaian tersebut belum mencapai 100% melainkan hanya sebesar 85,73%.
- Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya 2021 (73,13%) dengan tahun 2022 (64,30%) menunjukkan adanya penurunan dalam pencapaian kinerja sebesar 13,26%.
- Hal-hal yang menjadi permasalahan dalam pencapaian kinerja tahun 2022 adalah:
  - a. Terdapat 1 variabel yang belum terpenuhi yaitu Manajemen Penyedia dikarenakan bukti dukung yang disampaikan belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LKPP;
  - b. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
  - c. Sering terjadinya keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pelayanan;
  - d. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah belum semuanya dilakukan secara elektronik sehingga kesulitan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

**Biro Organisasi :**

- Indikator kinerja terkait Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B) memiliki realisasi kinerja sebesar 89,19% dengan capaian sebesar 112,90% dan indikator kinerja terkait indeks kelembagaan memperoleh realisasi kinerja sebesar 71,53% dengan capaian sebesar 106,76%.

- Kedua indikator tersebut telah mencapai target yang ditentukan dengan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu:  
Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B): 17,85%  
Indeks Kelembagaan: 4,97%
- Indikator kinerja terkait Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B) memiliki realisasi kinerja sebesar 85,11% dengan capaian sebesar 121,59%.
- Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2021 (72,76%), realisasi tahun ini 2022 (85,11%) mengalami peningkatan sebesar 17,12%.
- Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah belum optimalnya dan masih ada beberapa Perangkat Daerah dan UPTD yang belum melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

#### **Biro Umum :**

- Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Umum pada Semester I adalah 83,30% dan Semester II adalah 83,38%.
- Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja:
  - a. Intensitas kegiatan pimpinan yang cukup tinggi dan terkadang tidak terprediksi sebelumnya (insidental) sehingga banyak belanja-belanja yang tidak tercover dalam DPA Biro Umum, dan akhirnya harus dilakukan pergeseran anggaran atau usulan penambahan anggaran;
  - b. Regulasi tentang perencanaan dan penganggaran yang sering berubah-ubah;
  - c. Kurangnya pemahaman pelaksana kegiatan terkait pelaksanaan anggaran;
  - d. Serapan anggaran yang tidak mencapai target, sehingga realisasi di tahun 2022 kurang efektif;
  - e. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

#### **Biro Administrasi Pimpinan :**

- Persentase Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Biro Administrasi Pimpinan pada Triwulan I yaitu 85,39%;
- Persentase Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Biro Administrasi Pimpinan pada Triwulan II yaitu 85,43%;
- Persentase Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Biro Administrasi Pimpinan pada Triwulan III yaitu 85,58%;
- Persentase Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Biro Administrasi Pimpinan pada Triwulan IV yaitu 85,78%.
- Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja:
  - a. Perbedaan realisasi pada Tepra dan realisasi riil keuangan dan fisik akhir November dikarenakan faktor internal dalam melaporkan realisasi per Bagian;
  - b. Realisasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Tepra terlihat kecil (masih merah) padahal seharusnya 64,58% (hijau), realisasi keuangan dari TUP. Selain hal tersebut, ada 1 (satu) kegiatan yang direncanakan minggu ke-2 Desember 2022 yakni Renaksi Kinerja Triwulan IV;
  - c. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah, tidak semua belanja Internet Terpenuhi.

## DOKUMENTASI PENYUSUNAN LKJIP SETDA PROV. KALTIM





**DAFTAR HADIR** : Penyusunan LKJIP Setda Prov. Kaltim Tahun 2022  
**HARI / TANGGAL** : Jum'at, 7 April 2023  
**PUKUL** : 08.30 - selesai  
**TEMPAT** : Hotel Grand Tjokro Balikpapan

| NO | NAMA                  | INSTANSI KERJA  | JABATAN      | TANDA TANGAN |
|----|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| a  | b                     | c               | d            | f            |
| 1  | Hj. Sy. Alauyiah      | Biro Aspin      | Karo         | 1            |
| 2  | Inni Indarpuri        | —               | Kabag.       | 2            |
| 3  | Eduardo H.            | B. Adpin        | Staf         | 3            |
| 4  | Hafiz Shaha           |                 |              | 4            |
| 5  | Hana Iriana           | mi umum         | Kelg         | 5            |
| 6  | Joko Sifa Bud         | "               | Kabag        | 6            |
| 7  | Anik Suhartaht        | Kabag B.Eto     |              | 7            |
| 8  | Nantik Purwantiningah | B.Eto           | Kasubbag     | 8            |
| 9  | MARYAH ALAIBTI/AM     | BIRO ORGANISASI | KASUBBAG TU  | 9            |
| 10 | Alma Adia             | B. Kosta        | Kasubbag     | 10           |
| 11 | Gibny Goren           | B. Leresiz      | TU           | 11           |
| 12 | Hairatma              | B. Adpin        | Staf         | 12           |
| 13 | Eddy Mulyono          | B. Polb         |              | 13           |
| 14 | Maya Fitria.          | B. Kosta        | KTU          | 14           |
| 15 | Astuti Darma          | Biro Aspin      | Kasubbag TU  | 15           |
| 16 | INDRI WAKJUMI         | "               | TU           | 16           |
| 17 | Fenny                 | B. Hukum        | Staf         | 17           |
| 18 | Anelika               | B. Hukum        | Staf         | 18           |
| 19 | Daniel Lestri         | B. Adberrig     | Staf         | 19           |
| 20 | Burhan Alai           | — " —           | — " —        | 20           |
| 21 | Rahmahatun Syarif M.  | B. Adpin        | Staf/Pencana | 21           |
| 22 | VIRSA                 | B Adpin         |              | 22           |

| NO  | NAMA            | INSTANSI<br>KERJA | JABATAN | TANDA TANGAN |    |
|-----|-----------------|-------------------|---------|--------------|----|
| a   | b               | c                 | d       | f            |    |
| 23. | Bera Nurpzhani  | B. Adm            | Staf TU | 23           |    |
| 24. | Alfriz Rosaja   | B. Umum           | Staf    |              | 24 |
| 25. | Darmansyah      | B. Organisasi     | Staf    | 25           |    |
| 26. | Harris Yudianto | B. Adm            | Staf TU |              | 26 |
| 27. | Heruna          | B. Adm            | Staf TU | 27           |    |
| 28. | Wahyu Dwi A     | B. Umum           | Staf TU |              | 28 |
| 29. | W. Fauzan       | "                 | TU      | 29           |    |
| 30. | Saiful A.       | Biro PBJ          | Staf    |              | 30 |
| 31. | Noor Aini       | Biro PBJ          | Staf    | 31           |    |
| 32. | Tri Lamsari     | -11-              | -11-    |              | 32 |
| 33. | Sulaksana       | BIRO. PBJ         | Staf    | 33           |    |
| 34. | Baru Fauzan H   | B. PSI            | Staf    |              | 34 |
| 35. | Imanudin        | BPOD              | KRS     | 35           |    |
| 36. | Athalia Z.      | B. Ekonomi        | Staf    |              | 36 |
| 37. | Umi Wahyuni     | B. POD            |         | 37           |    |
| 38. | Ayaz HW         | B. POD            |         |              | 38 |
| 39. | ZIQRI           | B. POD            |         | 39           |    |
| 40. | Adhi            | B. POD            |         |              | 40 |
| 41. |                 |                   |         | 41           |    |
| 42. |                 |                   |         |              | 42 |
| 43. |                 |                   |         | 43           |    |
| 44. |                 |                   |         |              | 44 |
| 45. |                 |                   |         | 45           |    |
| 46. |                 |                   |         |              | 46 |
| 47. |                 |                   |         | 47           |    |



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Sa'bani  
Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Kaltim

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si.  
Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Januari 2022

Pihak Kedua  
Gubernur Kalimantan Timur,

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si

Pihak Pertama  
Sekretaris Daerah,

Muhammad Sa'bani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| SASARAN                                                      | INDIKATOR SASARAN                                                                   | SATUAN     | TARGET              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah       | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)                   | Skor       | 3.10                |
|                                                              | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti                                           | Persentase | 92.50               |
|                                                              | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi                                | Persentase | 100.00              |
|                                                              | Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti                              | Persentase | 87.00               |
| Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan | Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti             | Persentase | 95                  |
|                                                              | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | Persentase | 75                  |
|                                                              | Indeks tata kelola pengadaan                                                        | Indeks     | 75<br>(baik)        |
| Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik             | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B)                 | Persentase | 79                  |
|                                                              | Indeks Kelembagaan                                                                  | Indeks     | 67<br>(peringkat 4) |
| Meningkatnya kualitas layanan pemerintah                     | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah     | Indeks     | 77.50<br>(B/Baik)   |
|                                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan                 | Indeks     | 77.35               |
|                                                              | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)        | Persentase | 70                  |



| NO. | PROGRAM                                                   | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1.  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     | 188.357.994.218  | APBD       |
| 2.  | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                               | 3.656.979.000    | APBD       |
| 3.  | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                   | 3.320.147.604    | APBD       |
| 4.  | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                              | 44.637.954.075   | APBD       |
| 5.  | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                   | 3.127.527.200    | APBD       |
| 6.  | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                      | 2.268.714.000    | APBD       |
| 7.  | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 4.481.147.400    | APBD       |
| 8.  | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                | 5.136.163.000    | APBD       |

Total Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp 254.986.626.497,- (dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pihak Kedua  
Gubernur Kalimantan Timur,

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si

Samarinda, 3 Januari 2022

Pihak Pertama  
Sekretaris Daerah,

Muhammad Sa'bani



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Deni Sutrisno, M.Si

Jabatan : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Prov. Kaltim

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Sa'bani

Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Kaltim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Januari 2022

Pihak Kedua  
Sekretaris Daerah,

Muhammad Sa'bani

Pihak Pertama  
Plt. Asisten Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat,

Drs. Deni Sutrisno, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| SASARAN                                                | INDIKATOR SASARAN                                                 | SATUAN     | TARGET |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Skor       | 3.10   |
|                                                        | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti                         | Persentase | 92.50  |
|                                                        | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi              | Persentase | 100.00 |
|                                                        | Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti            | Persentase | 87.00  |

| NO. | PROGRAM                                               | ANGGARAN (Rp)  | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1.  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 5.662.499.159  | APBD       |
| 2.  | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH               | 3.320.147.604  | APBD       |
| 3.  | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                          | 44.637.954.075 | APBD       |
| 4.  | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM               | 3.127.527.200  | APBD       |

Total Anggaran Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar **Rp 56.748.128.038,-** (lima puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah).

Pihak Kedua  
Sekretaris Daerah,

Muhammad Sa'bani

Samarinda, 3 Januari 2022

Pihak Pertama  
Plt. Asisten Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat,

  
Drs. Deni Sutrisno, M.Si



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abu Helmi, SE., M.Si

Jabatan : Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Sa'bani

Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Kaltim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Januari 2022

Pihak Kedua  
Sekretaris Daerah,

Muhammad Sa'bani

Pihak Pertama  
Asisten Perekonomian dan  
Administrasi Pembangunan,

Abu Helmi, SE., M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| SASARAN                                                      | INDIKATOR SASARAN                                                                   | SATUAN     | TARGET       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan | Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti             | Persentase | 95           |
|                                                              | Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama | Persentase | 75           |
|                                                              | Indeks tata kelola pengadaan                                                        | Indeks     | 75<br>(baik) |

| NO. | PROGRAM                                                   | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1.  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     | 7.982.494.600    | APBD       |
| 2.  | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                      | 2.268.714.000    | APBD       |
| 3.  | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 4.481.147.400    | APBD       |
| 4.  | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                | 5.136.163.000    | APBD       |

Total Anggaran Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar **Rp 19.868.519.000,-** (sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pihak Kedua  
Sekretaris Daerah,

Muhammad Sa'bani

Samarinda, 3 Januari 2022

Pihak Pertama  
Asisten Perekonomian dan  
Administrasi Pembangunan,

Abu Helmi, SE., M.Si



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. S. Fathul Halim, SE., MM

Jabatan : Asisten Administrasi Umum Prov. Kaltim

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Sa'bani

Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Kaltim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Januari 2022

Pihak Kedua  
Sekretaris Daerah,

Muhammad Sa'bani

Pihak Pertama  
Asisten Administrasi Umum,

H. S. Fathul Halim, SE., MM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| SASARAN                                          | INDIKATOR SASARAN                                                               | SATUAN     | TARGET              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B)             | Persentase | 79                  |
|                                                  | Indeks Kelembagaan                                                              | Indeks     | 67<br>(peringkat 4) |
| Meningkatnya kualitas layanan pemerintah         | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah | Indeks     | 77.50<br>(B/Baik)   |
|                                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan             | Indeks     | 77.35               |
|                                                  | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)    | Persentase | 70                  |

| NO. | PROGRAM                                               | ANGGARAN (Rp)   | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1.  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 174.713.000.459 | APBD       |
| 2.  | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                           | 3.656.979.000   | APBD       |

Total Anggaran Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar **Rp 178.369.979.459,-** (seratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

Samarinda, **3** Januari 2022

Pihak Kedua  
Sekretaris Daerah,

**Muhammad Sa'bani**

Pihak Pertama  
Asisten Administrasi Umum,

**H. S. Fathul Halim, SE., MM**

## Dokumentasi *Employee of The Month*



*Employee of The Month* adalah salah satu model yang dikembangkan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam memonitor kinerja Eselon III dan Eselon IV sebagai pemberian *reward* dan *punishment*.



# **Employee of the Month**

## **EKOSISTEM AGEN PERUBAHAN**

**Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim**



**Mahezha Jennar S.STP, M.Si**

**Analisis Kebijakan Ahli Muda**

**Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah  
Setda Prov Kaltim**

**November 2022**